

Editor:

*DR. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.H., S.E., S.T., S.AP.,
S.IP., S.IKom., M.M., M.Si.*



PEREKONOMIAN INDONESIA



DR. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.H., S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.IKom., M.M., M.Si.
Nur-Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M. | Dr. (Cand.) Sri Juminawati, SE, MM, CLA-ALC, CME, CEXT.
Dr. (Cand.) Sri Juminawati, SE, MM, CLA-ALC, CME, CEXT. | Dr. (Cand.) Sri Juminawati, SE, MM, CLA-ALC, CME, CEXT.
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM, CHRA | Yasir Riady, S.S., M.Hum.
Rini Ardista, S.Pd.I., MM | Erdinson Simbolon, S.E. | Dr. Hj. Arniati S.E. M.Pd.
Slamet Suprihanto, SE, M.Ak., MM., CAP., CAAT., CTT.

PEREKONOMIAN INDONESIA

- BAB 1 SISTEM EKONOMI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN REFORMASI EKONOMI DI INDONESIA
DR. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.H., S.E., S.T., S.AP., S.IP., S.IKom., M.M., M.Si.
- BAB 2 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI INDONESIA
Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.
- BAB 3 EKONOMI PERTANIAN DAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA
Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.
- BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN DI INDONESIA
Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.
- BAB 5 KEUANGAN NEGARA DAN APBN RI
Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.
- BAB 6 KOPERASI DI INDONESIA
DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA.
- BAB 7 KORUPSI DI INDONESIA
Yasir Riady, S.S., M.Hum.
- BAB 8 KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA
Rini Ardista, S.Pd.I., MM
- BAB 9 PEMBANGUNAN MANUSIA, GOOD GOVERNANCE, OTONOMI DAERAH DI INDONESIA
Erdinson Simbolon, S.E.
- BAB 10 INFLASI DAN DEFLASI
Dr. Hj. Arniati S.E. M.Pd.
- BAB 11 KRISIS ILMU EKONOMI DAN ILMU EKONOMI PANCASILA
Slamet Suprihanto, SE., M.Ak., MM., CAP., CAAT., CTT.

Editor:

*DR. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.H., S.E., S.T., S.AP.,
S.IP., S.IKom., M.M., M.Si.*

PEREKONOMIAN INDONESIA

DR. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP.,
S.IKom., M.M., M.Si.

Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.

Dr. (Cand.) Sri Juminawati, SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.

DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA.

Yasir Riady, S.S., M.Hum.

Rini Ardista, S.Pd.I., MM

Erdinson Simbolon, S.E.

Dr. Hj. Arniati, S.E., M.Pd.

Slamet Suprihanto, SE., M.Ak., MM., CAP., CAAT., CTT.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

PEREKONOMIAN INDONESIA

Penulis : DR. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.IKom., M.M., M.Si., Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M., Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT., DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA., Yasir Riady, S.S., M.Hum., Rini Ardista, S.Pd.I., MM, Erdinson Simbolon, S.E., Dr. Hj. Arniati, S.E., M.Pd., Slamet Suprihanto, SE., M.Ak., MM., CAP., CAAT., CTT.

Editor : DR. Drs. Sunarno SastroAtmodjo, S.E., S.H., S.T., S.AP., S.IP., S.IKom., M.M., M.Si.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-487-604-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, DESEMBER 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “PEREKONOMIAN INDONESIA”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas tentang Akuntansi Keuangan Menengah dalam beberapa bab, diantaranya:

- Bab 1 Sistem Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Reformasi Ekonomi di Indonesia
- Bab 2 Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia
- Bab 3 Ekonomi Pertanian dan Industrialisasi di Indonesia
- Bab 4 Sistem Keuangan dan Perbankan di Indonesia
- Bab 5 Keuangan Negara dan APBN RI
- Bab 6 Koperasi di Indonesia
- Bab 7 Korupsi di Indonesia
- Bab 8 Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia
- Bab 9 Pembangunan Manusia, Good Governance, Otonomi Daerah di Indonesia
- Bab 10 Inflasi dan Deflasi
- Bab 11 Krisis Ilmu Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Pancasila

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 SISTEM EKONOMI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN REFORMASI EKONOMI DI INDONESIA.....	1
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi.....	1
B. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	2
C. Tipe Pertumbuhan Ekonomi.....	10
D. Reformasi Ekonomi di Indonesia.....	12
E. Daftar Pustaka.....	16
F. Tentang Penulis.....	18
BAB 2 KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI INDONESIA.....	21
A. Pendahuluan.....	21
B. Kebijakan Fiskal.....	22
C. Kebijakan Moneter.....	30
D. Daftar Pustaka.....	36
E. Tentang Penulis.....	38
BAB 3 EKONOMI PERTANIAN DAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA.....	39
A. Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian.....	39
B. Kebijakan Pembangunan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan.....	46
C. Daftar Pustaka.....	54
D. Tentang Penulis.....	56
BAB 4 SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN DI INDONESIA.....	58
A. Sistem Keuangan.....	58
B. Perbankan di Indonesia.....	65
C. Daftar Pustaka.....	72
D. Tentang Penulis.....	73
BAB 5 KEUANGAN NEGARA DAN APBN RI.....	75
A. Konsep Dasar dan Sistem Keuangan Negara.....	75
B. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara.....	77
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)....	82

D. Daftar Pustaka.....	89
E. Tentang Penulis.....	90
BAB 6 KOPERASI DI INDONESIA	91
A. Sejarah Perkoperasian di Indonesia	91
B. Pengertian Koperasi dan Karakteristik Organisasi Koperasi	98
C. Landasan dan Asas Koperasi.....	98
D. Sendi Dasar dan Tujuan Koperasi	99
E. Persyaratan, Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi	101
F. Kesehatan dan Pengawas Koperasi.....	102
G. Daftar Pustaka:.....	103
H. Tentang Penulis.....	104
BAB 7 KORUPSI DI INDONESIA	106
A. Kerangka Sejarah Korupsi di Indonesia.....	112
B. Desentralisasi Korupsi Indonesia.....	113
C. Korupsi pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono	114
D. Korupsi Selama Pemerintahan Joko Widodo	116
E. Perkembangan Positif dalam Perjuangan Indonesia Melawan Korupsi.....	117
F. Daftar Pustaka	117
G. Tentang Penulis.....	119
BAB 8 KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA.....	120
A. Pengertian dan Dimensi Kemiskinan.....	120
B. Paradigma dan Penyebab Kemiskinan	123
C. Struktur Ketenagakerjaan Indonesia.....	131
D. Lapangan Kerja dan Pengangguran.....	131
E. Daftar Pustaka.....	135
F. Tentang Penulis.....	138
BAB 9 PEMBANGUNAN MANUSIA, GOOD GOVERNANCE, OTONOMI DAERAH DI INDONESIA	139
A. Pembangunan Manusia di Indonesia.....	139
B. <i>Good Governance</i>	141
C. Otonomi Daerah.....	144
D. Daftar Pustaka.....	156

E. Tentang Penulis	157
BAB 10 INFLASI DAN DEFLASI.....	159
A. Inflasi	159
B. Deflasi.....	164
C. Daftar Pustaka	172
D. Tentang Penulis	174
BAB 11 KRISIS ILMU EKONOMI DAN ILMU EKONOMI	
PANCASILA.....	175
A. Krisis Ilmu Ekonomi	175
B. Ilmu Ekonomi Pancasila	178
C. Daftar Pustaka	186
D. Tentang Penulis	187

BAB

1

SISTEM EKONOMI, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN REFORMASI EKONOMI DI INDONESIA

DR. Drs. Sunarno Sastro Atmodjo, S.E., S.T., S.AP., S.IP.,
S.IKom., M.M., M.Si.
Dosen di Jabodetabek

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Sistem Ekonomi

1. Pengertian Sistem Ekonomi

a. George N. Halm

George N. Halm menyatakan bahwa "*Economic system differ, socialist or capitalist, planned or unplanned, ccording to their institutions*". Pendapat ini menekankan kaitan yang erat antara sistem ekonomi dengan lembaga-lembaga yang ada padanya.

b. John F. Due

Pendapat lain yang sejalan dengan pendapat di atas dikemukakan oleh John F. Due bahwa sebuah sistem ekonomi adalah "*... as the group of economic institutions or, regarded as a unit the economic system, the organization through the operation of which the various resources scarce, relative to the need for them are utilized to satisfy the wants of man*".

2. Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Sistem Ekonomi

Berbagai unsur pendukung yang dapat memberi warna pada sistem ekonomi sebagaimana dikemukakan juga oleh Van der Valk, seperti dikutip oleh Winardi, bahwa

beberapa hal yang dihadapi manusia dapat disebutkan sebagai berikut.

- a. Kebutuhan manusia.
- b. Jumlah, sifat, serta susunan penduduk.
- c. Konstelasi alamiah negara yang bersangkutan.
- d. Jumlah barang-barang modal yang tersedia.
- e. Pengetahuan teknik.
- f. Organisasi yuridis dan sosial masyarakat.

B. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pada dasarnya teori pembangunan ekonomi dapat digolongkan menjadi lima golongan besar yaitu aliran Klasik, Neo Klasik, Post Keynesian, Karl Marx, Schumpeter,

1. Aliran Klasik

Analisis dari aliran teori tersebut pada dasarnya menelaah hal-hal berikut:

- a. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, dan
- b. Proses pertumbuhan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ditentukan oleh:

- a. Jumlah persediaan kapital,
- b. Luas tanah,
- c. Tingkat teknologi yang dipakai, serta
- d. Perkembangan jumlah penduduk.

Empat faktor tersebut, masing-masing menurut teori klasik memiliki peranan yang menentukan mengingat keadaan serta jumlahnya yang konstan, sedangkan peranan penduduk dianggap memberikan sumbangan yang positif bagi pembangunan dilihat dari segi:

- a. Sebagai unsur demand atau potensi pasar, dan
- b. Sebagai sumber tenaga terampil maupun menyediakan golongan wiraswasta.

- c. Dua faktor lainnya yaitu, modal dan teknologi, khususnya modal dipandang oleh teori ini sebagai unsur yang terpenting bagi terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Analisis mengenai proses pertumbuhan ekonomi, menganalisis tentang peramalan akhir dari proses pertumbuhan ekonomi. Aliran klasik melihat bahwa kelebihan penduduk menyebabkan suatu masyarakat akan mengalami kemunduran kembali dalam pembangunannya. Ahli-ahli ekonomi klasik antaranya Karl Marx menganggap bahwa proses pertumbuhan ekonomi melalui tahap-tahap tertentu dan akibat adanya proses persaingan maka masyarakat akan menuju kepada tingkat atau tahap yang lebih baik (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi; 1986). Beberapa penganut aliran Klasik itu, di antaranya Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus.

1) Adam Smith

Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Spesialisasi dalam proses produksi akan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dapat mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru dan akhirnya dapat mempercepat dan meningkatkan produksi.

2) David Ricardo

Menurut David Ricardo, di alam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatnya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa

golongan ini tergantung pada golongan kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat. Adapun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakannya.

3) Thomas Robert Malthus

Menurut Malthus kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk saja tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lain sudah tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Dengan demikian tumbuhnya jumlah penduduk saja justru akan menurunkan tingkat upah dan berarti pula memperendah biaya produksi. Turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus memproduksi. Tetapi keadaan ini hanya sementara saja sifatnya, sebab permintaan efektif (effective demand) akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga semakin berkurang (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2. Aliran Neo Klasik

Aliran Neo Klasik merupakan analisa yang didasarkan kepada teori Klasik. Menurut Neo-Klasik permintaan masyarakat tidak menentukan laju pertumbuhan ekonomi, melainkan tergantung pada pertambahan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Aliran Neo-Klasik memberikan ramalan yang sangat pesimistis, yaitu adanya kelebihan penduduk yang mengakibatkan adanya kemunduran kembali dalam pembangunan ekonomi sebagai akibat kekurangan kapital.

Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi.
- Perkembangan itu merupakan proses yang gradual
- Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap perkembangan
- Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

3. Aliran/Analisis Post-Keynesian

Aliran atau kajian/analisa Post-Keynesian berpandangan lebih moderat atau tidak terlalu pesimis dalam hal perkembangan ekonomi jangka panjang, yaitu bahwa danya kekurangan modal hanya akan berakibat adanya kelambanan dan adanya resesi ekonomi (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi; 1986). Teori Keynes terbatas pada analisa jangka pendek. Untuk analisisnya Keynes menggunakan anggapan berdasar atas keadaan waktu sekarang. Teori Harrod-Domar atau juga disebut sebagai Post-Keynesian merupakan pengembangan dari analisa Keynes, maka tidak mengherankan kalau terdapat perbedaan pandangan antara keduanya. Penanaman modal menurut Horrod-Domar mempunyai fungsi ganda yaitu, sebagai penambahan kapasitas alat-alat modal dan mempertinggi keseluruhan pengeluaran masyarakat; hal terakhir itulah yang dipandang paling penting.

a. Analisis Harrod dan Domar: Mengenai Pertumbuhan yang Mantap (*Steady Growth*)

Analisisnya berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan riil yang terus menerus tanpa ada gangguan apa-apa.

Karena investasi adalah pembentukan modal dan dapat menaikkan kapasitas produksi, maka pembentukan alat-alat kapital baru akan mempunyai beberapa pengaruh:

- 1) Kapital yang baru akan tetap belum dapat digunakan, sebab bila digunakan hasilnya tidak dapat terjadi, karena pendapatan tetap.
- 2) Kapital baru itu akan digunakan dengan biaya dari alat kapital yang telah ada sebelumnya
- 3) Kapital yang baru akan menggantikan tenaga kerja

b. Analisis Evsey D. Domar

Anggapan yang dipakai untuk teorinya adalah:

- 1) Bahwa perekonomian sudah ada dalam tingkat pengerjaan penuh (*full employment income*)
- 2) Tidak ada pemerintah dan perdagangan luar negeri.
- 3) Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*) atau dengan kata lain ada penyesuaian yang cepat.
- 4) Hasrat menabung marjinal (*marginal propensity to save*) dan hasrat menabung rata-rata (*average propensity to save*) sama.

Aliran Neo-Klasik dan Aliran/Analisis Post-Keynesian berkembang setelah adanya resesi ekonomi dunia tahun 1930, yang nampaknya merupakan bukti kelemahan penting dari teori Klasik, sehingga diharapkan keduanya merupakan sumbangan penting bagi penanganan masalah pembangunan ekonomi periode tersebut dapat dirumuskan peranannya dalam menunjukkan:

- 1) Faktor-faktor yang menentukan pembangunan ekonomi;
- 2) Sampai dimana pentingnya masing-masing faktor tersebut dalam menentukan pembangunan ekonomi.

4. Teori Pertumbuhan & Kehancuran dari Karl Marx

a. Sejarah Perkembangan Masyarakat

Karl Marx mengemukakan teorinya berdasar atas sejarah perkembangan masyarakat dimana perkembangan itu melalui 5 tahap:

- 1) masyarakat komunal primitif
- 2) masyarakat perbudakan
- 3) masyarakat feodal
- 4) masyarakat sosialis

Ad.1) Masyarakat Komunal Primitis (*primitive communal*)

Dalam tahap ini masyarakat menggunakan alat untuk bekerja yang sifatnya masih sangat sederhana seperti alat-alat dari batu dan sebagainya. Alat yang masih sederhana itu bukan milik perseorangan tetapi milik komunal. Dalam masyarakat ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena orang membuat sendiri barang-barang untuk kebutuhannya sendiri.

Ad.2) Masyarakat Perbudakan (*Slavery*)

Hubungan produksi antara orang-orang yang memiliki alat-alat produksi dengan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka merupakan dasar terbentuknya masyarakat perbudakan. Dengan cara kerja seperti ini keuntungan para pemilik alat produksi semakin besar karena budak-budak hanya diberi sekedar naskah supaya dapat bekerja dan tidak mati.

Ad.3) Masyarakat Feodal

Karena adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat maka berakhirlah sistem perbudakan dan terbentuklah suatu masyarakat baru yaitu masyarakat feodal, dimana kaum bangsawan memiliki alat-alat produksi yang paling utama yaitu tanah. Para petani kebanyakan terdiri dari bekas budak yang dibebaskan.

Mereka mengerjakan tanah miliknya sendiri dapat dikerjakan.

Ad.4) Masyarakat Kapitalis

Seperti diketahui masyarakat menghendaki kebebasan ekonomi. Hubungan produksi dalam sistem kapitalis didasarkan pada pemilikan individu (*private ownership*) masing-masing kapitalis terhadap alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan kelas buruh yang mau tidak mau menjual tenaganya karena mereka tidak memiliki alat produksi.

Ad.5) Masyarakat Sosialis

Dalam sistem sosialis, pemilikan alat-alat produksi didasarkan atas hak milik sosial (*social ownership*) hubungan produksi merupakan hubungan kerja sama dan saling membantu diantara buruh yang bebas dari unsur eksploitasi.

b. Runtuhnya Sistem Kapitalis

Setiap tingkat (fase) keadaan ekonomi dan sosial masyarakat dengan teknologi dan semangatnya yang khusus, menimbulkan jenis-jenis pertentangan kelas yang berakhir dengan runtuhnya fase tersebut dan timbulnya fase berikut yang sifatnya lebih tinggi daripada fase sebelumnya. Mengenai perkembangan sistem kapitalis, Karl Marx bersifat pesimis, karena kapitalisme tidak saja akan mengalami stagnasi tetapi juga akan mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme itu sendiri. Fase-fase keruntuhan Sistem Kapitalis, adalah sebagai berikut:

1) Konsentrasi

Perusahaan yang satu menggabung dengan perusahaan lain supaya tidak bangkrut karena persaingan. Dengan demikian terjadilah pemusatan-pemusatan perusahaan menjadi perusahaan-perusahaan besar yang jelas jumlahnya makin sedikit.

2) Akumulasi

Perusahaan yang sudah menggabung akan bertambah besar jumlahnya karena sedikit banyak perusahaan yang sudah besar itu memiliki kedudukan monopoli, sehingga kekayaannya semakin menumpuk (berakumulasi). Perbedaan antara si kaya dan si miskin menjadi semakin besar.

3) Kesengsaraan

Persaingan tersebut di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang kecil menjadi bubar dan mereka menggabungkan diri pada buruh. Buruh menjadi semakin banyak jumlahnya dan semakin kuat pula. Karena penawaran buruh semakin banyak, maka upah dapat ditekan dan mereka ini masih dapat didesak oleh kaum kapitalis. Akibatnya kemelaratan menjadi semakin meluas.

c. Proses Perkembangan Ekonomi

Kemutakiran dunia teknologi merupakan faktor yang penting sekali bagi perkembangan. Dengan teknik yang lebih baik, keuntungan akan bertambah, kemudian diinvestasikan lagi dan seterusnya. Tetapi hal itu tidak dapat berjalan terus, perkembangan ekonomi kapitalis itu tidak saja macet tetapi bahkan mengaami kehancuran (Irawan & M Suparmoko; 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

5. Teori Inovasi dari Scumpeter

a. Implementasi Kombinasi Faktor Produksi

Kombinasi baru dilaksanakan oleh wiraswasta (enterpreneur). Mereka ini adalah inovator yang melaksanakan kombinasi baru faktor produksi. Yang diartikan dengan inovasi dapat berbentuk lima hal yaitu :

- 1) Mengemukakan atau mengenalkan barang-barang baru

- 2) Mengenalkan suatu metode produksi yang baru
- 3) Pembukaan pasar baru bari perusahaan
- 4) Penemuan sumber-sumber ekonomi baru
- 5) menjalankan organisasi baru dalam industri

b. Runtuhnya Sistem Kapitalis

Dengan anggarapan seperti tersebut di atas Schumpeter berpendapat bahwa dasar-dasar ekonomi dan sosial sistem kapitalis itu akan runtuh. Ia mendasarkan pendapatnya itu atas tiga hal:

- Usangnya fungsi wiraswasta
- Runtuhnya rangka kehidupan masyarakat kapitalis
- Runtuhnya golongan politikus

C. Tipe Pertumbuhan Ekonomi

1. Pembangunan Secara Spontan di Negara-Negara Barat (*Spontaneous Development*)

Pada masa renaissance, orang menggunakan rasionya atau nalarnya untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan teknologis. Reformasi ini sedikit demi sedikit mendobrak halangan agama untuk perkembangan ekonomi. Pinjaman berbunga akhirnya dapat diterima. Ini mendorong untuk adanya akumulasi kapital. Kekayaan materiil dipandang berharga sehingga merupakan pendorong untuk berusaha, yang juga merupakan mesin bagi perkembangan ekonomi. Kondisi ini menjadikan suatu perekonomian nasional semakin baik dan berakhirilah masalah kesulitan angkutan dari barang yang tadinya tidak dapat diangkut kaena ongkos yang cukup mahal dan faktor berat dari barang tersebut. Jadi transportasi mendorong produksi industri dan pertanian untuk pasar nasional dan internasional.

Gejala-gejala yang penting adalah adanya akumulasi modal secara perlahan-lahan dan tersebarnya keterampilan wiraswasta dengan jalan perdagangan luar negeri,

modernisasi pertanian menaikkan hasil produksi sehingga dapat mensuplai bahan makanan dan tenaga kerja di sektor industri. Disamping itu juga perluasan dibidang transpor yang dapat memperluas pasar baik dalam negeri maupun ke luar negeri (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2. Pembangunan yang Didorong di Jepang (*Induced Development*)

Jepang merupakan negara yang diperintah oleh kaum feodal yang telah menyesuaikan diri dibawah pimpinan pemerintah ke perekonomian kapitalis. Berhasilnya perkembangan ini juga karena faktor psikologi dimana penduduk tetap disiplin dan taat pada pemerintah. Pemerintah mengambil peranan yang sangat penting dan sektor swasta mengikutinya dan kemudian dapat mengambil alih usaha pemerintah. Ekspor mula-mula berupa produksi primer (sutera) kemudian ekspor industri barang konsumsi (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

3. Perkembangan Ekonomi Uni Sovyet “Pembangunan yang dipaksakan” (*Forced Development*)

Model pembangunan yang diterapkan di Uni Sovyet, merupakan pengembangan ekonomi yang diapaksakan. Pertumbuhan ekonomi di negara tersebut cukup baik walau ada kekurangan di beberapa hal. Perkembangan di sektor pertanian masih kalah dibandingkan dengan perkembangan sektor industri.

4. Perkembangan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang

Karakter utama perekonomian di negara sedang berkembang adalah “ekonomi dualistis”, yakni industri ekspor yang sudah menggunakan sistem modern, serta masih berada di tingkat subsistem (pertanian tradisional dan kerajinan). Kedua sektor kegiatan ini memproduksi barang-

barang untuk pasar lokal dan terpisah dari perekonomian pasar modern (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

5. Transformasi Struktur Perekonomian

Berprosesnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya mendorong perubahan yang mendasar pada hubungan ekonomi melainkan juga perubahan kelembagaan yang ada. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi berbagai unsur sosial masyarakat, lembaga sosial maupun lembaga politik. Penduduk dinegara berpendapatan rendah membelanjakan pendapatannya dengan proporsi terbesar untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan naiknya pendapatan perkapita porsi pengeluaran untuk konsumsi pangannya berkurang dan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya diluar pangan meningkat. Kenaikan permintaan akibat naiknya pendapatan ini diimbangi dengan naiknya produksi. Pada gambar berikut ini tampak pengaruh kenaikan PNB per kapita dalam US\$ terhadap pola konsumsi masyarakat suatu Negara (Baskara IN & NS Damajanti, 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

D. Reformasi Ekonomi di Indonesia

1. Krisis Moneter Indonesia

Krisis moneter tersebut ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis Krisis moneter ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Secara sederhana krisis moneter yang dialami Indonesia disebabkan oleh meningkatnya permintaan valuta asing, khususnya dolar AS, yang melebihi penawaran.

a. Faktor Internal yang Mendorong Terjadinya Krisis Moneter

- 1) Defisit transaksi berjalan Indonesia yang cenderung membesar. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah

menjadi semakin kuat manakala beban pembayaran terhadap impor dan kewajiban terhadap perusahaan jasa-jasa asing semakin besar. Selama ini, defisit transaksi berjalan ditambal dengan arus modal masuk yang cukup besar dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio. Tetapi setelah krisis kepercayaan terjadi, investor asing tidak ingin menanggung kerugian maka ia membawa modalnya ke luar.

- 2) Tingkat akumulasi inflasi Indonesia yang sangat tinggi. Selama kurun waktu empat tahun (1992-1996) inflasi kumulatif sebesar 39,1 persen, sedangkan inflasi Amerika Serikat hanya 14,3 persen. Tetapi pada saat yang sama depresiasi kumulatif rupiah senantiasa ditahan oleh otoritas moneter sebesar 15,57 persen. Oleh karena itu rupiah sebenarnya overvalued karena depresiasi ditahan yakni sekitar 9,2 persen. Pemegang otoritas moneter merasa sangat yakin fundamental ekonomi Indonesia sangat baik sehingga mereka tidak perlu melakukan kebijakan devaluasi.
- 3) Utang luar negeri Indonesia yang terlalu banyak. Kebijakan utang luar negeri yang dilakukan sejak 1965 telah membuat pemerintah terlena dengan risiko yang harus ditanggung di masa depan. Pada pertengahan tahun 1980-an sesungguhnya kita telah harus menghentikan utang luar negeri karena outflow negatif. Utang pokok dan cicilan yang harus dibayarkan setiap tahun lebih besar daripada hutang yang diterima setiap tahun. Kebijakan utang pemerintah ini ditiru oleh sektor swasta yang celaknya lagi tidak dikontrol oleh pemerintah. Mereka berbondong-bondong membuat utang luar negeri karena banyak modal negara maju yang menganggur. Mereka tidak membuat perhitungan cara pengembaliannya di kemudian hari.

b. Faktor Eksternal Juga Mendorong Terjadinya Krisis Moneter

- 1) Pergerakan finansial di tiga kutub dunia (AS, Eropa dan Jepang). Pada paruh kedua dekade 1990-an terjadi pergerakan finansial dari Jepang dan Eropa ke AS karena masalah perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi-politik penyatuan mata uang Eropa.
- 2) Institusi finansial berbentuk negara dan lembaga keuangan yang berkembang secara global mengalami perkembangan luar biasa sehingga memiliki otoritas yang lebih besar daripada negara berkembang seperti Indonesia.
- 3) Spekulasi yang mengiringi gejolak finansial global

2. Dampak Krisis Moneter

Berbeda dengan negara tetangga yang juga mengalami krisis moneter, Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan karena kerusakan sistemik yang harus dibenahi terlebih dahulu.

Penyebab lambannya Indonesia keluar dari krisis dibandingkan dengan negara Asia lain.

- a. Gelombang krisis di Indonesia telah menimbulkan kerusakan sistemik yang sangat luas dan dalam, bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang sosial, politik, hukum, keamanan dan ketertiban umum.
- b. Institusi-institusi yang menjadi pilar kehidupan ekonomi di Indonesia ternyata rapuh, sehingga krisis yang awalnya serupa dengan Malaysia dan Thailand berakhir dengan cara berbeda di Indonesia.
- c. Tekad politik atau kesungguhan untuk ke luar dari krisis tidak sekuat negara yang lain.

3. Reformasi Ekonomi

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam reformasi ekonomi guna menyelesaikan krisis ekonomi. Hal terpenting adalah mengubah paradigma kebijakan ekonomi Indonesia. Jika di masa-masa yang lalu kita sangat mementingkan pertumbuhan ekonomi, sehingga menghalalkan segala cara termasuk memberi kemudahan yang berlebihan terhadap sektor industri besar dan membuat hutang yang terlalu besar, maka saat ini yang perlu diperhatikan adalah membangun fundamental perekonomian yang kuat. Fundamental ekonomi semacam itu dapat kita bangun asal kita tidak sepenuhnya tergantung dari bantuan asing tetapi mengeksplorasi dan mengembangkan kekuatan dalam negeri. Pembangunan ekonomi tidak dititikberatkan pada pertumbuhan tetapi pada pemerataan ekonomi. Jika di masa lampau pemerintah hanya memberikan kemudahan pada industri besar saja maka sudah saatnya pemerintah memberi kemudahan pada ekonomi rakyat.

Reformasi institusional juga mutlak diperlukan dalam melakukan reformasi ekonomi karena perekonomian dapat berjalan dengan baik hanya jika didukung oleh institusi hukum dan birokrasi yang bersih. Kepastian hukum mutlak diperlukan dalam berbisnis baik bisnis yang menyangkut investasi dalam negeri maupun investasi asing. Birokrasi yang bersih, bebas KKN akan menurunkan ekonomi biaya tinggi, sehingga bisnis dapat berjalan lebih efisien.

Masalah utang luar negeri harus juga menjadi agenda reformasi ekonomi Indonesia. *Outflow* negatif yang saat ini kita alami sangat membebani perekonomian Indonesia, APBN Indonesia yang seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan sebagian besar justru digunakan untuk membayar utang luar negeri.

4. Menuju Ekonomi Kerakyatan

Dengan paradigma ekonomi kerakyatan, kita tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi lebih mengutamakan pemerataan ekonomi sehingga fundamental perekonomian berdasar pada kekuatan sendiri bukan mengandalkan bantuan asing. Mengembangkan Sistem Ekonomi kerakyatan tidak berarti menghambat proses keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi, yaitu investasi dan perdagangan bebas. Namun jelas keterlibatan kita dalam perdagangan internasional bukanlah tujuan utama tetapi tujuan sekunder. Tujuan utama pembangunan ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan kekuatan ekonomi nasional yang bertumpu pada ekonomi rakyat.

Ekonomi Kerakyatan tidak mengabaikan sektor formal namun lebih memperhatikan, melindungi dan memberikan prioritas pada usaha-usaha ekonomi rakyat yang selama sepuluh tahun terakhir diabaikan. Sektor formal dapat tumbuh dan berkembang dengan meningkatkan kemampuan mereka sendiri.

Otonomi daerah yang saat ini diterapkan di Indonesia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan ekonomi kerakyatan. Melalui otonomi tersebut diharapkan pembangunan tidak saja berpusat di Jakarta tetapi di seluruh daerah secara bersamaan. Masing-masing daerah dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyatnya masing-masing (E.S. Hamid, 2006).

E. Daftar Pustaka

- Hamid, E.S., (2006); *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Karseno AR, 2010; *Statistika Ekonomi II*; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

- Lipsey RG & PO Steiner (1984); Economics, Harper & Row Publisher Inc.
- Diterjemahkan oleh Anas Sidik, dengan judul: Pengantar Ilmu Ekonomi, Bina Aksara, Jakarta.
- Mansoer FW (2010); Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Reksohadiprodjo S, 2007; Peramalan Usaha; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Samuelson PA, (?); Economics, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Media Sains Indonesia, Bandung.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- SastroAtmodjo S, 2021; Teori Mikroekonomi. Pustaka Learning Center, Malang.
- Soelistyo & Insukindro (1995); Teori Ekonomi Makro I, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudarsono, W Usman & Boediono (?); Pengantar Ekonomi Mikro. Penerbit Karunika Jakarta Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sudjana, 1991; Statistik: Untuk Ekonomi dan Niaga; Penerbit "Tarsito", Bandung.
- Tambunan, Tulus T.H., (2009); Perekonomian Indonesia. Ghalia Indonesia. Bogor.

F. Tentang Penulis



Sunarno SastroAtmodjo

Lahir di Sragen Jawa Tengah. Pendidikan dan gelar yang pernah ditempuh/didapat: SR Modjoranu Sambu Sambirejo Sragen (1964), SMP Saverius II Sragen, SMAN III Surakarta & SMA Tunas Djaja Surakarta (1970), Sarjana Muda (Bacaloreat II) Geologi UP Yogyakarta (1974), Diploma BPA UGM Yogyakarta (1978), Fakultas Geografi UGM Yogyakarta, Sarjana Muda (Bacaloreat) Biologi UGM (1978), Sarjana Biologi UGM Yogyakarta (1981), Deploma Ahli Pratama Pengelolaan Lingkungan FMIPA UT Jakarta (1998), Magister Biologi FMIPA UI Depok (2002), Program Doktor PKLH UNJ Jakarta (2005), Sarjana Administrasi Negara/Publik FISIP UT Jakarta (2007), Sarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UT Jakarta (2009), Sarjana Sosiologi FISIP UT Jakarta (2011), Sarjana Ekonomi Manajemen FEKON UT Jakarta (2014), Doktor di bidang Ekologi UIPM Malaysia (2016), Magister Manajemen UIPM Malaysia (2017), Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FMIPA UT Jakarta (2017), Profesor Kimia Konservasi UIPM Malaysia (2018), Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP UT Jakarta (2019), Doktor Kehormatan Bidang Konservasi BCB dan Sumberdaya Pariwisata dari UIPM Malaysia (2020).

Pernah bekerja di Ditjen Geologi Pertambangan Dep ESDM, Litbang Kehutanan Deptan, Ditjen Perikanan Deptan, Litbang Deptrans, Ditjen Kebudayaan Depdikbud, Deputi Destinasi Pariwisata Depbudpar.

Pernah sebagai nara sumber dalam + 40 seminar/lokakarya/workshop /diskusi pada Sektor Pariwisata, serta sebagai penulis dalam + 40 tulisan di Bidang Pelestarian Kebudayaan. Pada semester pertama tahun 2021, telah menerbitkan 20-an buku di beberapa penerbit, dengan bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Administrasi Negara,

Sosiologi, Teknik Kimia Industri, Mata Kuliah Dasar Umum, Museologi, Konservasi Benda Budaya, serta beberapa lainnya. Selain itu juga menjadi Editor Buku di bidang keilmuan: Manajemen, Akuntansi, Sosiologi, Administrasi Negara, Hukum, Komunikasi, Teknik Kimia Industri, Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa lainnya.

Mengajar + 40 Mata Kuliah/Pelajaran di Bidang/Prodi/Laboratorium: Biologi, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Manajemen, Administrasi Negara, Geografi; di Fakultas Biologi UGM, Yayasan Penabur, Yayasan Strada, Yayasan PSKD, AKPAR Krisanti Mandiri, STP Sahid, PNJ (Poltek UI), Teknik Kimia Industri STMI Deperind RI, STIE YPBI, STIE Pelita Bangsa, STIMA IMMI, STIAKIN, Yayasan Galatia, Yayasan PAB XIV Bekasi, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta.

Belakangan terlibat sebagai Direktur CV Aneka Karya, Ketua Yayasan Aneka Satya, Pemimpin Umum Media Online Pelangi Indonesia, Ketua Dewan Pakar Yayasan KKI, Ketua Dewan Pelindung PDHI, Ketua Umum Forum Komunikasi Konservasi, Ketua Umum IKKI. Pengurus IKA-UT Pusat, Korwil Bekasi IKA-UT Jakarta, Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Pewarna Indonesia, Ketua Umum IPJERI, serta Ketua Umum IDGRI.

Pada tahun 2021, menjadi penulis dan editor di beberapa penerbit, yaitu Media Sains Indonesia Bandung, Pustaka Learning Center Malang, Insan Cendekia Mandiri Solok, Barcode Makassar, Eurika Media Aksara Purbalingga, Letrasi Nusantara Malang dll. Tulisan yang telah diterbitkan meliputi bidang Manajemen, Administasi Negara, Sosiologi, Komunikasi, Hukum, Pariwisata, Teknik Kimia Industri, Pendidikan Kewarganegaraan, Konservasi Benda Cagar Budaya, Museologi, Teknologi Pengawetan Kayu, dll. Buku-buku yang berhasil biterbitkan pada tahun 2021-2022 berjumlah lebih dari 50 buah.

Alamat:

1. Kompleks Pejuang Pratama C8 & C-9, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, 17131.

2. Kompleks Puri Harapan Blok E-14 No: 20, Setia Asih, Tarumajaya, Kab Bekasi.
3. Bumijo Tengah Jt. I No:1314, Jetis, Kota Yogyakarta.
4. Sambi 173, Sambi, Sambirejo, Sragen.

BAB 2 | KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DI INDONESIA

Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.
PKN STAN

A. Pendahuluan

Perekonomian dalam suatu negara menjadi tolak ukur dalam melihat kesejahteraan suatu negara. Ekonomi makro merupakan bidang perekonomian yang memiliki ruang lingkup sangat luas meliputi kemakmuran dan resesi, *output* barang dan jasa perekonomian, laju pertumbuhan *output*, laju inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan nilai kurs. Oleh karena itu pemerintah senantiasa menjaga stabilitas ekonomi dalam negaranya dan mencapai sasaran dalam ekonomi makro melalui penetapan berbagai kebijakan diantaranya kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan atau anggaran negara. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran anggaran atau pendapatan yang dikeluarkan pada program tertentu. Kebijakan ini dibuat dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dan menjaga keseimbangan ekonomi dalam negara.

Melalui kebijakan ini pengeluaran agregat dapat ditingkatkan yang bisa berdampak pada pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Selain itu permintaan

agregat mengenai jumlah produksi barang dan jasa pada tingkat harga tertentu juga menjadi tolak ukur keberhasilan negara. Kebijakan fiskal identik dengan optimalisasi pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak untuk mempengaruhi kondisi ekonomi, terutama kondisi makroekonomi, termasuk permintaan agregat untuk barang dan jasa, lapangan kerja, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. (Abbas, S.M. Ali; Bouhga-Hagbe, 2011)

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi dengan menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk memengaruhi kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk mengendalikan peredaran jumlah uang dan mencapai tujuan makroekonomi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter mempunyai peranan yang penting karena peredaran uang memiliki hubungan yang erat dengan sektor barang dan jasa atau sektor riil. Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka akan dapat memengaruhi variabel-variabel ekonomi di sektor riil, seperti tingkat harga, investasi, dan produksi. (Mathai, 2020)

Dengan demikian, kebijakan moneter bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi sehingga peningkatan ekonomi dapat diwujudkan. Namun, hal yang penting diperhatikan bahwa penerapan kebijakan moneter tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan ekonomi makro lainnya, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal diterapkan bersamaan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal sebagian besar didasarkan pada ide dari seorang ekonom dari Inggris yang bernama John Maynard Keynes (1883-1946). Dia berpendapat bahwa resesi ekonomi

disebabkan oleh kekurangan belanja konsumsi dan komponen investasi bisnis dari permintaan agregat. Keynes percaya bahwa pemerintah dapat menstabilkan siklus bisnis dan mengatur keluaran ekonomi dengan menyesuaikan pengeluaran dan kebijakan pajak untuk menutupi kekurangan sektor swasta. (Parker, 2011)

Dalam teori John Maynard Keynes ini Keynes meyakini bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan dan pengeluaran dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kebijakan ini bisa meningkatkan laju inflasi, aliran kas, dan mengatasi pengangguran dalam suatu negara. Teorinya dikembangkan sebagai respon atas "*The Great Depression*", yang menentang asumsi ekonomi klasik bahwa perubahan ekonomi dapat mengoreksi dengan sendirinya (auto correction). (Cimadomo, 2008)

Dalam mazhab ekonomi Keynesian, aggregate supply and aggregate demand adalah yang mendorong kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Permintaan agregat terdiri dari belanja konsumen, belanja investasi bisnis, belanja bersih pemerintah, dan ekspor neto. Selain itu, komponen sektor swasta dari permintaan agregat terlalu bervariasi dan bergantung pada faktor psikologis dan emosional untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pesimisme dan ketidakpastian di antara konsumen dan bisnis dapat menyebabkan resesi dan depresi ekonomi.

Namun, aspek perpajakan dan pengeluaran pemerintah dapat dikelola secara rasional untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan konsumsi sektor swasta dan pengeluaran investasi untuk menstabilkan ekonomi. Ketika pengeluaran sektor swasta menurun, pemerintah dapat membelanjakan lebih banyak dan atau mengurangi pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Ketika sektor swasta terlalu optimis dan membelanjakan terlalu banyak dan terlalu cepat untuk konsumsi dan proyek-proyek investasi baru, pemerintah dapat membelanjakan lebih sedikit dan atau mengenakan pajak lebih

banyak untuk mengurangi permintaan *agregat*. Dengan demikian untuk membantu menstabilkan ekonomi, pemerintah harus menjalankan sistem anggaran defisit yang besar selama kemerosotan ekonomi dan menjalankan anggaran surplus saat ekonomi mengalami pertumbuhan. Hal ini dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif atau kontraktif. (Bank, 2017)

1. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada prinsipnya, tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk stabilitas perekonomian atau stabilitas harga. Dengan kata lain, tujuan kebijakan fiskal yaitu pertumbuhan ekonomi, mencegah pengangguran, dan stabilitas harga. (Weill, 2020)

Pertumbuhan Ekonomi

Ketika perekonomian meningkat, maka bisnis semakin berkembang dan masyarakat akan memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Pendapatan masyarakat yang tinggi menjadi indikator kesejahteraan suatu negara secara keseluruhan. Upaya pemerintah dalam hal ini adalah dengan mengurangi pajak sehingga masyarakat bisa lebih banyak membelanjakan penghasilannya. Dengan demikian hal ini mampu meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis. Di saat pengeluaran pemerintah lebih tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan terpacu untuk terus meningkat.

Mencegah Pengangguran

Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu, pengangguran akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat tumbuh maksimal dan bahkan dapat menurun. Penerapan kebijakan fiskal yang tepat akan dapat mencegah pengangguran sehingga output nasional tetap terus tumbuh. Hal ini disebabkan oleh kesempatan kerja penuh dapat tercapai sehingga pendapatan nasional tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi semakin baik.

Stabilitas Harga

Apabila harga umum menurun dengan drastis, maka pengangguran akan terjadi karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Dampak dari kondisi ini adalah membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga akan muncul pengangguran. Sebaliknya, apabila harga umum naik tajam dan terus meningkat, maka akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Kenaikan harga umum atau inflasi mampu menciptakan kesempatan kerja penuh dan memberikan keuntungan kepada sebagian masyarakat. Namun, masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tetap menderita karena nilai uang yang terus menurun dan membuat mereka semakin miskin.

2. Fungsi Kebijakan Fiskal

Pada prinsipnya, kebijakan fiskal suatu negara berfungsi untuk memperlancar rencana pembangunan jangka panjang, menciptakan kestabilan ekonomi, dan melakukan pemerataan sumber daya.

Melancarkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Negara memiliki kemampuan untuk menjalankan rencana pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan. Contoh konkretnya adalah pembangunan infrastruktur untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Menciptakan Kestabilan Ekonomi

Suatu kondisi inflasi dan krisis harga bisa membuat perekonomian suatu negara memburuk. Sebagai solusi dari masalah tersebut, negara mempunyai otoritas kebijakan fiskal untuk menaikkan atau menurunkan tarif pajak.

Melakukan Pemerataan Sumber Daya

Suatu kebijakan fiskal dapat membantu negara untuk melakukan distribusi sumber daya secara merata untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat. Fasilitas tersebut

dapat berupa fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

3. Jenis Kebijakan Fiskal

Kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian yang sedang mengalami resesi merupakan salah satu cara untuk melihat bagaimana pemerintah mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk memengaruhi perekonomian. Pemerintah dapat mengeluarkan stimulus pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika orang membayar pajak yang lebih rendah, maka mereka akan memiliki pendapatan lebih banyak untuk dibelanjakan atau diinvestasikan, sehingga hal ini akan memicu permintaan yang lebih tinggi. Permintaan itu akan membuat perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga mengurangi pengangguran. Sebagai konsekuensinya, hal ini akan menaikkan upah dan memberikan konsumen lebih banyak penghasilan untuk dibelanjakan.

Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ini mengandung maksud bahwa pemerintah dapat mengupayakan ekspansi ekonomi melalui peningkatan pengeluaran tanpa kenaikan pajak yang sesuai. Sebagai contoh dengan membangun lebih banyak infrastruktur, maka dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, mendorong permintaan dan pertumbuhan.

Kebijakan fiskal ini akan memberikan dampak langsung yaitu mengubah permintaan agregat untuk barang dan jasa. Selain itu, kebijakan fiskal ini akan meningkatkan permintaan agregat melalui salah satu dari dua aspek. Pertama, jika pemerintah meningkatkan pembelian namun tarif pajaknya tidak berubah, maka akan meningkatkan permintaan. Kedua, jika pemerintah menurunkan tarif pajak atau meningkatkan belanja pemerintah, maka pendapatan rumah tangga meningkat, dan masyarakat akan

membelanjakan lebih banyak untuk konsumsi. Konsumsi yang meningkat akan meningkatkan permintaan agregat. Kebijakan fiskal juga akan mengubah komposisi permintaan agregat.

Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian karena kemampuannya memengaruhi jumlah total output yang diproduksi yaitu produk domestik bruto. Akibat dari kebijakan fiskal ekspansif adalah meningkatkan permintaan barang dan jasa. Permintaan yang lebih besar ini akan mengarah pada peningkatan output dan harga. Seberapa jauh permintaan yang lebih tinggi meningkatkan output dan harga, bergantung pada keadaan siklus bisnis. Apabila perekonomian berada dalam resesi, dengan kapasitas produktif dan pekerja yang menganggur, maka peningkatan permintaan akan menghasilkan lebih banyak output tanpa mengubah tingkat harga. Namun sebaliknya, apabila perekonomian berada pada kesempatan kerja penuh, kebijakan fiskal ekspansif akan lebih berpengaruh pada harga dan pengaruhnya lebih sedikit pada total output. (Spilimbergo, Antonio; Symansky, Steve; Blanchard, Olivier; Cottarelli, 2009)

Salah satu dampak dari kebijakan fiskal yang ekspansif adalah defisit yang meningkat. Banyak ahli ekonomi yang hanya mempermasalahkan efektivitas kebijakan fiskal ekspansif, dengan alasan bahwa pengeluaran pemerintah terlalu mudah menghalangi investasi oleh sektor swasta. Stimulus fiskal secara politis sulit untuk dibalik apakah memiliki efek terhadap ekonomi makro yang diinginkan atau tidak dimana masyarakat lebih menyukai pajak rendah dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena insentif politik yang dihadapi oleh pembuat kebijakan, maka cenderung ada bias yang konsisten untuk terlibat dalam pengeluaran defisit yang konstan yang sebagiannya dapat dirasionalisasi sebagai suatu hal yang baik untuk perekonomian. (Mountford, Andrew; Uhlig, 2008)

Kebijakan Fiskal Kontraktif

Dalam keadaan inflasi yang meningkat dan gejala ekspansif lainnya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang kontraktif, bahkan mungkin sampai menimbulkan resesi yang singkat untuk memulihkan keseimbangan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat dikatakan ketat atau kontraksi ketika pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran yaitu ketika anggaran pemerintah surplus dan longgar. Demikian pula sebaliknya kebijakan dapat dikatakan ekspansif yaitu ketika anggaran pemerintah defisit.

Secara historis, keunggulan kebijakan fiskal sebagai alat kebijakan telah mengalami peningkatan dan penurunan. Sebelum tahun 1930, pendekatan pemerintahan terbatas, atau *laissez-faire* yang berlaku. Dengan jatuhnya pasar saham dan *The Great Depression*, pembuat kebijakan mendorong pemerintah untuk memainkan peran yang lebih proaktif dalam perekonomian. Beberapa negara telah mengurangi fungsi pemerintah, namun ketika krisis keuangan global mengancam resesi di seluruh dunia, mereka akan kembali ke kebijakan fiskal yang lebih aktif. (Bernanke, 2013)

Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi rakyatnya. Salah satu dampak dari kebijakan fiskal adalah iklim industri yang meningkat, sehingga jumlah pengangguran akan berkurang karena banyak tersedia lapangan kerja. Dengan iklim industri yang positif dan berkembang, maka semakin banyak investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, hal ini akan menambah pendapatan negara dari sektor pajak. Pengambilan keputusan atas kebijakan fiskal ini harus melalui proses strategi yang cukup matang karena dampaknya akan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai sektor. Jika kebijakan yang dibuat tepat sasaran, maka permasalahan ekonomi dapat diselesaikan dengan baik.

4. Komponen Kebijakan Fiskal

Secara umum, kebijakan fiskal memiliki empat komponen utama yang membentuk kebijakan fiskal tersebut. Komponen tersebut terdiri dari kebijakan perpajakan, pengeluaran, investasi dan pengelolaan utang. (Afonso, Antonio & Sousa, 2012). Komponen yang pertama adalah kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang terbesar baik dari pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Tujuan penetapan kebijakan ini adalah menjaga pajak progresif. Menaikkan tarif pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga dapat berakibat pada penurunan produksi dan investasi. Sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan maka masyarakat memiliki kesempatan untuk membelanjakan uangnya untuk meningkatkan inflasi.

Komponen kebijakan fiskal yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal dilakukan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya, serta membayar kewajiban negara beserta bunganya. Anggaran pemerintah sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif, terutama penggunaan sebagai pelunasan terhadap pembiayaan defisit dalam mengatasi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara.

Kebijakan investasi dan divestasi merupakan komponen kebijakan fiskal yang ketiga. Investasi yang dilakukan harus optimal supaya pertumbuhan ekonomi berada dalam keseimbangan. Dalam skala yang lebih besar, arus modal internasional ekonomi domestik dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global.

Komponen kebijakan fiskal yang terakhir adalah pengelolaan surplus atau defisit. Apabila pendapatan yang

diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dibelanjakan, maka negara tersebut mengalami surplus. Namun, jika kondisi sebaliknya yang terjadi, maka negara tersebut mengalami defisit. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian dilakukan dengan melakukan pinjaman dari negara asing atau dengan melakukan pencetakan uang.

C. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter identik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral. Pada dasarnya kebijakan moneter adalah kebijakan di bidang ekonomi yang dibuat untuk mengatur tingkat pertumbuhan suplai uang di dalam perekonomian suatu negara. Kebijakan tersebut dilakukan secara sistematis dan terukur untuk mengatur variabel ekonomi makro, seperti inflasi ataupun pengangguran. Cara yang ditempuh antara lain dengan penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang beredar di pasaran, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. (Bordo, 2010)

1. Tujuan Kebijakan Moneter

Sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan moneter ini adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan menetapkan suku bunga. Kebijakan moneter tersebut terdiri dari langkah-langkah kebijakan untuk mengubah suplai uang atau mengubah suku bunga yang berlaku yang bertujuan untuk memengaruhi pengeluaran dalam perekonomian.

Sifat dari kebijakan moneter adalah dinamis karena menyesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Namun, pada umumnya di beberapa negara menetapkan empat prinsip, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran.

Di negara Indonesia, peran bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia yang didirikan berdasarkan UU No. 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 khususnya di pasal 7. Terdapat dua dimensi dalam kestabilan mata uang rupiah. Pertama, kestabilan nilai rupiah merupakan kestabilan harga-harga barang dan jasa yang terlihat dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan dimensi kedua berhubungan dengan kestabilan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Namun, peran stabilitas nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. (Warjiyo and Juhro, 2019)

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan *moneter Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dilihat sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang *diutamakan (overriding objective)*. Secara berkesinambungan, Bank Indonesia melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter yang menyesuaikan dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi untuk memperkuat efektivitasnya. (Indonesia, 2021)

2. Fungsi Kebijakan Moneter

Selain memiliki tujuan, kebijakan moneter juga mempunyai beberapa fungsi yang penting yaitu menjaga stabilitas harga, menurunkan laju inflasi, meningkatkan neraca pembayaran, menyeimbangkan nilai tukar mata uang, memelihara iklim investasi, dan menyediakan lapangan pekerjaan. (Amalia, 2019)

Fungsi kebijakan moneter yang pertama adalah menjaga stabilitas harga. Sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter mencakup permasalahan yang terkait di dalamnya, termasuk inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara signifikan dalam kurun waktu singkat. Oleh karena itu, peran

kebijakan moneter yang mampu menjaga kestabilan harga jual beli menjadi sangat diperlukan.

Fungsi kedua dari kebijakan ini yaitu menurunkan laju inflasi. Kebijakan moneter berperan untuk mengendalikan peredaran mata uang di pasaran. Jika terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat terlalu berlebih, maka kemungkinan besar akan terjadi inflasi. Dalam hal ini, pembuatan kebijakan keuangan akan membantu mengatasi hal tersebut.

Fungsi kebijakan moneter selanjutnya adalah meningkatkan neraca pembayaran. Transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri dicatat dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan statistik yang berisi ringkasan arus keluar dan masuknya produk selama kurun waktu periode tertentu.

Fungsi berikutnya dari kebijakan moneter yaitu menyeimbangkan nilai tukar mata uang. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda sehingga keberadaan alat ukur yaitu nilai tukar sangat dibutuhkan. Nilai tukar berhubungan erat dengan peraturan moneter karena ketika nilai tukar melemah, daya beli masyarakat pun akan ikut menurun. Selain itu, juga akan membuat suku bunga dan harga barang-barang impor meningkat naik secara drastis.

Fungsi kelima dari kebijakan moneter adalah memelihara iklim investasi. Pemilik modal akan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti tingkat suku bunga. Keberadaan kebijakan keuangan membuat suku bunga dapat dikontrol dengan baik.

Fungsi terakhir dari kebijakan moneter adalah menyediakan lapangan kerja. Bank sentral memiliki kewenangan untuk mengatur nilai suku bunga. Ketika lapangan pekerjaan semakin menipis, bank sentral akan meningkatkannya dengan cara menurunkan tingkat suku

bunga supaya mendorong kegiatan ekonomi di sektor ritel dan pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis atau memulai usaha baru.

3. Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen-instrumen yang biasa digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan moneter adalah kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dorongan moral. (Bernanke, 2020)

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka merupakan salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Hal ini dilakukan dengan cara menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.

Kebijakan Diskonto mempunyai makna bahwa pemerintah akan menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), maka keputusan yang diambil adalah dengan menaikkan suku bunga, yang berarti akan merangsang keinginan orang untuk menabung.

Kebijakan Cadangan Kas merupakan kebijakan yang dilakukan bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya.

Kebijakan Kredit Ketat yaitu dengan kredit tetap diberikan bank umum yang mekanismenya benar-benar mempertimbangkan dan berdasarkan syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan ini, monitoring jumlah uang yang beredar akan dapat dilakukan dengan baik. Langkah ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.

Kebijakan Dorongan Moral adalah kebijakan yang dilakukan bank sentral untuk memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan surat edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato, dan surat edaran dapat berupa himbauan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau pun melepaskan pinjaman.

4. Kerangka Kebijakan Moneter

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF merupakan suatu kerangka kerja dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. ITF diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. (Indonesia, 2021)

Tujuan reformulasi kebijakan moneter yang utama adalah memperkuat sinyal arah kebijakan moneter, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan.

Penerapan reformulasi kebijakan moneter memegang empat prinsip. Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan Flexible ITF. Kedua, reformulasi tidak bertujuan untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga

kebijakan tercermin di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia. Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan. (Warjiyo, 2017)

Implementasi Flexible ITF juga didukung oleh kebijakan pengelolaan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia dalam rangka mengelola stabilitas nilai tukar Rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing, melalui strategi triple intervention.

Implementasi Flexible ITF juga didukung oleh kebijakan manajemen nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengelola stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya, dengan tetap mendorong bekerjanya mekanisme pasar. Kebijakan nilai tukar tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang muncul dari ketidakseimbangan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas) melalui intervensi jual di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) atau pasar berjangka valas serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Strategi ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sekaligus menjaga kecukupan likuiditas rupiah. (Warjiyo, 2017)

Kebijakan pemerintah terutama diarahkan untuk menjaga affordability harga, ketersediaan suplai, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif untuk stabilisasi harga pangan untuk mendukung pengendalian inflasi. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi (TPI) baik di pusat maupun daerah. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah juga dilakukan

dalam rangka memperkuat stabilitas sistem keuangan. Melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menetapkan langkah koordinasi dan memberikan rekomendasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan. (Indonesia, 2021)

D. Daftar Pustaka

- Afonso, Antonio & Sousa, R. M. (2012) 'The macroeconomic effects of fiscal policy', *Applied Economics*, 44, pp. 4439–4454.
- Amalia, D. (2019) Pengertian, Tujuan dan Instrumen Kebijakan Moneter, *Jurnal.id*. Available at: <https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-tujuan-dan-instrumen-kebijakan-moneter/> (Accessed: 12 February 2021).
- Bank, W. (2017) *The Distributional Impact of Taxes and Transfers*. Edited by N. Inchauste, Gabriela; Lustig. New York: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Berger, H., De Haan, J. and Eijffinger, S. C. W. (2001) 'Central bank independence: an update of theory and evidence', *Journal of Economic surveys*, 15(1), pp. 3–40.
- Bernanke, B. S. (2013) *The Federal Reserve and the financial crisis*. Princeton University Press.
- Bernanke, B. S. (2020) 'The New Tools of Monetary Policy', *American Economic Review*, 110(4), pp. 943–983.
- Blinder, A. S. (2010) 'How central should the central bank be?', *Journal of Economic Literature*, 48(1), pp. 123–133.
- Bordo, M. D. (2010) 'Monetary policy, history of', in *Monetary Economics*. Springer, pp. 205–215.
- Broz, J. L. (2018) *The international origins of the Federal Reserve System*. Cornell University Press.

- Cimadomo, J. (2008) Fiscal policy in real time.
- Crowe, C. and Meade, E. E. (2007) 'The evolution of central bank governance around the world', *Journal of Economic Perspectives*, 21(4), pp. 69-90.
- Flandreau, M. (1997) 'Central bank cooperation in historical perspective: a sceptical view', *Economic History Review*, pp. 735-763.
- De Haan, J. and Eijffinger, S. C. W. (2016) 'The politics of central bank independence'.
- Hetzel, R. L. (2008) *The monetary policy of the federal reserve: a history*. Cambridge University Press.
- Indonesia, B. (2021) Tujuan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia. Available at: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/default.aspx#floating-3> (Accessed: 12 February 2021).
- Livingston, J. (2018) *Origins of the Federal Reserve System*. Cornell University Press.
- Mountford, Andrew; Uhlig, H. (2008) WHAT ARE THE EFFECTS OF FISCAL POLICY SHOCKS?
- Parker, J. A. (2011) ON MEASURING THE EFFECTS OF FISCAL POLICY IN RECESSIONS.
- Reis, R. (2013) 'Central bank design', *Journal of Economic Perspectives*, 27(4), pp. 17-44.
- Scheller, H. K. (2004) *The European Central Bank*. European Central Bank.
- Spilimbergo, Antonio; Symansky, Steve; Blanchard, Olivier; Cottarelli, C. (2009) 'Fiscal Policy For The Crisis', *CESifo Forum*, 10(2), pp. 26-32.
- Warjiyo, P. (2017) Kebijakan moneter di indonesia. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Warjiyo, P. and Juhro, S. M. (2019) *Central bank policy: Theory and practice*. Emerald Group Publishing.

Weill, D. N. (2020) Fiscal Policy, Econlib. Available at: <https://www.econlib.org/library/Enc/FiscalPolicy.html> (Accessed: 28 October 2020).

E. Tentang Penulis



Nur Arif Nugraha, S.S.T., S.E., M.P.P.M.

Lahir di Demak pada tanggal 16 Desember 1978. Dia menyelesaikan kuliah di Program Diploma III Pajak dan mendapatkan gelar Ahli Madya Perpajakan pada tahun 1999 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 9 September 1999. Setelah mengawali karir di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Oktober 1999, dia melanjutkan studi Program Diploma IV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan mendapat gelar Sarjana Sains Terapan pada 3 Februari 2006. Selepas lulus, kemudian diangkat menjadi Pemeriksa Pajak dan ditempatkan di Surakarta dan Temanggung. Pada tahun 2011, dia mendapatkan beasiswa S2 dari *Australia Development Scholarships (ADS)* sampai akhirnya mendapatkan gelar *Master of Public policy and Management di The University of Melbourne, Australia*. Setelah lulus, ditempatkan di Kantor Pusat DJP selama hampir 3 tahun. Setelah lulus seleksi penerimaan dosen di lingkungan Kementerian Keuangan, pada bbaulan November 2016, dia pindah dari DJP ke Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, akhirnya pada Desember 2017 diangkat menjadi Dosen Tetap di PKN STAN dan sampai sekarang ditempatkan di Jurusan Pajak pada program studi Diploma III Pajak.

BAB 3

EKONOMI PERTANIAN DAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA

Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.

A. Kebijakan Pembangunan Bidang Pertanian

1. Ekonomi Pertanian dan Perannya dalam Pembangunan Nasional

a. Produktivitas Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

Bidang pertanian masih menduduki peranan penting dan menjadi kegiatan ekonomi yang dominan di kebanyakan negara-negara sedang berkembang. Hal tersebut memberikan dampak yang cukup luas bagi corak kehidupan masyarakat di negara-negara tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah adalah dampak dari sifat atau corak kegiatan ekonomi bercorak pertanian itu. Hal yang substansial terletak pada sifat kegiatan maupun tingkat teknologi produksi pertanian di negara-negara sedang berkembang yang masih bersifat subsisten-tradisional.

Bidang pertanian di negara-negara maju mampu memberikan jaminan persediaan pangan per kapita yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan hasil dari tingkat usaha tani di negara maju sudah mencapai tingkat komersialisasi sangat tinggi. Pembangunan ekonomi pada negara maju yang sekaligus membawa transformasi struktur ekonomi menjadi berat ke arah industri dan jasa yang memberokan ciri pada kebijaksanaan

pengembangan sektor industri secara cepat. Fungsi pertanian adalah sebagai pengisi bahan pangan, bahan dasar industri yang murah, serta sebagai pen-supply tenaga kerja. Kebijakan pembangunan seperti itu nampaknya tidak memuaskan bagi negara-negara sedang berkembang, sebab memberikan dampak ketimpangan distribusi pendapatan, tumbuhnya problem-problem kemiskinan dan sebagainya (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi, 1986; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Peran Bidang Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk aspek ekonomi maupun non-ekonomis. Peranan pembangunan pertanian dalam pembangunan ekonomi adalah menjadi tulang punggung proses pembangunan ekonomi, menjadi pendukung bagi usaha rakyat dalam bidang teknologi budidaya dan pengelolaan, serta pelayanan pengolahan dan pemasaran hasilnya, maupun merupakan penunjang yang mampu mewartakan perkembangan kewiraswastaan para petani ke arah yang rasional (Soeratno; 1996).

Bidang pertanian mempunyai peranan yang cukup menonjol dalam pembentukan tabungan domestik lewat pendapatan pajak yang diterima pemerintah. Pendapatan nasional per kapita sering dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan, walaupun mempunyai beberapa kelemahan seperti pengabaian masalah distribusi pendapatan dan masalah-masalah non-ekonomis. Ukuran distribusi pendapatan adalah indeks gini yang besarnya antara 0 dan 1. Semakin besar (semakin mendekati 1) indeks gini berarti distribusi pendapatan semakin pincang, demikian sebaliknya (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi, 1986; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian

a. Kebijakan Perkreditan di Bidang Pertanian

Pada umumnya petani memiliki usaha pertanian, tingkat pendapatan yang rendah, jumlah anggota keluarga lebih dari 4 orang, serta mempunyai kesempatan berusaha di luar usaha taninya. Pada masa peralihan dari pertanian yang bersifat subsistem tradisional ke komersialisasi, kebutuhan akan dana kredit semakin mutlak diperlukan. Lembaga perkreditan bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu lembaga perkreditan formal (pemerintah) dan lembaga perkreditan informal (pelepas uang), tukang kredit barang dan sebagainya. Perkreditan di pedesaan melibatkan dua kelompok kepentingan yaitu: para petani di satu pihak sebagai debitur dan lembaga perkreditan di lain pihak sebagai kreditor.

Sumber kredit informal bersifat fleksibel, tanpa prosedur yang berbelit, saling mengenal dan berhubungan erat. Pinjaman tidak diawasi dengan ketat, petani bebas menggunakan kreditnya. Juga kreditor mengetahui betul kelayakan kredit si petani serta bersedia memberi pinjaman kapan, di mana dan berapa saja yang diminta petani. Dalam perkreditan formal para debitur adalah petani yang menggarap tanah sawah yang relatif luas. Golongan buruh tani sebagian besar kebutuhannya dilayani oleh perkreditan informal (Soeratno, 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Kebijakan Harga di Bidang Pertanian

1) Beberapa Prinsip Kebijakan Beras

Kebijakan harga pada bidang pertanian, baik menyangkut produk maupun sarana produksi yang dilakukan pemerintah adalah pengaturan dan penetapan kebijakan harga dasar dan harga tertinggi padi atau palawija, harga pupuk, dan lain-lain.

Kebijakan harga beras yang diajukan oleh Saleh Afiff dan Mears mengandung 5 prinsip sebagai berikut:

- a) Perlu ada harga dasar yang cukup merangsang produksi,
- b) perlu ada harga maksimum yang melindungi konsumen,
- c) perlu ada selisih yang memadai antara harga dasar dan harga maksimum untuk merangsang perdagangan oleh swasta
- d) perlu ada relasi antar daerah, perlu isolasi harga terhadap pasaran dunia dengan fluktuasi yang lebar, dan
- e) disarankan ada stok penyangga yang dikuasai pemerintah.

2) Sasaran Utama Bulog

Keppres No 11/1969 menyatakan bahwa sasaran utama Bulog adalah:

- a) mempertahankan harga minimum beras dan
- b) menjaga kestabilan harga beras agar tidak melampaui tingkat maksimum.

Rumus Tani adalah suatu pedoman perhitungan dalam membandingkan harga beras yang dijual oleh petani dengan harga pupuk yang dibeli (Soeratno, 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

c. Kebijakan Intensifikasi Pertanian

Intensifikasi pembangunan di sektor pertanian dilaksanakan dengan menetapkan sistem panca usaha yaitu perbaikan irigasi, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, pemberantasan hama dan penyakit, dan perbaikan cara bercocok tanam (teknologi). Oleh karena itu muncul istilah Inmas (intensifikasi massal), yang artinya intensifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama dengan Bimas, tetapi tanpa kredit.

Daerah Inmas mencakup daerah persawahan yang memenuhi semua syarat-syarat teknis Bimas (irigasi teknis atau setengah teknis) tetapi petaninya sudah cukup maju, sehingga tanpa kredit pemerintah pun mereka diharapkan melaksanakan penerapan panca usaha secara lengkap.

Pada masa Orde Baru, Organisasi Bimas adalah organisasi yang mengelola dan mengatur program Bimas dan Inmas. Organisasi ini bertugas mengkoordinir, mengintegrasikan, menyinkronkan dengan sebaik mungkin antara berbagai departemen dan instansinya dari atas sampai ke bawah. Organisasi Bimas bersifat sebagai organisasi pendobrak untuk mempercepat pengenalan teknologi baru yang dilandasi penggunaan bibit unggul dan pupuk. Program Bimas telah berhasil dalam meningkatkan produksi beras tetapi belum berhasil meningkatkan produksi pangan lainnya dengan baik, seperti jagung, kedede dan lain-lain (Soeratno, 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

3. Strategi Pembangunan di Bidang Pertanian

a. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Berikut ini dijelaskan tentang kerangka strategi pembangunan ekonomi pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga strategi pembangunan tersebut adalah:

- 1) peningkatan produksi sektor pertanian dan non pertanian yang berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja
- 2) penyempurnaan kelembagaan dan organisasi produksi, pelayanan dan pengaturan
- 3) serta peningkatan dan perbaikan konsumsi serta nilai gizi masyarakat (Soeratno; 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Sasaran Pembangunan Bidang Pertanian

Masalah kemiskinan merupakan persoalan sentral dalam pembahasan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Hal tersebut adalah hasil dari pengalaman masa lampau di mana strategi pembangunan yang hanya menitik beratkan kepada sasaran pembangunan dalam arti pertumbuhan yang cepat, ternyata membawa dampak adanya pelbagai kekecewaan. Sasaran akhir yang hendak dicapai dalam pembangunan pertanian ialah bagaimana mengangkat ke derajat yang lebih baik bagi anggota masyarakat tani dan pedesaan yang merupakan golongan terbesar dan termiskin dari masyarakat di negara-negara sedang berkembang itu. Secara operasional adalah, memindahkan atau merubah sistem pertanian dari yang bersifat subsistan-tradisional kepada corak pertanian yang komersial. Mengingat sifat-sifat khusus dalam kehidupan petani maupun konsekuensi dari corak pertanian semacam itu, maka dipandang bijaksana kalau kebijakan pertanian yang mendorong terjadinya transformasi itu tidak menimbulkan proses yang tergesa-gesa, serta perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah pertanian yang bersangkutan (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi, 1986; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

4. Pola dan Fase Pembangunan Pertanian

a. Pola Pembangunan Pertanian di Indonesia

- 1) Ciri khas pertanian tradisional:
 - a) pertanian adalah sebagai cara hidup (bagian dari hidup) bagi para petani.
 - b) sifat pertanian adalah subsistem (asal bisa hidup saja);
 - c) pemilikan/penguasaan lahan pertanian sangat sempit;
 - d) motif usaha bukan keuntungan (non profit motive);

- e) teknologi produksi masih sederhana.
- 2) Lima syarat mutlak pembangunan pertanian yaitu:
 - a) adanya pasar untuk hasil-hasil pertanian,
 - b) teknologi yang senantiasa berkembang
 - c) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal
 - d) adanya perangsang produksi bagi petani,
 - e) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.
- 3) Lima syarat pelancar pembangunan pertanian yaitu:
 - a) pendidikan pembangunan
 - b) kredit produksi
 - c) kegiatan gotong royong petani
 - d) perbaikan dan perluasan tanah pertanian, dan
 - e) perencanaan nasional pembangunan pertanian.
- 4) Pola pembangunan pertanian di Indonesia berasaskan pada pendekatan komoditi secara vertikal terpadu, yaitu dimulai dengan usaha:
 - a) pengembangan produksi,
 - b) penanganan teknologi pasca panen,
 - c) penyempurnaan kelembagaan pemasaran,
 - d) penyempurnaan pelayanan keuangan,
 - e) pemberlakuan kebijakan harga dari produsen dan pada tingkat konsumen (Soeratno; 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2012).

b. Fase-fase Pembangunan Sektor Pertanian

1) Investasi Pertanian Tradisional

Pertanian tradisional didirikan dengan penggunaan modal yang sangat sedikit, sedangkan tanah dan tenaga kerja manusia merupakan faktor produksi yang dominan.

2) Perbaikan Kondisi Masyarakat Pertanian

Kesuksesan dalam mentransformasikan pertanian tradisional menuju pertanian modern tidak hanya tergantung pada keterampilan dan kemampuan

para petani dalam meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga tergantung pada kondisi-kondisi sosial, komersial dan kelembagaan.

3) Diversifikasi Pertanian

Masa transisi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern didirikan dengan mulainya penganeekaragaman tanaman yang ditanam para petani.

4) Pengembangan Motivasi Keuntungan

Di dalam pertanian modern kegiatan produksi para petani berlandaskan pada profit motive (motif keuntungan).

5) Peningkatan Teknologi

Dalam pertanian modern, alat-alat yang digunakan bersifat padat modal dan dengan teknologi yang tinggi (Soeratno; 1996; Sunarno SastroAtmodjo, 2012).

B. Kebijakan Pembangunan Bidang Perindustrian Dan Perdagangan

1. Kebijakan Sektor Perindustrian

a. Tujuan Industrialisasi

Proses industrialisasi memiliki cakrawala pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih tinggi daripada hanya bertumpu pada sektor agraris. Menuju negara industri, memerlukan usaha pembangunan antar sektor secara terpadu sehingga tidak akan terjadi kemungkinan timbulnya ekonomi yang dualistis. Pembangunan di bidang industri akan membawa kemajuan tidak hanya di sektor industri itu sendiri, akan tetapi juga akan membawa kemajuan di sektor-sektor yang lain.

Peranan industrialisasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pada umumnya dapat dipantau antara lain

dengan mengetahui besarnya sumbangan sektor industri terhadap pencapaian PDB ataupun kesempatan kerja secara nasional. Dapat pula hal tersebut diketahui dengan menghitung peranannya terhadap perubahan nilai tambah ataupun perluasan kesempatan kerja yang ditimbulkannya (Tarmidi LT & W Usman, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

b. Kebijakan Industrialisasi

Kebijakan dalam industrialisasi berkaitan erat dengan adanya berbagai faktor pembatas dan alternatif pilihan yang merupakan trade-off dalam usaha mengembangkan industrialisasi. Untuk itu maka strategi kebijaksanaan industrialisasi pada masing-masing negara perlu disesuaikan dengan tujuan, keadaan, serta perkembangan kepentingan yang terdapat di kalangan masyarakat/negara masing-masing.

Banyak kebijakan antara lain di bidang perdagangan, fiskal moneter, dan perburuhan, dapat digunakan untuk mendorong, mengarahkan serta memberikan iklim yang menguntungkan bagi tumbuh dan berkembangnya industrialisasi sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian maka sikap menutup diri (autarkhi) serta berbagai kekhawatiran terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar dapat dihindarkan (Tarmidi LT & W Usman, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

c. Pengembangan Industri Pengganti Impor

- 1) Negara yang baru mulai melaksanakan insdustrialisasi biasanya memilih mendirikan industri substitusi impor sebab barang-barang yang akan dihasilkan sudah mempunyai pasar.
- 2) Tujuan memproduksi barang-barang substansi impor adalah untuk mencukupi kebutuhan sendiri supaya dapat menghemat devisa. Selanjutnya apabila hasil produksi melebihi kebutuhan dalam

negeri, sisanya dapat diekspor sehingga dapat menambah pendapatan devisa.

- 3) Dalam memasarkan barang-barang substitusi impor, negara berkembang menghadapi masalah yaitu tidak cukup kuat dalam bersaing dengan barang-barang impor baik dalam hal kualitas barang maupun dalam hal harga. Sehingga diperlukan perlindungan (proteksi) dari pemerintah dan apabila perlu diberi subsidi (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi, 1986; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

d. Kebijakan Tata Niaga Sektor Industri

Kebijakan tata niaga untuk pengembangan sektor industri adalah sebagai berikut:

1) Pola Umum Pengembangan Sektor Industri

Pada umumnya negara-negara yang berusaha meningkatkan pendapatan nasional lewat pembentukan nilai tambah di dalam negeri dan berusaha menciptakan lapangan kerja, menempuh jalan pembangunan dan pengembangan sektor industri.

2) Pengaturan Tata Niaga Sektor Industri

Suatu negara yang menganut sistem perekonomian terbuka mempunyai banyak peluang untuk mengembangkan pasar ekspor dan dengan demikian memiliki potensi untuk memanfaatkan skala ekonomis pada industri barang ekspornya. Kesalahan dalam memanfaatkan kebijaksanaan ekonomi terbuka itu bisa berakibat menurunnya surplus neraca pembayaran (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

e. Fasilitas Pelayanan Umum

Program pemerintah juga harus memberikan prioritas yang cukup dalam perluasan transportasi, komunikasi, tenaga listrik, air, prasarana-prasarana lain, seperti jalan-jalan kereta api, pelabuhan dan

telekomunikasi karena proyek-proyek swasta biasanya menunggu adanya fasilitas prasarana umum ini. Investasi dalam fasilitas prasarana umum (social overhead capital) merupakan dasar pertumbuhan perekonomian di mana investasi kapital semacam itu jarang dilakukan oleh sektor swasta.

2. Kebijakan Sektor Perdagangan

a. Pembangunan Sektor Perdagangan Luar Negeri

1) Dasar Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Seluruh negara di dunia ini mempunyai hubungan dagang dengan negara-negara lain. Keterbukaan ini membawa dampak yang positif tetapi juga segi-segi yang negatif. Hubungan internasional menjadi sangat rumit, bukan saja menyangkut banyaknya negara yang berintraksi dan perpindahan barang, tetapi juga perpindahan tenaga kerja dan modal, aspek keuangan internasional, perdagangan jasa serta penyebaran teknologi. Segi positif dari ekspor adalah dampaknya sebagai mesin pendorong pertumbuhan. Segi negatif dari keterbukaan hubungan internasional adalah memburuknya perekonomian dari beberapa negara sedang berkembang, sehingga memaksa negara-negara tersebut untuk meminta pinjaman dari negara-negara lain. Bagi negara-negara sedang berkembang, keterbukaan ini juga sering menimbulkan hubungan ketergantungan terhadap negara-negara maju. Dampak negatif juga timbul berupa demonstration effect, yaitu kebudayaan dan kebiasaan yang kurang baik yang banyak ditiru oleh orang-orang di negara sedang berkembang. Misalnya dansa barat. Pakaian barat, menghisap candu, menyemir rambut menjadi merah dan sebagainya (Tarmidi LT & W Usman, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

2) Dasar Kebijakan Perdagangan Internasional Murni

Kegiatan perdagangan terjadi karena orang melihat kemungkinan memperoleh keuntungan dari kegiatan ini dan juga karena dalam dunia yang modern, orang tidak dapat lagi memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Teori klasik yang masih sangat berpengaruh hingga saat ini, mencoba menerangkan sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional. Adam Smith terkenal dengan teorinya tentang keunggulan biaya mutlak, sedangkan David Ricardo tentang hukum keunggulan komparatif. Namun Ricardo tidak menjelaskan, mengapa sesuatu negara bisa memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara-negara lain dalam hal menghasilkan produk tertentu. Hal ini baru lama kemudian dijelaskan oleh Hackscher dan Ohlin dengan theorema mereka yang dikenal sebagai faktor proporsi atau *factor endowments theorem*.

Dapat disimpulkan secara fundamental dari teori-teori tersebut adalah: Perdagangan adalah menguntungkan bagi semua pihak dan dengan demikian meningkatkan kemakmuran bangsa-bangsa di dunia. Harga faktor-faktor produksi akan cenderung merata di seluruh dunia (*Factor price equalization theorem* dari Paul A. Samuelson). Karena itu adanya perdagangan dunia yang bebas tanpa hambatan merupakan syarat yang mutlak. Apabila semua bangsa mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang tertentu menurut hukum keunggulan komparatif, maka terdapatlah sistem pembagian kerja secara internasional (*international division of labor*).

Kekurangan dari teori-teori di atas adalah karena banyaknya asumsi, baik secara eksplisit maupun implisit, yang dipergunakan. Asumsi merupakan penyekatan dari keadaan nyata yang kita

hadapi sehari-hari. Sebab itu sering dipertanyakan, apakah teori-teori tadi masih berlaku. Banyak sarjana ekonomi yang telah melakukan tes secara empiris. Sebagian dari mereka membenarkan dan sebagian lagi meragukan, sehingga belum bisa dicapai kesimpulan yang pasti dan meyakinkan. Kesulitan untuk membuktikan teori ini terletak pada metode pembuktian yang umumnya terlalu makro, dan juga terlalu banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan yang tidak bisa dicakup semuanya. Selain faktor biaya yang menjadi tekanan utama dari teori-teori di atas, masih ada sederet faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Oleh karena itu teori-teori di atas hanya sebagian saja menerangkan gejala perdagangan internasional (Tarmidi LT & W Usman, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

3) Kebijakan Pemerintah

Untuk mendorong perkembangan ekonomi ialah dengan memberikan subsidi pada industri tertentu. Subsidi ini seperti halnya dengan proteksi, dapat memperendah harga penjualan dengan subsidi lebih mendorong produksi dan mobilitas tenaga kerja. Biasanya cara ini lebih berhasil dalam memperbaiki terms of trade (dasar tukar) di negara yang menjalankan tarif proteksi. Di samping itu tarif proteksi dapat menarik modal asing untuk diinvestasikan dinegara tersebut.

4) Bantuan Teknis

Bantuan teknis yaitu pengaturan atau pembentukan team internasional untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara belum maju dalam hubungannya dengan fasilitas untuk pendidikan di luar negeri bagi ahli-ahli dari negara tersebut, mengatur penyelenggaraan latihan-latihan bagi

teknisi-teknisi dan memberikan fasilitas untuk membantu pemerintah dengan menyediakan tenaga-tenaga ahli, perlengkapan-perengkapan dan mengorganisir jasa-jasa tersebut untuk pembangunan ekonomi negara belum maju.

5) Investasi Asing Swasta

Investasi jenis ini dapat berbentuk “investasi langsung” yaitu langsung mendirikan usaha disitu dan “investasi porto folio” yaitu membeli saham-saham perusahaan di negara sedang berkembang. Investasi luar negeri dengan teknik-teknik dan keahlian baru dapat ditiru oleh negara belum maju tersebut. Tetapi investasi luar negeri tidak banyak karena biasanya investasi tersebut terbatas pada proyek-proyek ekspor dan tidak untuk kepentingan negara belum maju. Oleh karena itu negara belum maju tak menyukainya. Kalau toh negara belum maju tetap menginginkan harus dapat mengadakan jaminan terhadap risiko hilangnya investasi tersebut.

6) Investasi Asing Pemerintah

Investasi jenis ini dapat digunakan sekehendak negara peminjam. Badan-badan internasional yang memberikan pinjaman untuk investasi ini misalnya IBRD, sekarang dikenal dengan Bank Dunia, tugasnya antara lain menjamin investasi asing swasta dan memobilisir investor-investor swasta.

b. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Untuk mengatasi masalah inflasi dan pengangguran yang dihadapi oleh Negara-negara berkembang dapat dilaksanakan dengan menggunakan kebijakan fiskal atau kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan fiskal maupun kebijaksanaan moneter yang biasa ditetapkan di Negara maju apabila akan diterapkan di Negara berkembang harus dilaksanakan

secara hati-hati dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang ada di Negara tersebut. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat dipergunakan untuk mempercepat proses pembangunan (Adenan Dj, I Subyanto, Ch Suparmi; 1986; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

1) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal yang bersifat efektif perlu dilaksanakan di negara sedang berkembang. Politik ini berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara, dan punya 3 pengaruh penting untuk perkembangan ekonomi yaitu: dapat mempengaruhi pendapatan, memajukan akumulasi kapital dan menahan inflasi ataupun deflasi. Kebijakan fiskal punya peranan penting dalam pembangunan ekonomi, tetapi berhasil atau tidaknya tergantung pada perbaikan sistem perpajakan dan pelaksanaannya masih sukar, karena kurang efisiennya metode pengumpulan pajak atau karena faktor lain, sehingga tak banyak diharapkan hasilnya.

2) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan ekonomi dengan mempengaruhi tersedianya kredit guna menanggulangi inflasi serta mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Bila perkembangan sudah mulai maka perlu kebijakan moneter yang efektif untuk memberikan kredit yang sejajar dengan perkembangan dalam perdagangan dan kegiatan-kegiatan produksi. Supaya pemerintah dapat menjalankan kebijakan moneter maka negara belum maju pertama-tama harus memperbaiki sistem keuangan dan perbankan yang dapat memberikan fasilitas kredit dan penyaluran tabungan ke sektor-sektor yang produktif.

3) Kebijakan Kewirausahaan

Memotivasi timbulnya semangat wiraswasta merupakan tantangan paling berat bagi pemerintah. Di samping mendorong tumbuhnya wiraswasta dalam negeri juga harus menarik wiraswasta dari luar negeri atau pemerintah sendiri bertindak aktif sebagai wiraswasta. Namun wiraswasta dari luar negeri biasanya tidak disukai, karena seolah-olah ada rasa kolonialisme atau pengaruh luar negeri.

Bila pemerintah bertindak sebagai wiraswasta hendaknya terbatas pada penyediaan fasilitas prasarana umum serta pemeliharannya, agar dengan demikian dapat mendorong wiraswasta sehingga proses perkembangan dapat ditopang sendiri. Pemerintah dalam hal ini harus berani membangun proyek-proyek yang dapat menarik usaha-usaha swasta. Pemerintah dapat secara tidak langsung mendorong timbulnya wiraswasta-wiraswasta misalnya dengan pembentukan fasilitas prasarana umum, jaminan hak milik, stabilitas ekonomi, pajak yang menguntungkan dan menyediakan bantuan kredit (Irawan & M Suparmoko, 1992; Sunarno SastroAtmodjo, 2021).

C. Daftar Pustaka

- Adenan Dj, I Subiyanto, Ch Suparmi (1986): *Ekonomi Pembangunan I*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Baskoro IN & NS Damajanti (1996); *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Ediyono SH dkk (2003); *Prinsip-prinsip Lingkungan Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. CV Idayus, LPKLP Usakti, Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta.
- Hamid ES, 2006; *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); Pengantar Ilmu Ekonomi, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Independent Commission on Population and Quality of Life, (1996); *Caring For The Future*, Osford University Press, Oxford. Diterjemahkan oleh Mohamad Soerjani, dengan judul: *Kepedulian Masa Depan*, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, 2000, Jakarta.
- Irawan & M Suparmoko (1992); *Ekonomika Pembangunan*. BPFE, Yogyakarta.
- Isalamy I (1994); *Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kartono H, S Rahardjo, I M Sundy (1989); *Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana*, Geo FMIPA Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kasnawi MT, S Hasan, S Nur (2000); *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Larasati E, Herniwati & Subardi (1986); *Kuangan Negara*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lipsey RG et all (1990); *Economics*, George Weidenfeld and Nicolson Ltd.
- Diterjemahkan oleh Jaka Wasana dan Kirbrandoko, dengan judul: *Pengantar Mikroekonomi*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Lipsey RG & PO Steiner (1984); *Economics*, Harper & Row Publisher Inc.
- Diterjemahkan oleh Anas Sidik, dengan judul: *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Lubis I & Abdullah (1988); *Pengawasan Pembangunan*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Malo M & Wawan Ruswanto (2009); *Sosiologi Ekonomi*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mansoer FW (2010); *Pengantar Ekonomi Mikro*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

- Myrdal G (1976); Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin, Yayasan Obor, Jakarta.
- Ndraha T (1986); Pembangunan Masyarakat, Depdikbud Universitas Terbuka, Jakarta.
- Rizal S dkk (1994); Perencanaan Pembangunan, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sajogyo P (1985); Sosiologi Pembangunan, FPS IKIP Jakarta & BKKBN, Jakarta.
- Samuelson PA, (?); Economics, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.
- Sanusi B (2004); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- SastroAtmodjo, S (2021); Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Media Sain Indonesia. Bandung.
- SastroAtmodjo, S (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri. Solok.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2012)(Editor); Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Kemandirian Pangan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. INSAN Cendekia Mandiri. Solok.

D. Tentang Penulis



Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.

Sri Juminawati kelahiran Jakarta, 25 September 1964. Dengan hobinya olahraga, musik dan *travelling*. Domisili penulis beralamatkan di Perum Griya Katulampa Blok C, III No. 21, Bogor. Penulis merupakan seorang

dosen di salah satu universitas di Jakarta.

Riwayat Pendidikan penulis dari bangku perkuliahan dimulai dari *Graduate Banking Academy* (D3) dari tahun 1986-1988, *Graduate Banking STIE Swadaya* (S1) dari tahun 1996-1998, *Magister Management Degree* (S2) *Laborora Graduate School of*

Management Jakarta dari tahun 1999-2001, dan *Completing Doctoral Dissertation (S3)* Syarif Hidayatullah *Islamic University* Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang.

Prestasi yang pernah diraih penulis diantaranya peraih *Reward Recognition IMP BRI* 2017, dan Pemenang *Racing BRITAMA* 2017 kategori AMPD.

BAB 4 | SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN DI INDONESIA

Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.

A. Sistem Keuangan

1. Pengertian

Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga, lembaga pemerintah yang merupakan peserta sekaligus memiliki wewenang mengatur operasi sistem keuangan tersebut.

Fungsi pokok sistem keuangan adalah mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus kepada peminjam atau unit deficit. Dana-dana tersebut dialokasikan melalui negosiasi dan perdagangan dalam pasar uang yang mempertemukan individu dan sektor usaha sebagai pemilik dana dengan pihak pemakai dana.

2. Fungsi Sistem Keuangan

Fungsi sistem keuangan dapat dijelaskan, antara lain berikut ini.

a. Menyediakan Mekanisme Sistem Pembayaran

Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme pembayaran dalam bentuk uang, rekening koran, dan alat transaksi lain.

b. Menyediakan Kredit

Sistem keuangan menyediakan pembiayaan untuk mendukung pembelian barang-barang, jasa-jasa dan untuk membiayai investasi modal.

c. Penciptaan Uang

Penciptaan uang dalam sistem keuangan dimungkinkan dilakukan melalui kredit dan mekanisme pembayaran. Uang yang dimaksud di sini adalah semua bentuk uang yang dapat digunakan sebagai alat pertukaran untuk membeli barang dan jasa.

d. Sarana Tabungan

Memberikan sarana penyimpanan dana dalam berbagai bentuk jenis simpanan.

3. Metode Transfer Dana Dalam Sistem Keuangan

a. Metode Pemindahan Dana

Metode pemindahan dana dari unit surplus ke *unit deficit* tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu sebagai berikut.

1) Metode Pembiayaan Langsung (*Direct Financing Method*)

Metode ini adalah suatu cara pemberian kredit di mana unit surplus atau *ultimate lenders* bertemu langsung dengan unit defisit atau *ultimate borrowers* tanpa melalui atau menggunakan jasa lembaga keuangan.

2) Metode Pembiayaan Semi Langsung (*Semidirect Financing Method*)

Dalam proses ini pemindahan atau pertukaran dana antara kedua belah pihak sangat bergantung pada intervensi dari pihak ketiga, yaitu *broker, dealer, investment banker* untuk menyelesaikan transaksi peminjaman dana.

3) Metode Pembiayaan Tidak Langsung (*Indirect Financing Method*)

Dalam metode ini baik peminjam maupun unit defisit maupun pemilik dana atau unit surplus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keuangannya melalui bantuan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*).

b. Beberapa Pertimbangan Penyimpanan Uang

Unit surplus yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, giro pada bank umum ini memiliki beberapa pertimbangan, antara lain berikut ini.

1) *Safety* atau *Default Risk*

Tingkat keamanan dalam arti dapat mengurangi kemungkinan tidak kembalinya uang investor akibat terjadi default.

2) *Liquidity*

Simpanan di bank pada prinsipnya dapat meningkatkan dan menjamin kemampuan likuiditas.

3) *Accessibility*

Penabung dapat menyimpan atau menabung dalam denominasi yang relative kecil.

4) *Convenience*

Banyaknya kemudahan dan keuntungan lain yang ditawarkan oleh lembaga intermediasi keuangan.

c. Jenis Sekuritas Bank

1) Sekuritas Primer

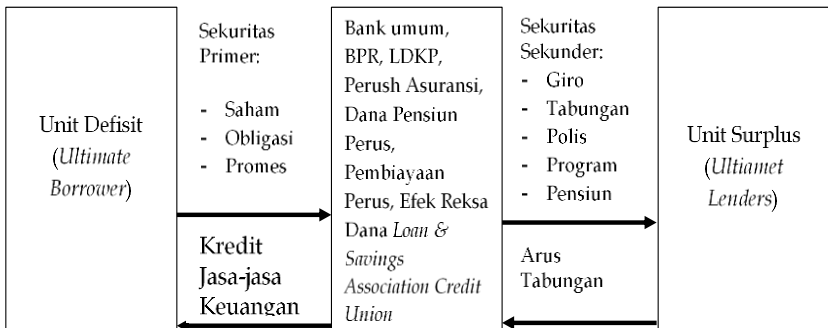
Sekuritas primer atau *primary securities* diterbitkan oleh peminjam yang kemudian dibeli oleh lembaga keuangan, misalnya dalam bentuk saham, obligasi, dan sekuritas lainnya.

2) Sekuritas Sekunder

Klaim finansial merupakan sekuritas sekunder yang dianggap dapat memenuhi pertimbangan-pertimbangan, seperti *safety*, *liquidity*, *accessibility*, dan *convenience*.

Sekuritas sekunder terdiri dari jenis-jenis instrument simpanan, misalnya deposito berjangka, giro, tabungan, sertifikat deposito, polis asuransi, dan program pension.

Hal ini menunjukkan bahwa sekuritas sekunder hanyalah merupakan sebagian proses keuangan.



Kebutuhan peminjam
 Kredit jangka panjang
 Risiko yang dapat diterima
 pemilik dana
 Jumlah kredit yang besar

Kebutuhan pemilik dana
 Likuiditas
 Keamanan
 Convenience
 Aksesibilitas

Gambar 1. Sekuritas Sekunder sebagai Proses Perantara Keuangan

4. Peran Lembaga Keuangan

Peran lembaga keuangan, antara lain berikut ini.

a. Pengalihan Aset (*Assets Transmutation*)

Pengalihan aset dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur

sesuai dengan kebutuhan peminjam. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut dananya diperoleh dengan menerima dana dari penabung yang jangka waktunya diatur menurut kebutuhan penabung.

b. *Liquidity*

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Sekuritas sekunder, seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat likuiditas yang tinggi, keamanan di samping tambahan pendapatan.

c. *Realokasi Pendapatan (Income Reallocation)*

Untuk menghadapi masa-masa pensiun di mana pendapatan menjadi berkurang maka masyarakat dapat menyetor atau merealokasikan dananya untuk persiapan yang akan datang. Alternatif pertama, dengan cara membeli atau menyimpan barang, misalnya tanah, rumah, alternatif kedua, yaitu memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pension, polis asuransi yang jauh lebih baik disbanding dengan alternatif pertama.

d. *Transaksi*

Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito merupakan bagian dari sistem pembayaran. Giro atau tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai uang. Produk-produk tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah melakukan pertukaran barang atau jasa.

e. *Menjadi bagian mekanisme pembayaran antarpelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang dilakukan (transmission role), misalnya berikut ini.*

- 1) Lembaga keuangan (dalam hal ini bank sentral) mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dimaksudkan untuk mempermudah transaksi di antara masyarakat dan dalam perekonomian makro.
 - 2) Lembaga keuangan (dalam hal ini bank umum) menerbitkan cek dimaksudkan untuk mempermudah transaksi yang dilakukan nasabah.
- f. Pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana (*intermediation role*). Misalnya, berikut ini.
- 1) Lembaga keuangan dapat sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktiva yang berperan untuk meningkatkan efisiensi di antara kedua pihak.
 - 2) Lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam yang tidak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi dan biaya informasi yang relatif lebih rendah dibandingkan apabila melakukan transaksi langsung.

g. Mengurangi Kemungkinan Risiko yang Ditanggung Pemilik Dana atau Penabung

Risiko yang ditanggung pemilik dana atau penabung adalah apabila pemilik dana menyimpan uangnya di rumah maka pemilik dana akan menanggung ongkos memegang uang tunai atau *opportunity cost of holding money*. Apabila pemilik dana sudah menyimpan uangnya di lembaga keuangan, risiko untuk tidak dibayarkan kembali uang simpanan nasabah akan berkurang dengan strategi lembaga keuangan dalam melakukan diversifikasi penyaluran dana nasabah.

5. Faktor-Faktor Peningkatan Peran Lembaga Keuangan

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya peran lembaga keuangan adalah sebagai berikut.

a. Besarnya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kelas Menengah

Peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh keluarga atau individu terutama di kalangan kelas menengah menyebabkan naiknya kemampuan untuk menabung setiap tahun.

b. Pesatnya Perkembangan Industri dan Teknologi

Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal ataupun dana oleh sector industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dari para penabung.

c. Besarnya Demonisasi Instrument Keuangan Menyebabkan Sulitnya Penabung Kecil Memperoleh Akses

Beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat dominasinya yang sedemikian besar.

d. Skala Ekonomi Dan Ruang Lingkup dalam Produksi dan Distribusi Jasa Keuangan

Dengan mengkombinasi sumber-sumber untuk memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar maka biaya jasa per unit dapat ditekan lebih rendah.

e. Lembaga Keuangan Menjual Jasa-Jasa Likuiditas yang Unik, Mengurangi Biaya Likuiditas Bagi Nasabahnya

Ketidakpastian arus kas unit usaha dan individu akan mengancam bila keadaan keuangan perusahaan tidak dalam keadaan likuid pada saat dibutuhkan yang menyebabkan kemungkinan akan timbul beban biaya.

f. Keuntungan yang Bersifat Jangka Panjang

Keuntungan antara biaya dana lembaga keuangan dengan tingkat bunga pinjamannya cenderung akan tetap stabil karena biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersama-sama, naik atau turun.

g. Risiko yang Lebih Kecil

Pengawasan dan peraturan pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan risiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dari jenis investasi lain.

6. Proses Penciptaan Uang oleh Bank Umum

Proses penciptaan uang oleh pihak bank umum dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut.

- a. Ketentuan cadangan likuiditas wajib (*reserve requirement*) 2%.
- b. Semua loanable funds disalurkan dalam bentuk kredit.
- c. Setiap transaksi menggunakan cek.
- d. Semua simpanan dilakukan dalam bentuk giro pada bank yang bersangkutan.
- e. Simpanan giro pertama sebesar Rp. 1.000.000,00 dan simpanan pada Bank Umum A.

B. Perbankan di Indonesia

1. Pengertian dan Kegiatan Bank

Bank secara sederhana dapat diartikan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama, yaitu sebagai berikut.

a. Menghimpun Dana

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

b. Menyalurkan Dana

Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan pada prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana dikenal dengan istilah Lending.

c. Memberikan Jasa Bank Lainnya

Pengertian jasa bank lainnya adalah, merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa perbankan lainnya, antara lain berikut ini.

- 1) Jasa setoran.
- 2) Jasa pembayaran.
- 3) Jasa pengiriman uang (transfer).
- 4) Jasa penagihan (inkaso).
- 5) Jasa kliring (clearing).
- 6) Jasa penjualan mata uang asing (valas).
- 7) Jasa penyimpanan dokumen (safe deposit box).
- 8) Jasa cek wisata (traveler cheque).
- 9) Jasa kartu kredit (bank card).
- 10) Jasa Letter of Credit (L/C).
- 11) Jasa bank garansi.

d. Memperoleh Keuntungan Bank (Syariah)

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, keuntungan bukan diperoleh dari bunga, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4) Pembiayaan barang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. Sejarah Perbankan di Indonesia

a. Beberapa Bank Zaman Awal Kemerdekaan,

Beberapa bank yang ada di zaman awal kemerdekaan, antara lain berikut ini.

- 1) Bank Surakarta MAI (Maskapai Adil Makmur) tahun 1945 di Solo.
- 2) Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946.
- 3) Bank Negara Indonesia yang didirikan tanggal 5 Juli 1946, kemudian menjadi BNI 46.
- 4) Bank Dagang Nasional Indonesia tahun 1946 di Medan.
- 5) NV Bank Sulawesi di Manado tahun 1946.
- 6) Bank Indonesia di Palembang tahun 1946.
- 7) Indonesian Banking Corporation tahun 1947 di Yogyakarta, kemudian menjadi Bank Amerta.
- 8) Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin tahun 1946.
- 9) Bank Timur NV di Semarang, kemudian merger dengan Bank Centra Asia (BCA) tahun 1949.
- 10) Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950, kemudian merger dengan Bank Pasifik.

b. Perkembangan Bank Pemerintah

Berikut ini diuraikan sejarah singkat perkembangan bank-bank milik pemerintah di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1) Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46)

Bank ini menjalankan fungsi BNI unit III dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 1968 dan berubah menjadi Bank Negara Indonesia 1946.

2) Bank Tabungan Negara (BTN)

BTN berasal dari De Post Paor Bank, kemudian menjadi Bank Tabungan Pos tahun 1950. Selanjutnya menjadi Bank Negara Indonesia Unit V dan terakhir menjadi Bank Tabungan Negara dengan UU No. 20 Tahun 1968.

3) Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968, kemudian ditegaskan lagi dengan UU No. 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank yang dinasionalisasi tahun 1951.

4) Bank Dagang Negara (BDN)

BDN berasal dari Excampio Bank yang dinasionalisasi dengan PP No. 13 Tahun 1960, namun PP ini dicabut dan diganti dengan UU No. 18 Tahun 1968 menjadi Bank Dagang Negara. BDN merupakan satu-satunya bank pemerintah yang berada di luar Bank Negara Indonesia.

5) Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

BAPINDO didirikan dengan UU No. 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara (BIN) tahun 1951.

6) Bank Bumi Daya (BBD)

BBD semula berasal dari *Nederlandsch Indische Handels Bank* kemudian menjadi *Nationale Handels Bank*, selanjutnya bank ini menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV dan berdasarkan UU No. 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumi Daya.

7) Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank ini berasal dari *De Algemeenevolk Crediet Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang membidangi rural area. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 1968 menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).

8) Bank Ekspor Impor (Bank Eksim)

Sama seperti halnya BRI, berasal dari *De Algemeenevolk Credit Bank*, kemudian dilebur setelah menjadi bank tunggal dengan nama Bank Nasional Indonesia (BNI) Unit II yang bergerak dalam bidang eksim. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1968 dipisahkan menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia.

9) Bank Pembangunan Daerah (BPD)

Bank ini didirikan di daerah-daerah tingkat I. Dasar hukum pendiriannya adalah UU No. 13 Tahun 1962.

10) Bank Mandiri

Bank ini merupakan hasil merger antara BBD, BDN, BAPINDO, dan Bank Eksim. Hasil merger ini dilaksanakan pada tahun 1999 akibat bank-bank tersebut terus-menerus dilanda kerugian.

3. Jenis-Jenis Bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini diatur dalam UU Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 terdapat beberapa perbedaan jenis bank. Perbedaan ini dilihat jenis

kegiatan usaha, bentuk badan hukum, pendirian dan kepemilikan, serta target pasar.

a. Pengelompokan Bank Menurut Kegiatan Usaha

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah sebagai berikut.

- a) Kegiatan penghimpunan dana dapat diperoleh dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dapat disamakan dengan itu.
- b) Kegiatan penyaluran dana dapat dilakukan dengan pemberian kredit, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia, penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

b. Pengelompokan Bank Menurut Bentuk Badan Usaha

Jenis bentuk badan hukum bank umum dapat berupa:

- 1) Perseroan terbatas,
- 2) Koperasi, atau
- 3) Perusahaan daerah.

c. Jenis Bentuk Badan Hukum BPR Dapat Berupa:

- 1) Perusahaan daerah,
- 2) Koperasi,
- 3) Perseroan terbatas, atau

- 4) Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

d. Pengelompokan Bank Menurut Pendirian dan kepemilikannya

Bank umum hanya dapat didirikan oleh berikut ini.

- 1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
- 2) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

e. BPR Hanya Dapat Didirikan dan Dimiliki oleh:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau
- 3) Bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, dan pemerintah daerah.

f. Pengelompokan Bank Menurut Target Pasarnya

Menurut target pasarnya, suatu bank dapat digolongkan menjadi berikut ini.

1) Retail Bank

Retail bank memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah ritel, yaitu nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.

2) Retail Corporate Bank

Retail corporate bank memfokuskan pelayanan dan transaksi tidak hanya kepada nasabah ritel, tetapi juga kepada nasabah korporasi.

4. Metode dan Prinsip Bank

a. Metode Bank

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, menggunakan 2 metode, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk simpanan, seperti giro, tabungan ataupun deposito.
- 2) Fee based, yaitu menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu, seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa iuran dan biaya lainnya.

b. Prinsip Bank (Syariah)

Bank yang berdasarkan prinsip syariah, dengan cara berikut ini.

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

C. Daftar Pustaka

- Brigham, Eugene F. & Houston (2003); *Fundamental of Financial Mangement*. Harcourt.
- Hamid ES, 2006; *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Penerbit Karunika
- Kasmir. (2000); *Manejemen Perbankan*. Raja Garfindo.
- Larasati E, Herniwati & Subardi (1986); *Kuangan Negara*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Munawir, Slamet. (2002); *Analisis Investasi Keuangan*. Liberty.

- Partina, Ana. & Aini Rahmawati, 2007; Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta.
- Siamat, Dahlan. (2001); Manajemen Lembaga Keuangan. LPFE UI. Jakarta.
- Sovi N (1997); Sistem Ekonomi Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Media Sains Indonesia, Bandung.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Teori Mikroekonomi. Pustaka Learning Center, Malang.
- SastroAtmodjo, S (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Penerbit Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Studi Kelayakan Proyek & Bisnis. Pustaka Learning Center, Malang.
- Tambunan TTH, 2009; Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Taswan (2005); Manajemen Perbankan (Konsep, Teknis, Aplikasi). UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

D. Tentang Penulis



Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT..

Sri Juminawati kelahiran Jakarta, 25 September 1964. Dengan hobinya olahraga, musik dan *travelling*. Domisili penulis beralamatkan di Perum Griya Katulampa Blok C, III No. 21, Bogor. Penulis merupakan seorang

dosen di salah satu universitas di Jakarta.

Riwayat Pendidikan penulis dari bangku perkuliahan dimulai dari *Graduate Banking Academy* (D3) dari tahun 1986-1988, *Graduate Banking* STIE Swadaya (S1) dari tahun 1996-1998, *Magister Management Degree* (S2) *Laborora Graduate School of*

Management Jakarta dari tahun 1999-2001, dan *Completing Doctoral Dissertation (S3)* Syarif Hidayatullah *Islamic University* Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang.

Prestasi yang pernah diraih penulis diantaranya peraih *Reward Recognition IMP BRI* 2017, dan Pemenang *Racing BRITAMA* 2017 kategori AMPD.

BAB 5 | KEUANGAN NEGARA DAN APBN RI

Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT.

A. Konsep Dasar dan Sistem Keuangan Negara

1. Konsep Dasar Keuangan Negara

APBN diartikan sebagai daftar rinci mengenai penerimaan dan pengeluaran suatu negara selama periode satu tahun. Untuk membiayai pencapaian tujuan nasional, pemerintah yang memperoleh amanat dari rakyat, menggali sumber-sumber penerimaan seperti halnya pajak, penggalan sumber daya alam, dan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah juga menggunakan sumber penerimaan dari luar negeri seperti utang dan hibah. Dipandu adanya tujuan nasional, pemerintah menentukan macam-macam pengeluaran (belanja) negara seperti gaji pegawai, subsidi (pendidikan, kesehatan, dan BBM), membiayai program pembangunan, belanja daerah, termasuk untuk membayar utang dalam dan luar negeri.

2. Sistem Keuangan Negara

Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan

oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, yaitu pasar uang dan pasar modal.

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan perbankan dapat menerima simpanan dari masyarakat, maka juga disebut *depository financial institutions* yang terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Sistem keuangan pada setiap negara tidak bisa berjalan dengan semestinya karena sangat bergantung pada stabilitas sistem itu sendiri. Stabilitas sistem keuangan yang baik tentu saja alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan stabilitas sebuah negara. Stabil atau tidaknya sistem keuangan di dalam sebuah negara tidak bisa dilihat dari faktor-faktor yang menjadi penyebab instabilitas sektor keuangan. Salah satunya adalah kegagalan pasar yang disebabkan oleh faktor struktural maupun perilaku. Kegagalan pasar itu sendiri dapat bersumber dari eksternal (internasional) dan internal (domestik).

Agar supaya perekonomian negara bisa memiliki fondasi yang sangat kokoh, sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi maupun evaluasi sistem keuangan secara berkesinambungan. Dengan begitu, negara bisa meminimalisir bahkan mencegah resiko yang sangat membahayakan sistem keuangan. Jika tidak dilakukan identifikasi dan evaluasi, potensi keuangan negara bisa saja memiliki risiko yang meluas dan berdampak pada sistem keuangan negara itu sendiri, bahkan bisa melumpuhkan perekonomian negara. Sistem keuangan yang buruk juga

menjadi penyebab timbulnya instabilitas keuangan yang bisa berdampak buruk untuk perekonomian negara. Tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi saja, bahkan bisa berujung pada terjadinya **krisis** ekonomi yang bisa menghancurkan ekonomi negara yang sudah dibangun sejak lama.

B. Pengertian dan Lingkup Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Segala aspek negara termasuk hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang atau segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dinyatakan milik negara dikenal dengan keuangan negara. Dalam rangka perwujudan tujuan tersebut maka keuangan negara Republik Indonesia diatur oleh Undang-Undang. Saat belum ada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

a. Menurut Undang-Undang RI No.17 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara diartikan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.

b. Ditinjau dari Sudut Subyek, Obyek, Proses dan Tujuan

Keuangan Negara juga dapat ditinjau dari beberapa sudut, yaitu dari sudut objek, subyek, proses, dan tujuannya.

1) Ditinjau dari Sudut Subyek

Dari sudut subyeknya, Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana sebelumnya tersebut yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/ Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

2) Ditinjau dari Sudut Obyek

Dari sudut objeknya, yang dimaksud dengan Keuangan Negara mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

3) Ditinjau dari Sudut Proses

Dari sudut prosesnya, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana sebelumnya tersebut mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

4) Ditinjau dari Sudut Tujuannya

Dari sudut tujuannya, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana sebelumnya tersebut dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Negara

a. Penerimaan Keuangan Negara

1) Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan keuangan negara berasal dari dalam dan luar negeri, untuk dalam negeri yaitu:

- a) Keuntungan dari perusahaan-perusahaan; (BUMN, Perusahaan-perusahaan baik PMA maupun PMDN)
- b) Pajak;
- c) Menciptakan uang baru;
- d) Meminjam pada bank;
- e) Pinjaman kepada masyarakat;
- f) Denda-denda;
- g) Cukai;
- h) Retribusi.

2) Penerimaan Luar Negeri

Sedangkan yang berasal dari luar negeri yaitu:

- a) Pinjaman-pinjaman baik pinjaman kepada negara maupun pinjaman kepada organisasi-organisasi negara
- b) Hadiah-hadiah dari rampasan perang

b. Bidang dan Asas Pengelolaan Keuangan Negara

1) Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bidang pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi 3 area, yaitu bidang pengelolaan fiscal, bidang pengelolaan moneter, dan bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

2) Asas Pengelolaan Keuangan Negara

- a) Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara

Dalam pelaksanaannya, keuangan negara dikelola berdasarkan asas-asas umum berikut:

- (1) Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, karena pada dasarnya setiap sen uang negara adalah uang rakyat, dan akuntabilitas ini harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Profesionalitas, yang artinya mengutamakan keahlian dan kompetensi yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- (4) Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (5) Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yang dalam praktiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

b) Asas-asas khusus pengelolaan keuangan negara

Di samping lima asas tersebut di atas, untuk mendukung terwujudnya *Good Governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara juga didasarkan pada asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialisasi. Penjelasan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Asas Tahunan, memberikan persyaratan yaitu anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislative (DPR).
- (2) Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- (3) Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, artinya semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karenanya, anggaran adalah anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- (4) Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/ tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif; jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif; penggunaan anggaran hanya diperuntukkan jenis/ macam anggaran yang telah ditentukan.

Dalam menghadapi dinamika perekonomian negara, khususnya terhadap ancaman yang ada maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Isi dari Perppu ini telah memenuhi syarat Produk Hukum sehingga diputuskan untuk

menjadi Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Kebijakan dan Pengertian Anggaran Belanja Negara

a. Kebijakan Anggaran

Kebijakan anggaran yang berpijak pada pencapaian tujuan nasional perlu diterapkan dengan penuh kesadaran, komitmen, dan tanggung jawab. Perlu kebijakan untuk menaikkan anggaran pendidikan, kesehatan, pemberdayaan penduduk miskin, modal bagi ekonomi rakyat, pertahanan dan keamanan, dan bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak lainnya. Pertumbuhan ekonomi hanya akan bermakna jika ditopang oleh kebijakan anggaran yang berorientasi rakyat banyak tersebut. Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya kemandirian anggaran tidak akan berkelanjutan.

b. Pengertian Anggaran Belanja Negara

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang, sedangkan anggaran negara berarti rencana keuangan yang disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pada dasarnya, APBN mengandung

perkiraan jumlah pendapatan, perkiraan jumlah belanja dan perkiraan pembiayaan.

Secara singkat, APBN terbagi menjadi 2 bagian kelompok besar, yaitu anggaran pendapatan negara dan anggaran belanja negara. Anggaran pendapatan negara merupakan sasaran penerimaan negara yang diharapkan dapat dihimpun dalam tahun anggaran bersangkutan, yaitu meliputi berbagai jenis pendapatan dalam negeri, serta pendapatan negara yang bersumber dari bantuan luar negeri.

Sedangkan anggaran belanja negara, selain dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran rutin guna mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dituangkan ke dalam berbagai jenis program dan kegiatan serta pemenuhan berbagai kewajiban pemerintah, juga dipergunakan untuk belanja pembangunan yang dituangkan dalam berbagai jenis program dan proyek pembangunan pada berbagai sektor dan subsektor.

2. Siklus Pengelolaan APBN

Rencana keuangan negara ditetapkan setiap tahun yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab demi kemakmuran rakyat. APBN juga sebagai alat pengontrol kegiatan pemerintah sehingga pemerintah memiliki acuan yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan negara dalam waktu tersebut. Siklus pengelolaan APBN secara keseluruhan dilakukan melalui:

- a. Perencanaan APBN
- b. Penyusunan APBN
- c. Pembahasan APBN
- d. Penetapan APBN
- e. Pelaksanaan APBN
- f. Pelaporan dan Pencatatan APBN
- g. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN

3. Fungsi APBN

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi berdasarkan Pasal 3 ayat 4 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Adapun penjelasan fungsi APBN yaitu:

a. Fungsi Otorisasi;

Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Anggaran publik merupakan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara atau daerah untuk satu periode di masa yang akan datang, tetapi sebelum dijalankan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat. Selanjutnya anggaran publik yang dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif dan ditetapkan dengan undang-undang (lihat kembali pengertian APBN ditetapkan dengan undang-undang) yang isinya bagaimana mengalokasikan dan menarik uang dari rakyat, maka harus dilihat sebagai sebuah hubungan kekuasaan (*power relation*) antara eksekutif, legislatif dan rakyat sendiri.

b. Fungsi Perencanaan;

Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar. Esensi perencanaan sebagai acuan penyusunan APBN diperjelas dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga tahun berikutnya. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah;
- 2) Penganggaran Terpadu;
- 3) Penganggaran berbasis kinerja.

c. Fungsi Pengawasan;

Fungsi pengawasan, dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka akan terlihat apakah pemerintah menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan dalam UU APBN atau tidak. Dalam prakteknya fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK. BPK menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR. Disamping itu,

pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh inspektorat jenderal/inspektorat utama pada masing-masing departemen/Lembaga dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada semua departemen/lembaga (termasuk BUMN). Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal tersebut diatas bersifat post audit.

d. Fungsi Alokasi;

Fungsi alokasi mempunyai arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Melalui fungsi alokasi, maka APBN terutama sisi pengeluaran ditujukan untuk sektor-sektor pembangunan. Fungsi alokasi tidak hanya ditujukan untuk masalah pengangguran saja tetapi juga akan disesuaikan dengan tujuan-tujuannya atau “sesuai dengan apa yang seharusnya”. Sebagai contohnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur harus mendapatkan prioritas utama. Atau untuk meningkatkan sumberdaya manusia, maka alokasi anggaran untuk pengembangan sumberdaya manusia harus cukup dominan. h.

e. Fungsi Distribusi;

Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Melalui fungsi distribusi, komponen pengeluaran dalam anggaran mempunyai dimensi pemerataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengeluaran untuk membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan, bendungan, dan lain-lain, akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Atau, pembukaan daerah terisolasi akan cenderung menguatkan terms of trade kelompok masyarakat

terpencil. Manfaat marjinal tindakan ini yang terbesar biasanya akan dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dibandingkan mereka yang berpenghasilan tinggi.

Fungsi distribusi juga dapat menunjukkan bahwa APBN merupakan produk kebijakan pemerintah yang bersifat politis. Adanya pengeluaran untuk subsidi adalah salah satu contohnya. Walaupun secara teori subsidi baik BBM maupun non BBM merupakan distorsi di dalam perekonomian, namun pemerintah tetap menganggarkannya di dalam APBN. Hal tersebut diyakini tidak hanya sebagai upaya untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dalam mempertahankan tingkat konsumsinya namun juga untuk meredam terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya fungsi tersebut menjadi bagian dari penyusunan APBN. Fungsi ini juga menjadi bagian dari politik anggaran.

f. Fungsi Stabilisasi;

Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan agregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat.

Dari fungsi stabilisasi tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. APBN juga dapat

mengurangi dampak inflasioner dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri. Dengan demikian dalam penetapan APBN, mengacu kepada UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004, Bank Indonesia memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai RAPBN (Pasal 54 Ayat 2).

4. Prinsip dan Asas Penyusunan APBN

a. Prinsip Penyusunan APBN

1) Berdasarkan Aspek Pendapatan

Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN didapat tiga prinsip, yaitu: Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, dan penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

2) Berdasarkan Aspek Pengeluaran

Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah:

- a) Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.
- b) Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan.
- c) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

b. Asas Penyusunan APBN

Adapun asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas-asas:

- 1) Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.

- 2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- 3) Penajaman prioritas pembangunan
- 4) Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang Negara

D. Daftar Pustaka

- Budiman, Nita Andriyani, Sri Mulyani, Dianing Ratna Wijayani. 2019. Perpajakan. (Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus)
- Isroah. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kasmir, 2014, "Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya". Edisi Revisi. PT. Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Lebih Dekat dengan Pajak. Jakarta.
- Muktar, B., Rose Rahmidani, Menik Kurnia Siwi. 2016. Bank dan lembaga Keuangan Lain. Penerbit Kencana.
- Prawoto. 2021. Penilaian Bank, Asuransi dan Aset Tidak Berwujud: Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia & Praktik Penilaian Indonesia. Penerbit Andi & BPFE.
- Mustaqiem. 2014. Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. (Yogyakarta: Buku Litera)
- Soeriaatmadja, Arifin. 2010. Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Solihin, Dadang 2006. Keuangan Publik: Pendanaan Pusat dan Daerah. (Jakarta: Artifa Duta Prakarsa)
- Tim Pusklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2014. Pengelolaan Keuangan Negara, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

INTERNET:

<https://peraturan.bpk.go.id/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan

<https://unida.ac.id/fe/artikel/sistem-keuangan-diindonesia>

<https://eosteknologi.com/mengenal-lebih-dalam-apa-itu-sistem-keuangan/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/stabilitas-sistem-keuangan/Pages/Ikhtisar.aspx>

<https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/sski/default.aspx>

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2087/05.2%20bab%20.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

E. Tentang Penulis



Dr. (Cand.) Sri Juminawati., SE., MM., CLA-ALC., CME., CEXT..

Sri Juminawati kelahiran Jakarta, 25 September 1964. Dengan hobinya olahraga, musik dan *travelling*. Domisili penulis beralamatkan di Perum Griya Katulampa Blok C, III No. 21, Bogor. Penulis merupakan seorang

dosen di salah satu universitas di Jakarta.

Riwayat Pendidikan penulis dari bangku perkuliahan dimulai dari *Graduate Banking Academy* (D3) dari tahun 1986-1988, *Graduate Banking STIE Swadaya* (S1) dari tahun 1996-1998, *Magister Management Degree* (S2) *Laborora Graduate School of Management* Jakarta dari tahun 1999-2001, dan *Completing Doctoral Dissertation* (S3) *Syarif Hidayatullah Islamic University* Jakarta dari tahun 2019 sampai sekarang.

Prestasi yang pernah diraih penulis diantaranya peraih *Reward Recognition IMP BRI* 2017, dan Pemenang *Racing BRITAMA* 2017 kategori AMPD.

BAB

6

KOPERASI DI INDONESIA

DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si., CPHCM., CHRA.

A. Sejarah Perkoperasian di Indonesia

1. Zaman Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia

a. Zaman Penjajahan Hindia Belanda

Pada awal tahun 1896, seorang Patih Praja di Purwokerto bernama R. Aria Wiria Atmadja merintis pendirian suatu bank simpanan (hulp end spaarbank) untuk menolong para pegawai negeri (kaum priyayi) yang terjerat hutang dari kaum darat. Usaha tersebut mendapat bantuan dari seorang asisten residen Belanda yang bertugas di Purwokerto, yang bernama E. Sieburgh. Pada tahun 1889, ide R. Aria Wiria Armadja kemudian diperluas oleh de Walff van Westerrode sebagai pengganti E. Sieburgh. Bank tersebut tidak hanya membantu para petani dan pedagang-pedagang kecil, tak ubahnya cita-cita Raiffeisen dan Schulze Delitzsch.

Bersamaan dengan lahirnya kebangkitan nasional, antara tahun 1908-1913, Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang selanjutnya menjadi koperasi konsumsi, yang dalam perkembangan selanjutnya menjadi koperasi batik. Gerakan Boedi Oetomo tersebut yang dibantu juga oleh Sarikat Islam, akhirnya melahirkan koperasi pertama di

Indonesia bersamaan dengan lahirnya suatu gerakan kebangkitan nasional.

Pada tahun 1937, pemerintah memberikan bantuan modal untuk mendirikan koperasi-koperasi simpan pinjam terutama untuk membantu para petani agar lepas dari hutang kepada lintah darat dan pengijon. Agar koperasi di Indonesia mampu berkembang dan mampu mengatasi segala kebutuhan rumah tangganya sendiri, maka pada tahun 1939 pemerintah penjajah memberikan perhatiannya melalui perluasan ruang lingkup Jawatan Koperasi menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri sekaligus memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan tentang bagaimana cara koperasi mampu memperoleh barang dan memasarkan hasilnya.

b. Zaman Kependudukan Jepang

Koperasi-koperasi yang telah dibangun dengan penuh perjuangan ketika itu pun diganti fungsinya oleh kependudukan Jepang dan digantikan namanya menjadi Kumiai. Kumiai berfungsi sebagai alat pendistribusian segala macam barang keperluan perang tentara Jepang.

Perkembangan koperasi selama kependudukan Jepang tidak mengalami peningkatan yang berarti, baik itu secara kuantitas maupun kualitas, justru perkembangan koperasi semakin hancur. Bahkan, kependudukan Jepang mengeluarkan suatu ketentuan yang mempersulit pendirian koperasi. Koperasi harus dibangun atas izin dari pemerintah setempat (suchokan residen), tetapi dalam proses perizinannya dipersulit.

2. Zaman Setelah Kemerdekaan RI

a. Periode Tahun 1945 - 1958

Dengan diproklamirkan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945,

telah memberikan suatu semangat baru untuk menggerakkan koperasi kembali yang ketika itu telah digantikan fungsinya menjadi Kumiai oleh Jepang. Dengan adanya UUD 1945, koperasi telah mendapatkan landasan hukum yang sangat kuat, hal tersebut telah tercantum pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya.

1) Keputusan Kongres Koperasi I

Dengan adanya landasan hukum yang kuat bagi berpijaknya koperasi, maka pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat muncul suatu gerakan koperasi seluruh Indonesia dan mengadakan kongres pertamanya. Keputusan Kongres 12 Juli 1947 tersebut, adalah

- a) Terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI, berkedudukan di Tasikmalaya.
- b) Asas gotong-royong
- c) Menetapkan peraturan dasar SOKRI
- d) Pengurus disusun secara presidium, dengan Nitisumantri dipilih sebagai ketua.
- e) Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dengan koperasi Rakyat (Koperasi Ekonomi) sebagai alat pelaksana:
- f) Mendirikan Bank Sentral Koperasi:
- g) Ditetapkan konsepsi Koperasi Rakyat Desa yang meliputi tiga usaha: kredit, konsumsi dan produksi dengan pernyataan, bahwa Koperasi Rakyat Desa harus dijadikan dasar susunan SOKRI
- h) Mempertebal dan memperluas pendidikan Koperasi Rakyat di kalangan pengurus, pegawai, dan masyarakat.
- i) Distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi

- j) Tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang bermakna sebagai ajakan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden sehingga diberlakukannya kembali UUD 1945 sekaligus keluarnya Peraturan dari UUD No. 79 Tahun 1958. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan Koperasi Indonesia.

2) Tugas Koperasi

Segala kegiatan perekonomian dan perkoprasian oleh pemerintah disalurkan melalui Jawatan koperasi, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah-daerah. Tugas Jawatan Koperasi tersebut antara lain, adalah

- 1) Menumbuhkan organisasi koperasi dalam segala sektor perekonomian
- 2) Mengadakan pengalaman dan bimbingan terhadap koperasi
- 3) Mendaftar dan memberi pengesahan badan hukum koperasi.

Agar gerakan koperasi di Indonesia dapat tumbuh secara teratur dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah maka diperlukan suatu badan yang dapat mengelola pertumbuhan gerakan koperasi. Akhirnya, pada tahun 1960 dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 1960 yang sisinya, antara lain bahwa, "untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerja sama antara jawatan dengan masyarakat, dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop)".

b. Periode Tahun 1965 - 1967

Pada tanggal 2 Agustus 10 Agustus 1965 diselenggarakanlah Munas II, yang selanjutnya melahirkan UU No. 14 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok perkoperasian. Akan tetapi, dalam UU ini pun masih terdapat unsur-unsur politik yang masuk ke dalam koperasi, artinya koperasi masih dijadikan sebagai alat perjuangan dari partai-partai politik yang berkuasa.

Selanjutnya diadakan Munas I oleh Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin) pada tanggal 17 Juli 1966 di Jakarta dan menetapkan:

- 1) Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil-hasil lainnya dari Munaskp I dan Munaskop II :
- 2) Menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada MPRS yang telah membekukan UU No. 14 Tahun 1965.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka pemerintahan orde baru (orba) dalam hal ini Departemen Perdagangan dan Koperasi melalui Surat Keputusan No. 070/SK III/1966 telah membentuk panitia peninjauan UU No. 14 tahun 1965 yang dipimpin oleh Ibnu Soejono (Assisten Menteri Urusan Koperasi).

c. Periode Tahun 1967 - 1992

Pada tanggal 18 Desember 1967, pemerintah dengan persetujuan DPRGR telah berhasil membuat UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dengan dikeluarkannya UUD No.12 Tahun 1967 maka koperasi-koperasi yang ada ketika itu mulai diterbitkan. Pada akhir tahun 1967, jumlah koperasi mencapai 64.000 buah koperasi, tetapi koperasi yang telah berbadan hukum hanya 45.000 buah koperasi. Jumlah tersebut semakin menurun pada akhir tahun 1968 yang hanya tinggal 15.000 buah koperasi yang sesuai dengan UU No.12 Tahun 1967

Dalam tahapan pembangunan lima tahun pertama, pemerintah telah mendirikan:

- 1) Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta.
- 2) Balai Latihan Perkoperasian (balatkop) di setiap propinsi, sebagai tempat pendidikan dan latihan keterampilan bagi para anggota koperasi, pengurus, badan pemeriksa, manajr koperasi, karyawan dan bahkan terhadap calon-calon anggota koperasi.
- 3) Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) di Jakarta, dengan kegiatan tiap-tiap propinsi dalam membantu permodalan koperasi dengan cara menjadi penjamin koperasi atas pinjaman yang diperoleh koperasi-koperasi tersebut dari bank pemerintah.
 - a) Bonafiditas koperasi yang bersangkutan termasuk hal-hal yang menyangkut manajemen.
 - b) Organisasi koperasi yang bersangkutan.
 - c) Prospek usaha yang dibiayai dengan modal pinjaman.
- 4) Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

Awalnya, BUUD/KUD merupakan amalgamasi dari koperasi-koperasi kecil yang begitu banyaknya pada akhir tahun 1967, menjadi koperasi-koperasi yang dapat bekerja dalam skala yang lebih besar.

Sejarah pembangunan koperasi di Indonesia menunjukkan pasang surut perkembangan koperasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal seperti lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat dominan mempengaruhi perkembangan koperasi.

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Fungsi dan peran koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengemban tugas mulia sebagai berikut:

Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan dan masyarakat.

Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.

Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada periode 2001-2004, merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan periode 1999-2001, tanpa Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil (BPS-KPKM) prioritas pembangunan ditujukan kepada pengembangan peternakan, perikanan, dan perkuatan modal di sentra KUKM dengan model pendampingan dan perkuatan BDS, KSP/USP.

B. Pengertian Koperasi dan Karakteristik Organisasi Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Setelah kita membahas asal kata manajemen, berbagai definisi, fungsi dan tingkatan-tingkatan manajemen, selanjutnya akan mendiskusikan tentang koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa latin cooperatio dalam bahasa Inggris menjadi cooperation berarti kerja sama Co berarti bersama dan Operation berarti bekerja atau berusaha. Jadi, koperasi dapat diartikan sebagai suatu organisasi dalam bekerja atau berusaha bersama-sama anggotanya untuk mencapai suatu tujuan.

2. Karakteristik Organisasi Koperasi

Karakteristik atau ciri-ciri koperasi, terdapat 7 dimensi yang perlu diketahui, yakni

- a. siapa pemilik koperasi;
- b. siapa pengguna jasa koperasi;
- c. siapa pemilik suara pada koperasi;
- d. bagaimana pelaksanaan voting pada koperasi;
- e. siapa yang menentukan kebijaksanaan koperasi;
- f. siapa yang menerima sisa hasil usaha koperasi;
- g. siapa yang bertanggung jawab atas kerugian koperasi;
- h. siapa pemegang kekuasaan tertinggi pada perusahaan/koperasi?

C. Landasan dan Asas Koperasi

1. Landasan Koperasi

Koperasi Indonesia mengenal juga adanya 3 (tiga) unsur yang menyatu sebagai landasan koperasi yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Ketiga landasan yang dimaksud itu ialah landasan idiil, landasan struktural, dan landasan mental.

a. Landasan Idiil Ialah Pancasila

Idiil atau ideal yang berarti cita-cita. Untuk mencapai cita-cita koperasi Indonesia, yakni dengan didasari Pancasila sebagai filsafah bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural Ialah Undang-Undang Dasar 1945 Struktur Berarti Susunan

Landasan struktural koperasi Indonesia berarti tempat berpijaknya koperasi Indonesia dalam susunan hidup masyarakat.

c. Landasan Mental ialah Setia Kawan dan Kesadaran Pribadi

Mental dapat diartikan sebagai sikap atau tingkah laku seseorang. Seseorang bertingkah laku baik yang keluar dari isi hati yang sebenarnya adalah manusia yang bermental sehat demikian sebaliknya

2. Asas Koperasi

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluargaan. Kekeluargaan sebagai asas koperasi Indonesia merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari kerja sama saling bantu membantu tolong menolong sesamanya untuk kepentingan bersama tanpa memikirkan diri sendiri.

D. Sendi Dasar dan Tujuan Koperasi

1. Sendi Dasar Koperasi

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun.
- b. Pengelolaan secara demokratis. Artinya, prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- Bila ada keuntungan atau sisa hasil usaha yang diperoleh koperasi bukan berasal dari anggota koperasi tidak dibagikan kepada anggota, dapat digunakan untuk:
- 1) Cadangan koperasi,
 - 2) Dana pengurus,
 - 3) Dana pegawai atau karyawan,
 - 4) Dana pendidikan koperasi,
 - 5) Dana sosial, dan
 - 6) Dana pengembangan daerah kerja.
- d. Modal merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan badan usaha seperti halnya pada koperasi. Modal koperasi diperoleh dari simpanan-simpanan anggota berupa simpanan pokok yang dibayarkan pada saat awal masuk menjadi anggota koperasi, dan simpanan wajib yang dibayar anggota pada setiap periode tertentu, misalnya tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan sesuai ketentuan pada anggaran dasar koperasi.
- e. Kemandirian, pada prinsip kemandirian ini, kemandirian mengandung arti dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada kemampuan dan usaha sendiri serta berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri.

2. Tujuan Koperasi

Dalam Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 menyebutkan bahwa “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Berdasarkan tujuan koperasi tersebut di atas, dalam garis besarnya terdapat tiga hal penting, yaitu

- a. Untuk memajukan kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri
- b. Untuk memajukan kesejahteraan anggota masyarakat pada umumnya, dan
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

E. Persyaratan, Tugas dan Wewenang Pengurus Koperasi

1. Persyaratan Pengurus

Dalam undang-undang koperasi No.25 tahun 1992 tidak diatur secara jelas persyaratan untuk menjadi pengurus, lain halnya pada Undang-undang koperasi No.12 Tahun 1967 menyatakan bahwa pada syarat-syarat untuk dapat dipilih atau ditingkat sebagai anggota pengurus, ialah

- a. Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja;
- b. Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

2. Tugas Pengurus

- a. Mengelola koperasi dan usahanya.
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

3. Wewenang Pengurus

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

F. Kesehatan dan Pengawas Koperasi

1. Kesehatan Koperasi

Sehatnya koperasi terletak pada sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental. Lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini. Organisasi yang sehat dicirikan dengan:

- 1) Adanya kesadaran anggota merasa memiliki koperasi dan bersedia mengikuti segala kegiatan-kegiatan koperasi.
- 2) Anggota selalu patuh dan tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasinya.
- 3) Perangkat organisasi koperasi, Rapat Anggota, Pengurus, dan Badan Pengawas melaksanakan fungsinya dengan baik.
- 4) Komunikasi belangsung dengan baik dalam organisasi.

2. Pengawas Koperasi

a. Syarat-Syarat Pengawas

Pada dasarnya, untuk menjadi pengawas, pengurus atau jabatan apapun, syarat utama memiliki sifat pengawas, pengurus atau jabatan apapun, syarat utama memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja. Selain persyaratan utama tersebut di atas disertai pula syarat-syarat lainnya, yaitu

- 1) Memahami akuntansi koperasi;
- 2) Memahami peraturan-peraturan usaha koperasi, anggaran dasar serta peraturan niaga yang ada;

- 3) Memiliki semangat kerja yang tinggi serta bertanggung jawab;
- 4) Memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan

b. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan oleh pengawas koperasi secara garis besarnya dapat dibedakan atas pemeriksaan:

- 1) bidang organisasi dan manajemen,
- 2) bidang usaha,
- 3) permodalan,
- 4) keuangan

G. Daftar Pustaka:

- Anoraga, P., & Widiyanti, 2003; *Dinamika Koperasi*. PT. Bina Adiaksara, Jakarta.
- Djayahadikusumo, Sumitro, 1983; *Can Cooperative Become The Motive Force in The Economic Development of Indonesia*. Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta.
- Hendrojogi, 2004; *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktek*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Kartosaputra, dkk., 2003; *Koperasi Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusnadi, Hendra, 2005; *Ekonomi Koperasi*. Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Nurzain, Parjimin & Dj. Djohan, 1986; *Perkoperasian*. Penerbit Karunika, Jakarta.
- Soetjipto, H., 2015; *Mengembangkan Koperasi*. Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Suparmi, Ch., 2009; *Manajemen Koperasi*. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

H. Tentang Penulis



**DR. M. Surno Kutoyo, S.Ag., S.Pd., M.Si.,
CPHCM., CHRA.**

Riwayat Pendidikan

- SDN.WLahar II Kecamatan Larangan
Kab.Brebes
- SMPN1.MARGASARI Kab.Tegal
- STM PGRI 4 KOTA TANGERANG
- IAIN GUNUNG DJATI BANDUNG.
- UNBAR BANDUNG
- UHAMKA JAKARTA
- STIA YAPPAN JAKARTA

Saya anak ke delapan dari sembilan bersaudara. Dan Buku ini saya Abadikan untuk mengenang Almarhum R. Sukim Ali Sastro (Bapak). Almarhumah St. Kastini (Ibu) dan Almarhumah Warsinah (Kakak Pertama), Almarhum Aries Tarrisso (Kakak kedua), Almarhumah Dewi/Desti (Kakak keenam)

Serta Saudara Kandung saya yang mendukung saya untuk terus belajar, yaitu: Daryunah (Kakak Ketiga), Paduko Tarwito (Kakak Keempat), Komi Kurisah (Kakak Ketujuh), M. Ali Kodikin (Adik).

Buat yang selalu setia mendukung kemajuan dalam perjuangan hidup, yaitu Wardaningsih. S. Pd. (Istri)

Serta teruntuk Mata Hati saya, yaitu: Noor Nindhya Nawangwulan (Putri Pertama), Noor Andhiny Prahara Syekti (Putri Kedua)

BAB

7

KORUPSI DI INDONESIA

Yasir Riady, S.S., M.Hum.
Universitas Terbuka
yasir@ecampus.ut.ac.id

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki permasalahan korupsi yang cukup pelik di dunia, hal ini berdasarkan kajian dilakukan oleh instansi yang berbasis di Berlin, *Transparency International*, dan organisasi yang berbasis di Hong Kong pada kajian Konsultasi Risiko Tinjauan Politik dan Ekonomi. Kajian ini menunjukkan bahwa masalah korupsi bukanlah permasalahan di negara-negara berkembang, tetapi juga masalah negara-negara maju barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Prancis, karena korupsi merupakan salah satu masalah besar di beberapa negara ketika kekuasaan dan kesempatan bertemu untuk saling melakukan hal yang tidak baik.

Alatas (1990) dengan jelas menyatakan bahwa masalah korupsi adalah *transmetik*, yaitu berkaitan dengan semua sistem politik. Kajian studi tersebut mensurvei berbagai definisi korupsi dan mengeksplorasi mengapa praktik korupsi ada dalam pelayanan publik. Ini lebih lanjut menganalisis definisi dan alasan mana yang berlaku dalam konteks Indonesia. Melalui identifikasi sumber-sumber korupsi.



Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
(Sumber: <https://nasional.tempo.co/>)

Seperti definisi korupsi, para ahli teori tidak setuju mengapa pegawai negeri dan juga pemerintahan berperilaku korup. Bagian ini membahas beberapa alasan dan analisis bentuk korupsi mana yang terwujud di Indonesia. Mackintosh (1992) menjelaskan bahwa monopoli bahwa karena sektor publik, dengan kapasitasnya yang terbatas, di satu sisi, adalah satu-satunya penyedia layanan tertentu, sementara sejumlah besar warga negara yang membutuhkan layanan tersebut sehingga praktik korupsi dengan mudah terjadi.

Di Indonesia, gratifikasi dan suap adalah bentuk korupsi yang paling umum dalam kaitannya dengan penyalahgunaan fungsi monopoli sektor publik. Dalam jargon ekonomi, menggambarkan suap sebagai harga pasar yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli barang-barang tertentu dalam bentuk lisensi atau izin. Misalnya, untuk mendapatkan kartu identitas atau *ID Card* (yang wajib untuk orang dewasa di Indonesia), SIM, surat pernikahan, akta kematian, perceraian atau akta kelahiran, atau dokumen dari kementerian imigrasi dengan cepat dan instan,

pemohon mungkin harus membayar hingga dua puluh kali biaya resmi.

Selain itu, nepotisme juga termasuk tinggi dan ada berkembang pada perekonomian Indonesia. Hampir semua konglomerat Cina menerima fasilitas dari pemerintah sehingga, menurut Bratanata, seorang kritikus terkemuka di Indonesia, 'bagi kebanyakan orang Indonesia, kata 'Cina' identik dengan korupsi. Fasilitas paling populer yang diberikan adalah monopoli untuk menyediakan barang dan jasa tertentu, atau kontrak untuk menjadi pemasok tunggal kepada pemerintah barang-barang tertentu layanan dengan harga yang sangat meningkat - hingga 200 persen lebih dari harga pasar.

Persepsi publik adalah faktor penting lain yang menentukan tingkat korupsi suatu negara. Semakin apatis masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi, (seperti halnya di banyak negara berkembang), semakin luas korupsi dan penyuaipan pemerintah. Meskipun jajak pendapat oleh Tempo pada tahun 1980 menunjukkan bahwa 43,8 persen responden menyebut korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri sebagai elemen paling berbahaya di negara ini (Hamzah, 1991:4), publik Indonesia tampaknya mentolerir korupsi. Ada dua faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini.



Gambar 3. Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia Hingga Sampai 2017 (Sumber Tempo.co)

Pertama, rakyat apatis karena mereka telah hidup dengan korupsi untuk waktu yang lama sehingga telah menjadi kebiasaan. Sejarah korupsi di Indonesia dimulai pada saat Perang Dunia II, ketika pengurangan gaji yang sewenang-wenang melalui inflasi berarti bahwa dalam waktu kurang dari empat tahun rupiah Indonesia merosot ke seperenam dari nilai sebelumnya. Sejak itu, korupsi tetap menjadi ciri keras kepala republik.

Kedua, ketidaktahuan publik terhadap korupsi kadang-kadang mungkin terkait dengan praktik atau tradisi budaya. Karena empat puluh persen dari populasi Indonesia adalah orang Jawa, dan dalam banyak kasus mendominasi posisi kunci di sektor publik, budaya Jawa sering disalahkan atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan publik (Magnis-Suseno, 1995). Ini adalah keharusan budaya Jawa, misalnya, untuk menghindari konflik. Orang Jawa mungkin cenderung mentolerir praktik korupsi daripada memulai konflik dengan pelakunya dengan mengambil tindakan atau melaporkan masalah tersebut. Selain itu, sebagai orang-orang yang dijajah, hubungan master-hamba kolonialisme tetap ada.

Pegawai negeri dipandang sebagai tuan yang selalu benar, yang tidak pernah membuat kesalahan dan karena itu dapat disalahkan atas apa pun yang mereka lakukan (Magnis-Suseno, 1984). Memang, menurut Schwarz istilah 'pelayan publik' adalah sesuatu yang keliru di Indonesia karena dalam budaya 'kuasi-feodal' ini, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa pegawai pemerintah adalah 'pemilik' bangsa dan masyarakat umum pelayan mereka.

Kehadiran partai politik yang kuat dan kelompok-kelompok penekan, dan kebebasan pers dapat menawarkan perlindungan terhadap pengambilan keputusan yang sewenang-wenang atau korup. Sayangnya, meskipun Indonesia telah memiliki lembaga demokrasi seperti parlemen, partai politik dan pemilihan umum reguler sejak kemerdekaan, pada dasarnya pemerintah masih jauh dari demokratis. Pemilu, misalnya, yang telah dilakukan lima kali selama masa kepresidenan Soeharto tidak bebas atau adil karena

terbukti bahwa suap dan kecurangan sedang bekerja dalam berbagai bentuk.

Desentralisasi di Indonesia: Lebih banyak kekuasaan dan sumber daya diskresioner kepada pejabat lokal Di Indonesia, proses desentralisasi, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2001, bertujuan antara lain untuk mengakhiri korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN: korupsi, kolusi dan nepotisme) dengan memberdayakan pemerintah daerah di seluruh negeri. Namun, reformasi desentralisasi belum menghasilkan hasil yang diharapkan.

Sumber daya ini ditransfer ke pemerintah daerah di bawah skema bagi hasil, dan mereka mewakili hingga 80% dari total pendapatan yang dikumpulkan oleh yurisdiksi ini. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas infrastruktur dasar dan pemberian layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pertanian, antara lain, yang menawarkan banyak peluang untuk manipulasi dalam alokasi dana yang ditujukan untuk layanan tersebut.

Selain itu, lebih dari 2,5 juta PNS ditugaskan kembali ke pemerintah tingkat kabupaten yang memiliki struktur dan sumber daya organisasi yang lemah. Pengenalan pemilihan lokal untuk walikota dan anggota dewan kota membawa tantangan lain untuk mengendalikan korupsi di negara ini. Laporan telah menunjukkan bahwa pemilihan lokal terakhir pada tahun 2009 tidak bebas dari kecurangan, dengan manipulasi suara, mobilisasi birokrat, intimidasi pemilih, dan 'politik uang'. Selain itu, aturan keuangan politik saat ini tidak pantas.

Tingginya biaya kampanye pemilu juga mendorong kandidat untuk mencari dukungan dari sektor swasta atau menyalahgunakan dana dan sumber daya publik. Pada saat yang sama, komisi pemilihan daerah yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses tersebut masih belum siap untuk menegakkan hukum (Freedom House, 2011). Kurangnya penegakan di tingkat lokal adalah salah satu masalah utama yang dapat berdampak negatif pada desentralisasi. Lembaga penegak hukum menderita

keterbatasan sumber daya keuangan dan manusia, campur tangan politik, dan kerentanan terhadap penyuapan, antara lain.

Bahkan lembaga-lembaga yang di tingkat nasional telah meningkatkan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih memiliki kegiatan terbatas di tingkat lokal (Freedom House, 2011) Akuntabilitas berperan penting untuk keberhasilan setiap proses desentralisasi. Dalam kasus spesifik Indonesia, sebuah studi yang dilakukan oleh Eckardt (2008) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah, misalnya, sebagian besar ditentukan oleh efektivitas mekanisme akuntabilitas di tempat untuk memastikan kontrol publik atas tindakan pemerintah. Terlepas dari perbaikan baru-baru ini, akuntabilitas publik di tingkat lokal tetap bermasalah. Sementara di distrik yang lebih maju organisasi masyarakat sipil dan media telah memainkan peran penting dalam menuntut lebih banyak akuntabilitas, di beberapa desa terpencil dan daerah pedesaan mekanisme akuntabilitas eksternal sangat lemah. Pers lokal sering tunduk pada pengaruh yang tidak semestinya oleh politisi lokal yang membatasi peran media sebagai pengawas anti-korupsi.

Isu korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama setiap hari di media Indonesia dan menghasilkan banyak perdebatan sengit dan diskusi sengit. Di kalangan akademis para sarjana terus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi di Indonesia berakar pada masyarakat prakolonial tradisional, era kolonial Belanda, pendudukan Jepang yang relatif singkat (1942-1945) atau pemerintah Indonesia merdeka berikutnya. Namun, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk masa mendatang hanya perlu diterima bahwa korupsi dalam domain politik, peradilan dan perusahaan Indonesia ada dan tersebar luas (meskipun ada beberapa tanda - yang dibahas di bawah ini - yang mengarah pada perbaikan).

A. Kerangka Sejarah Korupsi di Indonesia

Meskipun ada contoh-contoh besar korupsi dalam sejarah Indonesia sebelumnya, kita mengambil sebagai titik awal rezim Otoriter Orde Baru Presiden Soeharto (1965-1998) yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan yang mengesankan (dengan Produk Nasional Bruto rata-rata +6,7 persen per tahun antara tahun 1965 dan 1996) tetapi juga terkenal karena sifatnya yang korup. Soeharto menggunakan sistem patronase untuk memastikan kesetiaan bawahannya, anggota terkemuka elit nasional dan kritikus. Sebagai imbalan atas peluang bisnis atau posisi politik Soeharto dapat mengandalkan dukungan mereka. Dengan Angkatan Bersenjata (termasuk aparat intelijen) dan sumber daya yang sangat besar (berasal dari ledakan minyak pada 1970-an) yang dimilikinya, ia menjadi puncak sistem politik dan ekonomi nasional, menyerupai kekuatan patrimonial penguasa tradisional di masa lalu pra-kolonial.

Mengenai pembuatan kebijakan ekonomi Soeharto mengandalkan saran dan dukungan dari sekelompok kecil orang kepercayaan di sekitarnya. Kelompok ini terdiri dari tiga kategori: (1) teknokrat terlatih AS, (2) nasionalis ekonomi (yang mendukung gagasan peran besar bagi pemerintah dalam perekonomian) dan (3) kroni kapitalis (terdiri dari anggota keluarganya dan beberapa konglomerat etnis Cina yang kaya). Kadang-kadang semua kategori ini dituduh korup tetapi sebagian besar penekanan pergi ke lingkaran kecil kroni kapitalis (terutama anak-anak Soeharto) yang - banyak ketidaksukaan bisnis nasional dan masyarakat pada umumnya - penerima manfaat utama dari skema privatisasi negara dan sering menjalankan monopoli bisnis besar yang beroperasi dengan sedikit pengawasan atau pemantauan.

Salah satu karakteristik penting dari korupsi selama Orde Baru Soeharto adalah yang agak terpusat dan dapat diprediksi. Investor dan pengusaha bisa lebih-atau-kurang memprediksi jumlah uang yang harus mereka sisihkan untuk biaya 'tambahan' ini dan tahu orang mana yang mereka harapkan

untuk disuap. Tetapi ada juga taktik memasukkan kroni Soeharto dalam kegiatan bisnis untuk mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh birokrasi birokrasi. Pola yang sama ini ada di tingkat lokal di mana gubernur dan komandan tentara lokal menikmati hak istimewa yang sama dengan tokoh-tokoh kunci di Jakarta tetapi selalu menyadari kemungkinan dampak dari yang lebih tinggi jika mereka akan mendorongnya terlalu jauh. Dengan era baru Reformasi, yang dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, situasi ini akan berubah secara drastis.

B. Desentralisasi Korupsi Indonesia

Situasi berubah secara drastis ketika - setelah jatuhnya presiden Soeharto pada tahun 1998 - sebuah program desentralisasi regional yang ambisius dimulai pada tahun 2001 yang meramalkan transfer otonomi administratif dari Jakarta ke kabupaten (bukan ke provinsi). Kursus baru ini sejalan dengan permintaan rakyat tetapi memiliki efek samping negatif pada pola distribusi korupsi. Pengambilan suap tidak lagi 'terkoordinasi' seperti di masa lalu tetapi menjadi terfragmentasi dan tidak jelas. Desentralisasi berarti bahwa pemerintah daerah mulai menghasilkan peraturan daerah baru (seringkali tidak dirancang dengan ketat) yang memungkinkan lebih banyak pejabat dari berbagai tingkat pemerintah dan lembaga lain untuk berbaur dan meminta tambahan keuangan.

Menyadari kebutuhan mendesak untuk mengatasi korupsi (karena merusak iklim investasi dan bisnis dan - umumnya - mendorong adanya ketidakadilan yang berkelanjutan di masyarakat), sebuah lembaga pemerintah baru didirikan pada tahun 2003. Lembaga pemerintah ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (Disingkat KPK), diperkirakan akan membebaskan Indonesia dari korupsi dengan menyelidiki dan mengadili kasus-kasus korupsi serta memantau tata kelola negara (yang menerima kekuasaan yang luas).

Namun, pendapat mengenai pencapaiannya terbagi. Kritik menunjukkan bahwa KPK lebih fokus pada penanganan

tokoh-tokoh profil rendah, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi serangkaian kasus profil tinggi, terutama menjelang akhir pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang melibatkan menteri, pejabat tinggi polisi, hakim dan bendahara partai Partai Demokrat Yudhoyono. Keberhasilan parsial dan keberanian KPK ini telah memicu perlawanan - sebagian besar dari orang-orang yang telah dituntut atau diinterogasi - mengklaim bahwa KPK sendiri adalah lembaga yang korup. Dalam beberapa tahun terakhir sejumlah skandal telah muncul di mana anggota KPK - konon - dijebak oleh perwira polisi senior dan ditangkap untuk melemahkan otoritas KPK.

Ketua KPK Abraham Samad (2011-2015) harus mundur dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen hukum pada awal 2015. Polisi Indonesia mengklaim Samad telah memalsukan dokumen (termasuk paspor) untuk seorang wanita bernama Feriyani Lim. Diduga, Samad memiliki hubungan di luar nikah dengan wanita ini. Sebuah gambar yang menunjukkan pasangan di tempat tidur juga bocor (apakah gambar ini asli tidak diketahui). Sebelumnya, beberapa foto bocor yang menunjukkan Samad sedang intim dengan Miss Indonesia 2014 Elvira Devinamira (keduanya membantah keaslian foto skandal dan perselingkuhan). Mungkin bukan kebetulan bahwa foto-foto ini bocor sekitar satu hari setelah Samad mengumumkan kasus korupsi profil tinggi yang melibatkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan.

C. Korupsi pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

Selama pemilihan 2004 dan 2009 Yudhoyono menampilkan dirinya sebagai setia dan bertekad untuk mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya mengenai korupsi dalam lingkaran pemerintah. Ini membuatnya sangat populer sekitar waktu pemilihan 2009. Namun, kegigihan korupsi politik yang sedang berlangsung dan beberapa kasus korupsi profil

tinggi di dalam pemerintah menyebabkan peringkat persetujuannya jatuh bebas setelah 2010 dan hanya sedikit orang yang meneteskan air mata ketika masa jabatan presiden keduanya - dan terakhir - selesai pada akhir 2014.

Pukulan lain untuk prestise Yudhoyono adalah kepergian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia dari 2005 hingga 2010. Sri Mulyani, yang menikmati reputasi integritas (meskipun sedikit ternoda oleh skandal Bank Century), ditugaskan untuk mereformasi kantor pajak dan bea cukai Indonesia yang korup. Dia memiliki kesuksesan yang cukup besar dan dapat mengandalkan dukungan dari banyak orang Indonesia. Tapi penampilannya juga menciptakan musuh. Pada Mei 2010 ia meninggalkan politik Indonesia untuk menjadi direktur pelaksana di Grup Bank Dunia. Spekulasi yang meluas, bagaimanapun, adalah bahwa pengunduran dirinya disebabkan oleh tekanan politik dari bisnis dengan koneksi politik yang tinggi. Secara khusus, Grup Bakrie sering disebutkan di media Indonesia sehubungan dengan ini (Aburizal Bakrie saat itu adalah ketua partai Golkar; anggota koalisi pemerintahan Yudhoyono). Para kritikus mengatakan bahwa Yudhoyono seharusnya mendukungnya.

Selain itu, berbagai kasus korupsi - yang melibatkan anggota partai Yudhoyono dan menteri di kabinetnya - muncul menjelang akhir kepresidenannya dan telah secara serius merusak daya pikat Partai Demokrat dan Yudhoyono sendiri (yang dianggap oleh beberapa orang sebagai pemimpin yang lemah karena munculnya skandal korupsi ini di partai dan kabinetnya). Dalam dua tahun terakhir masa kepresidenannya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Andi Mallarangeng) dan Menteri Agama (Suryadharma Ali) mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Sementara itu, pada tahun 2013 Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar didakwa menerima suap \$ 260.000 sebagai imbalan untuk memperbaiki putusan pengadilan. Ini berarti bahwa - setelah awal yang menjanjikan - munculnya banyak kasus korupsi profil tinggi menjelang akhir masa jabatan keduanya, Yudhoyono

tidak akan diingat sebagai pejuang korupsi besar yang dia lihat di awal.

D. Korupsi Selama Pemerintahan Joko Widodo

Sejak 2014 Joko Widodo memimpin bangsa. Mirip dengan presiden dan kandidat presiden sebelumnya, ia telah menyerukan pertempuran melawan korupsi yang meluas di negara itu, mendesak perlunya 'revolusi mental' yang mencakup penghentian keserakahan dan korupsi di masyarakat. Ini adalah tugas yang menakutkan tetapi Jokowi telah melakukan beberapa upaya penting, misalnya dengan memindahkan banyak layanan pemerintah secara online (menyiratkan birokrat yang haus suap memiliki lebih sedikit peluang untuk mendapatkan uang tambahan).

Sejauh ini, Presiden Jokowi dapat menikmati citra yang bersih dan bebas korupsi (meskipun ia dikritik karena mendukung calon kepala polisi Budi Gunawan yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi). Juga di dalam kabinetnya belum terjadi skandal apa pun. Namun, Jokowi harus tetap berhati-hati agar tidak mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya.

Pada perkembangannya beberapa deretan menteri dari Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 ketika pandemi sedang tinggi dan adanya bantuan untuk Covid ini. Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menjadi tersangka yang sebelumnya juga Imam Nahrawi Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam dugaan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018.

E. Perkembangan Positif dalam Perjuangan Indonesia Melawan Korupsi

Terlepas dari gambaran yang sebagian besar negatif ini, ada beberapa tanda positif. Pertama-tama, perlu disebutkan bahwa ada dorongan besar dari rakyat Indonesia untuk memberantas korupsi di Indonesia dan media bebas memberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan suara mereka dalam skala nasional, sambil memperbesar berbagai skandal korupsi (meskipun beberapa lembaga media - yang dimiliki oleh politisi atau pengusaha - memiliki agenda mereka sendiri untuk melakukan ini).

Dorongan yang cukup populer untuk mengatasi korupsi berarti bahwa menjadi anti-koruptor sebenarnya adalah peraih suara yang penting bagi para politisi yang bercita-cita tinggi. Terlibat atau disebutkan dalam kasus korupsi dapat secara serius merusak karier karena dukungan populer menurun. Efek samping negatif (bagi ekonomi negara) dari pengawasan publik ini adalah bahwa pejabat pemerintah saat ini sangat berhati-hati dan ragu-ragu untuk mencairkan alokasi anggaran pemerintah mereka, takut menjadi korban dalam skandal korupsi. Perilaku hati-hati ini bisa disebut keberhasilan pengaruh KPK yang sedang mengawasi aliran uang, tetapi juga menyebabkan belanja pemerintah lebih lambat.

F. Daftar Pustaka

- Anderson. Language Skill in Elementary Education. New York: Macmillan. Publishing Co. Dalman. (2014).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Andi Hamzah, dan Siti Rahayu, 1991.
- Alatas, Secha. The effect of change in life cycle strage on the migration behavior of individuals in Javanese communities in Indonesia. PhD Disertation. Brown University (1990)

- Eckert, J. V, Evaluation and national and Local Governments Relationship., Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (2008)
- Franz Magnis-Suseno SJ. ETIKA JAWA. Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan dan Hidup Jawa. GI. Penerbit PT Gramedia, Jakarta. (1984)
- Freedom in the World. The Annual Survey of. Political Rights & Civil Liberties. Arch Puddington. General Editor. Aili Piano. Managing Editor. (2011)
- Norton, R., Mackintosh, M, Partnership: Strategic Economic Management in Local Government, Kingston University (1992)
- Singh, Khushwant, "Are We a Corrupt People?", dalam Suresh Kohli (ed.), Corruption in India, (New Delhi: Chetana Publications, 1975).
- Susetiawan, "Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial", Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan, (Yogyakarta: UII Press, 1997).
- Theobald, Robin, Corruption, Development and Underdevelopment, (London: The McMillan Press Ltd. (1990)
- Umer Chapra, M., Islam and Economic Challenge, (USA: IIIT dan The Islamic Foundation, (1995).
- <https://nasional.tempo.co>
- <https://grafis.tempo.co/read/1488/peringkat-indonesia-dalam-indeks-persepsi-korupsi-1995-2017>

G. Tentang Penulis



Yasir Riady, S.S., M.Hum.

Lahir di Jakarta dan menempuh pendidikan formal dari SD hingga SMA di Jakarta. Setelah menyelesaikan sekolahnya kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) jurusan Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kemudian, setelah lulus pernah bekerja di salah satu sekolah swasta, perpustakaan dan juga Lembaga Bahasa di Jakarta. Pada tahun 2009, menyelesaikan pendidikan master (S2) di Universitas Indonesia. Jurusan yang dipilihnya adalah Ilmu Perpustakaan dan Informasi, dengan tujuan agar jurusan yang dipilih bisa menjadi salah satu pengalaman dan informasi yang bisa digunakan dalam pengembangan dunia perpustakaan. Sebelum lulus, pernah bekerja sebagai di Radio Republik Indonesia (RRI) pada tim Voice of Indonesia (VOI) sebagai media dan translator untuk berita budaya dan cerita daerah. Pernah aktif menjadi Dosen tamu di beberapa universitas seperti Universitas Bhayangkara dan USNI serta beberapa kali sebagai pemandu wisata dengan memiliki lisensi sebagai pramuwisata madya, senang belajar dan menulis serta aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, komunitas dan profesi. Fokus topik risetnya mengenai komunikasi, sosial media, pemasaran jasa informasi perpustakaan, perilaku pencarian informasi dan perpustakaan digital. Selain sebagai dosen pengajar, saat ini aktif sebagai Direktur di Universitas Terbuka Jambi. Email: yasir@ecampus.ut.ac.id

BAB 8

KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA

Rini Ardista, S.Pd.I., MM

A. Pengertian dan Demensi Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Pengertian kemiskinan umumnya selalu dikaitkan hanya dengan sektor ekonomi semata. Padahal kemiskinan bisa dilihat dari sisi sosial maupun budaya masyarakat. Pada prinsipnya kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Beberapa definisi menggambarkan kondisi ketiadaan tersebut. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan BPS, yang menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS & Depsos, 2002).

2. Demensi Kemiskinan

Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Harniati, 2010), yaitu:

- a. Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga

rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dari seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.

- b. Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin sempit.
- c. Kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. (Indra, *kompas online*, 2007). Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang

bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Ketiga dimensi tersebut menggambarkan bahwa penyebab kemiskinan tidak lah tunggal, bisa berasal dari kondisi alam yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi, seperti yang diperlihatkan kemiskinan alamiah. Namun bisa juga kemiskinan disebabkan karena faktor manusianya, seperti yang digambarkan pada kemiskinan secara kultural, bahkan bisa juga karena kondisi yang dibentuk oleh manusia melalui struktur dan institusi dalam masyarakat, seperti diperlihatkan dimensi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dialami oleh petani diperdesaan selain karena rendahnya kualitas sumber daya manusia juga karena struktur dan kebijakan sektor pertanian yang kurang mengembangkan sektor pertanian. kemiskinan struktural di wilayah perdesaan umumnya dialami oleh para petani yang tidak memiliki lahan atau buruh tani dan buruh penggarap dimana hasil pertaniannya tidak mencukupi untuk memberi makan dirinya dan keluarganya. (Soedjatmoko, 1980).

Adanya kemiskinan struktural dalam masyarakat dapat dilihat melalui beberapa karakteristik dari kemiskinan structural itu sendiri. Ciri pertama yang mudah dilihat adalah tidak terjadinya mobilitas sosial secara vertikal, jika pun terjadi prosesnya berjalan sangat lamban. Tidak terjadinya mobilitas secara vertikal menyebabkan kelompok yang miskin tetap hidup dengan kemiskinannya, sedangkan kelompok yang kaya akan tetap menikmati kekayaannya. Kondisi ini disebabkan karena adanya kungkungan struktural yang membuat tidak adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Kungkungan struktural tersebut telah membentuk berbagai rintangan bagi kelompok miskin, sebagai contoh adalah mahalnya biaya pendidikan menyebabkan kelompok miskin tidak bisa mencapai

pendidikan yang tinggi untuk bisa melepaskan diri dari jerat kemiskinan.

Ciri lain dari keberadaan kemiskinan struktural adalah adanya ketergantungan yang tinggi kelompok miskin terhadap kelompok sosial di atasnya. Ketergantungan ini yang mengurangi kemampuan kelompok miskin untuk memiliki bargaining posisi dalam hubungan sosial yang memang telah timpang, misalnya antara pemilik tanah dengan petani penggarap atau buruh tani. Para petani penggarap tak bisa menentukan bagaimana pembagian hasilnya, buruh tani tak dapat menentukan berapa upahnya, semuanya tergantung pada pemilik tanah. Pada kondisi seperti ini kelompok yang lebih rendah relatif tidak dapat memperbaiki kehidupannya.

B. Paradigma dan Penyebab Kemiskinan

1. Paradigma Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan pada umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud adalah Neo-Liberal dan Demokrasi-sosial. Dua paradigma ini memiliki perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006: 95). Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam melihat kemiskinan, pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu yang merupakan akibat dari pilihan-pilihan individu. Bagi

pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan. (Syahyuti, 2006). Bagi pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilakukan bila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan.

Paradigma neo-liberal ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori dari paradigm ini (Suharto, 2002). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu Negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator "garis kemiskinan" (Edi Suharto, 2009).

Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan (Satterthwaite ;1997). Hal ini mengakibatkan bentukbentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat

ditemukan. Pendekatan income poverty ini lebih mudah dilihat dan dikaji karena langsung dapat terukur, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

b. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan struktural. Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. (Cheyne, O'Brien & Belgrave (1998).

Pendekatan ini juga menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan dalam hal ini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Dalam hal ini peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, di mana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional

(melembaga), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

Kelemahan teori ini adalah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan.

c. Keberfungsian Sosial

Kedua pendekatan diatas memiliki kelemahan, oleh karenanya timbul pendekatan lainnya untuk menutupi kelemahan tersebut, yaitu pendekatan

keberfungsian sosial. Pendekatan ketiga ini lebih mengarah pada pendekatan demokrasi sosial (Edi Suharto 2009). Pendekatan ini menekankan pada cara yang dilakukan individu-individu dan kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada kapabilitas individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial dilingkungannya. Salah satunya teori yang mendukung paradigm keberfungsian sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Baker, Dubois, dan Miley (1992). Teori tersebut menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini individu dianggap sebagai subyek dari segenap proses dan aktivitas kehidupannya. Sehingga setiap individu memiliki dan atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya.

Pendekatan ini memandang kelompok miskin bukan sebagai objek yang pasif yang hanya dicirikan oleh kondisi dan karakteristik kemiskinan. Kelompok miskin bagi pendekatan ini adalah individu yang memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang sering digunakannya dalam mengatasi berbagai permasalahan seputar kemiskinannya. Keberfungsian sosial dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Melalui pendekatan ini dapat dijelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Serta bagaimana struktur rumah tangga, keluarga, kekerabatan, dan jaringan sosial mempengaruhi kehidupan orang miskin. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa yang

dimiliki si miskin dan bukan pada apa yang tidak dimiliki si miskin.

Untuk mempelajari kemiskinan, pendekatan keberfungsian sosial menekankan pada empat point yaitu (Edi Suharto 2009):

- 1) Kemiskinan sebaiknya dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. Pada point pertama ini juga termasuk efektivitas jaringan sosial dalam menjalankan fungsi sosialnya, dimana jaringan sosial yang dimaksud termasuk pula lembaga kemasyarakatan dan program-program anti kemiskinan setempat.
- 2) Menggunakan indikator komposit untuk mengukur kemiskinan, dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga dan jaringan sosial yang ada disekitarnya.
- 3) Lebih menekankan pada konsep kemampuan sosial dari pada hanya pada konsep pendapatan dalam memotret kondisi sekaligus dinamika kemiskinan.
- 4) Kemampuan sosial keluarga miskin difokuskan pada beberapa indikator kunci, yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*). Sedangkan indikator kunci untuk mengukur jaringan sosial mencakup kemampuan lembaga-lembaga sosial memperoleh sumber daya (SDM dan finansial), menjalankan peran atau fungsi utamanya, mengelola asset, menjangkau sumber, berpartisipasi dalam program antikemiskinan, dan peran dalam menghadapi guncangan dan tekanan sosial.

Paradigma ini lebih lengkap dibandingkan dua paradigm sebelumnya karena selain menekankan pada institusi paradigm ini juga tidak melupakan kemampuan individu dalam mengatasi masalah kemiskinannya. Pada paradigm ini kelompok miskin tidak dianggap pasif namun dianggap memiliki kemampuan dan potensi dalam mengatasi kemiskinannya, dibantu dengan kemampuan jaringan sosial yang ada dalam masyarakat. Gabungan kemampuan institusi dan individu ini akan membuat kajian mengenai kemiskinan yang dialami satu kelompok menjadi lebih lengkap.

Berdasarkan tiga paradigma tersebut maka penelitian ini lebih menggunakan paradigma keberfungsian sosial. Hal ini dikarenakan melalui pendekatan ini diharapkan akan bisa dilihat secara lebih realistis dan komprehensif mengenai rumah tangga petani miskin. Alasan lainnya memilih pendekatan ini adalah karena pendekatan keberfungsian sosial lebih memandang individu sebagai subyek dari setiap aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu setiap individu termasuk petani miskin harus dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada disekitar dirinya.

2. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan (Cox 2004), yaitu:

- a. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi. Karena negara-negara berkembang terpinggirkan maka jumlah

kemiskinan di negara-negara berkembang jauh lebih besar dibandingkan negara-negara maju.

- b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskinan perdesaan, adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan; kemiskinan perkotaan, yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, dimana tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.
- c. Kemiskinan sosial, dimensi ketiga ini melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat. Misalnya kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas merupakan kemiskinan yang diakibatkan kondisi sosial yang tidak menguntungkan kelompok tersebut. Kondisi sosial yang dimaksud misalnya bias gender, diskriminasi, atau eksploitasi ekonomi.
- d. Kemiskinan konsekuensial. Dimensi keempat ini menekankan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.

Dimensi yang dikemukakan oleh Cox ini jauh lebih luas dari apa yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Hal ini dikarenakan Cox memasukan dimensi globalisasi sebagai salah satu dimensi. Melalui dimensi ini dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di suatu negara dapat disebabkan oleh pola perekonomian dunia. Perekonomian dunia juga dapat memberikan pengaruh pada pola pembangunan di dalam suatu negara. Dimana pembangunan

itu sendiri dapat menjadi sumber penyebab kemiskinan bila pola pembangunan yang diterapkan tidak seimbang untuk setiap wilayah.

C. Struktur Ketenagakerjaan Indonesia

Laju pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan laju pertumbuhan penyediaan kebutuhannya, seperti pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun kebutuhan sekunder dan tersier lainnya. Untuk mendapatkan semua kebutuhan tersebut maka penduduk harus mempunyai pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

Dengan semakin bertambahnya penduduk, maka bertambah pula tenaga kerja (*man power*) yang masuk ke bursa tenaga kerja, atau dikenal dengan sebutan angkatan kerja (*labor force*). Dalam pengertian statistik ketenagakerjaan yang digunakan di tanah air, angkatan kerja adalah semua penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih yang bekerja dan memperoleh penghasilan (*income*). Namun dengan adanya program wajib belajar sembilan tahun maka definisi ini menjadi tidak cocok lagi dan batas usia minimal untuk masuk kategori angkatan kerja adalah 15 tahun.

D. Lapangan Kerja dan Pengangguran

Harus ada penciptaan kesempatan kerja baru untuk memanfaatkan semua tambahan angkatan kerja tersebut. Persoalan ini menjadi lebih pelik karena

meningkatnya pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah menganggur (*under unemployment*) akibat krisis ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi tidak saja telah mempersempit lapangan kerja namun juga menimbulkan korban PHK dalam jumlah besar. Jika kecenderungan ini terus berlanjut maka akumulasi tingkat pengangguran tersebut menjadi makin besar.

1. Upah Buruh dan Produktivitas

Persoalan tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Aspek ini sangat penting bukan saja karena terkait dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, melainkan juga terkait dengan kemampuan daya saing produk yang dihasilkan. Sejalan dengan perkembangan sektor industri, penyerapan tenaga kerja di industri juga terus bertambah, walaupun masih relatif lamban.

Rendahnya tingkat upah di Indonesia ternyata tidak hanya terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang ada dan besarnya tambahan angkatan kerja baru yang masuk bursa kerja. Faktor lain yang menyebabkan murahnya tingkat upah ini adalah tingkat produktivitas yang rendah.

2. Upah dan Daya Saing Industri

Tingkat upah yang rendah saat ini tampaknya tetap menjadi salah satu faktor yang diunggulkan sektor manufaktur untuk bersaing di pasar dunia. Hal ini tercermin dari pertumbuhan nilai ekspor dari industri padat karya (*labor intensive manufactures*).

Dalam persaingan industri yang kian ketat, serta perkembangan produktivitas di sektor industri yang relatif lamban akan sangat mempengaruhi daya saing produk industri Indonesia tersebut. Kenyataannya, tingkat produktivitas tenaga kerja industri Indonesia walaupun telah mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat kenaikan upah. Ini mengandung implikasi menurunnya daya saing produk industri Indonesia, karena harus membayar labor cost yang lebih tinggi, atau menurunnya penerimaan faktor produksi lain untuk mengkompensasi peningkatan upah buruh.

3. Karakteristik Pengangguran

Permasalahan pengangguran ini sebenarnya bukan masalah baru. Sejak masa sebelum krisispun, persoalan

kesenjangan antara angkatan kerja dengan peluang kerja sudah terjadi. Hanya saja pada masa krisis persoalannya bertambah pelik, karena pada saat yang sama terjadi kelesuan investasi dan ekonomi secara keseluruhan. Rendahnya daya beli menimbulkan rendahnya permintaan, yang berarti pula mengendurnya aktivitas produksi. Mengendurnya aktivitas ini bukan saja menjadikan makin terbatasnya peluang kerja, melainkan juga memaksa banyak unit usaha untuk mengurangi pekerjanya. Adanya ketidakstabilan politik dan keamanan telah pula mengendurkan minat penanaman modal, yang pada akhirnya menurunkan gerak ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

Permasalahan ini akan terus dihadapi dalam perekonomian Indonesia, hanya saja dengan kadar yang berbeda. Pengangguran memang tidak bisa dihilangkan sama sekali. Dalam perekonomian yang sudah sangat mapan sekalipun pengangguran tetap ada, yang dikenal dengan natural unemployment atau pengangguran alamiah. Hal ini karena adanya keterampilan penganggur yang tidak sesuai (*structural unemployment*), upah yang tidak cocok (*tuntutan reservation wage*), menanti sementara waktu untuk bekerja (*frictional unemployment*), serta hal-hal lainnya.

Ditinjau dari sudut pemerintah pengangguran adalah “beban ekonomi”, dan suatu perekonomian yang mempunyai banyak penganggur tentu harus menyediakan dana amat besar untuk menghidupi mereka. Di Indonesia dan banyak negara berkembang lain, kesempatan kerja yang lebih self-employment kerja dengan upah (*wage-employment*). Apabila masalah kesempatan kerja ini dilihat sebagai masalah pengangguran seperti dinegara-negara industri, maka pemecahannya adalah dengan pemberian iklim yang baik bagi pengembangan usaha, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja.

4. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan ketenagakerjaan Indonesia harus diarahkan untuk menjawab tiga persoalan yang telah disinggung diatas, yaitu pertama, terus menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja yang ada, serta dapat menyerap angkatan kerja yang saat ini masih menganggur ataupun setengah menganggur, kedua, memberikan tingkat upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ketiga, meningkatkan produktivitas para pekerja yang ada, sehingga dapat menghasilkan produk yang kompetitif, sehingga mendorong produksi berkelanjutan.

Terdapat pandangan yang mengemukakan bahwa setiap terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, akan tercipta 400 ribu kesempatan kerja baru. Sebaliknya kontraksi ekonomi sebesar satu persen tersebut akan memunculkan pengangguran sebanyak angka tersebut. Dapat dibayangkan bahwa betapa lama waktu yang dibutuhkan dan besar laju pertumbuhan ekonomi yang harus terjadi untuk menghilangkan pengangguran yang ada.

a. Usaha Kecil Sebagai Penangkal Pengangguran

Meskipun pengangguran dan kemiskinan ini sangat kompleks, tidak berarti bahwa masalah tersebut tidak dapat dipecahkan sama sekali. Hal yang dianggap “klasik” adalah bagaimana kita mengefektifkan dan mengefisienkan setiap dana yang ada baik itu yang dikelola pemerintah, unit-unit ekonomi negara, maupun usaha swasta. Fokus efisiensi pemantauan dana tersebut yang muncul di saat krisis ini mungkin dapat menjadi blessing in disguised, dijadikan momentum untuk mengoreksi pola-pola pembangunan yang penuh kebocoran, pungli, dan pola-pola yang mengarah pada munculnya ekonomi biaya tinggi lainnya.

Ternyata unit-unit usaha rakyat, usaha kecil, merupakan sektor yang dapat menciptakan peluang kerja

dengan biaya murah. Artinya dibandingkan dengan usaha menengah dan besar, usaha kecil hanya membutuhkan dana sedikit untuk setiap alokasi dana kepada unit usaha kecil yang lebih besar akan sangat menolong penciptaan kesempatan kerja baru. Usaha-usaha di atas, tentu saja perlu diimbangi dengan usaha disisi pertumbuhan penduduk itu sendiri, yang menjadi supplier utama tambahan angkatan kerja.

b. Peranan Lembaga Pendidikan

Salah satu masalah lain yang terkait dengan pengangguran yang tinggi ini adalah berkaitan dengan pendidikan. Banyak tenaga kerja yang terdidik seperti lulusan SLTA, diploma, maupun sarjana, yang tidak diserap di bursa kerja. Untuk yang kategori ini saja, yang menganggur penuh (open unemployment) jumlahnya mencapai 37 persen dari penganggur yang ada. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keterkaitan antara produk lembaga pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam perekonomian kita. Terlebih jika dicermati fakta yang ada, ternyata tidak semua peluang atau kebutuhan tenaga kerja yang ada bisa terpenuhi. Masalah ini menggambarkan adanya ketidaksejajaran antara kualifikasi angkatan kerja yang ada dengan kesempatan kerja yang tidak terisi tersebut.

E. Daftar Pustaka

- Adenan Dj, I Subiyanto, Ch Suparmi (1986): *Ekonomi Pembangunan I*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Baskoro IN & NS Damajanti (1996); *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2000.
- Ediyono SH dkk (2003); *Prinsip-prinsip Lingkungan Dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*. CV Idayus, LPKLP Usakti, Ditjen Dikti Depdiknas, Jakarta.

- Halachmi, Arie. 2005. Performance measurement is only one way of managing performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.
- Hamid ES, 2006; *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Independent Commission on Population and Quality of Life, (1996); *Caring For The Future*, Osford University Press, Oxford. Diterjemahkan oleh Mohamad Soerjani, dengan judul: *Kepedulian Masa Depan*, Institut Pendidikan dan Pengembangan Lingkungan, 2000, Jakarta.
- Irawan & M Suparmoko (1992); *Ekonomika Pembangunan*. BPFE, Yogyakarta.
- Isalamy I (1994); *Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Kartono H, S Rahardjo, I M Sundy (1989); *Esensi Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana*, Geo FMIPA Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kasnawi MT, S Hasan, S Nur (2000); *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta.
- Lipsey RG et all (1990); *Economics*, George Weidenfeld and Nicolson Ltd.
- Diterjemahkan oleh Jaka Wasana dan Kirbrandoko, dengan judul: *Pengantar Mikroekonomi*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Malo M & Wawan Ruswanto (2009); *Sosiologi Ekonomi*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Myrdal G (1976); *Bangsa-bangsa Kaya dan Miskin*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Ndraha T (1986); *Pembangunan Masyarakat*, Depdikbud Universitas Terbuka, Jakarta.

- Sajogyo P (1985); Sosiologi Pembangunan, FPS IKIP Jakarta & BKKBN, Jakarta.
- Samuelson PA, (?); Economics, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sanusi B (2004); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- SastroAtmodjo, S (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri, Solok.
- SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Studi Kelayakan Proyek & Bisnis. Pustaka Learning Center, Malang.
- Soelistyo & Insukindro (1995); Teori Ekonomi Makro I, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sembiring RK (1985); Demografi, FPs IKIP Jakarta bekerjasama dengan BKKBN, Jakarta.
- Sembiring RK (1987); Demografi, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soelistyo & Insukindro (1995); Teori Ekonomi Makro I, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soeratno (1996); Ekonomi Pertanian, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sovi N (1997); Sistem Ekonomi Indonesia, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Sukirno S (1985); Ekonomi Pembangunan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Smith, Kevin B. dan Larimer, Christopher W.. 2009. The Public Policy Theory Primer. United States of America: Westview Press.
- Supari, A. Imam. 1999. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tambunan TTH, 2009; Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tarmidi LT & W Usman (1992); Ekonomi Pembangunan II, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.

Widiastuti, Ika, 2021; Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Kemandirian Pangan Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit Insan Cendekia Mandiri. Solok.

F. Tentang Penulis



Rini Ardista, S.Pd.I., MM, lahir di Ponorogo pada Tanggal 27 Juli 1969. Menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Ponorogo. Kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan pendidikan di SMA Yaspri 1 Jakarta tahun 1988, D3 ASMI Pulo Mas Jakarta tahun 1988, S1 STIT INSIDA Jakarta tahun 1992, S1 STIT INSIDA Jakarta tahun 2012, S2 di STIMA IMMI Jakarta tahun 2015. Setelah mengantongi gelar Magister Manajemen, saya terjun ke dunia dosen pada tahun 2016 dan menjadi dosen tetap di STIE TRIBUANA Bekasi Program Studi Manajemen sampai sekarang. Penulis aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan sudah lulus Sertifikasi Dosen.

BAB 9

PEMBANGUNAN MANUSIA, GOOD GOVERNANCE, OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Erdinson Simbolon, S.E.
Yayasan Pendidikan Advent

A. Pembangunan Manusia di Indonesia

1. Pengukuran Pembangunan Manusia

Indikator yang belakangan ini banyak digunakan adalah berkaitan dengan unsur pembangunan manusia. Cynthia Taft Morris memunculkan indeks yang dikenal dengan *The Physical Quality of Life Index* (PQLI), sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) secara komprehensif mengajukan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang kini banyak digunakan oleh negara-negara di dunia (Todaro, 2000).

Di Indonesia belakangan juga banyak memanfaatkan IPM ini untuk melihat kemajuan nasional maupun daerah. Publikasi data IPM untuk Indonesia saat ini sudah sampai ketingkat kabupaten/kota. Variabel IPM ini juga disarankan untuk dapat dipertimbangkan dalam penyusunan formula DAU (Dana Alokasi Umum) yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan (*equality*), dan untuk mengurangi kesenjangan fiskal daerah (*fiscal gap*) dengan memperhatikan variabel pembangunan manusianya (*human development*) (Hamid, 2003).

Bagi Indonesia, perhatian pada variabel Indeks Pembangunan Manusia ini sangat penting karena: a. Pembangunan padahakikatnya merupakan pembangunan

manusia itu sendiri, sehingga aspek ini perlu mendapatkan prioritas anggaran; b. Pembangunan manusia Indonesia saat ini masih sangat tertinggal dibanding banyak negara lain didunia.

Sejumlah perhatian terhadap pembangunan manusia harus diberikan melebihi perhatian pada pembangunan infrastruktur. Ia harus dianggap sebagai kegiatan investasi sumber daya manusia yang efektif dan produktif, yang tidak boleh diabaikan karena pengejaran terhadap investasi modal. Pembangunan ekonomi pun merupakan derivat pembangunan manusia, yang tidak saja dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, melainkan juga meningkatkan nilai tambah sosial-kultural dalam wujud meningkatnya harkat/martabat manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan yang dilakukan tentu bukannya sekadar pembangunan di Indonesia, melainkan pembangunan Indonesia.

2. Masalah Pembangunan Manusia di Indonesia

Pembangunan manusia Indonesia menghadapi masalah klasik yaitu pendidikan dan kesehatan. Kita harus mengakui bahwa selama ini pemerintah kurang memberi perhatian yang optimal pada kedua bidang tersebut. Terlebih beberapa tahun terakhir ini, pemerintah seperti lepas tangan terhadap dua sektor publik yang mempengaruhi kualitas manusia Indonesia. Seperti yang telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, anggaran yang disediakan pemerintah untuk pendidikan sangat kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Rendahnya kualitas manusia Indonesia dapat dilihat berdasarkan lama bersekolah.

Permasalahan pendidikan yang buruk diatas mengakibatkan persoalan kependudukan yang baru yaitu pengangguran. Berdasarkan data BPS terdapat 10 persen angkatan kerjasi Indonesia menganggur. Dari jumlah itu sebagian besar penganggur lebih dari 75 persennya tinggal di

perkotaan. Hal ini terjadi karena sebagian besar orang melihat kota adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya ada banyak kesempatan bekerja, padahal industri di perkotaan gagal memperoleh dampak yang diinginkan seperti perluasan lapangan kerja. Akibat pola pikir semacam itu, terjadi urbanisasi besar-besaran yang berakibat meningkatnya pengangguran di kota dan kurangnya tenaga kerja pada sektor pertanian di desa. Sama halnya dengan sektor pendidikan, sektor kesehatan juga hanya mendapatkan porsi yang minim dalam anggaran pembangunan pusat dan daerah.

Berdasarkan HDI tahun 1999, kondisi kesehatan masyarakat Indonesia sangat buruk. Penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air bersih mencapai 51,9 persen, sedangkan penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap jasa kesehatan mencapai 21,6 persen. Akses tersebut meliputi ketersediaan dokter, obat-obatan dan sarana kesehatan lain. Dana Kompensasi BBM sebagian memang diberikan pemerintah untuk memperbaiki kualitas kesehatan manusia baik melalui instansi kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas maupun secara langsung diberikan kepada penduduk miskin. Namun jumlahnya belum memadai untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi bangsa ini.

B. *Good Governance*

1. *Good Governance* dalam Perspektif Teori

Menurut Bank Dunia, kata *governance* diartikan sebagai *the way of power it used in managing economic and social resources for development society*. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa *governance* adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.

a. *Governance* Didukung Tiga Kaki

Governance didukung oleh tiga kaki yakni politik, ekonomi dan administrasi.

- 1) Kaki pertama, yaitu tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik, baik dilakukan oleh birokrasi sendiri maupun oleh birokrasi bersama-sama politisi.
- 2) Kaki kedua, yaitu tata pemerintahan di bidang ekonomi meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi.
- 3) Kaki ketiga, yaitu tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

b. *Governance* Memiliki Tiga Domain

UNDP menyatakan bahwa *governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga domain, yaitu:

- 1) negara atau pemerintahan (*state*),
- 2) sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*); dan
- 3) masyarakat (*society*).

Ketiga domain tersebut di atas berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintah lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktivitas di bidang ekonomi. Sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subyek dari sektor pemerintah maupun sektor swasta karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. *Governance* yang dijalankan ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan melainkan harus masuk kategori yang baik (*good*).

c. Sembilan Prinsip *Good Governance*

UNDP mengajukan 9 (sembilan) prinsip *good governance* sebagai berikut:

- 1) *Participation,*
- 2) *Rule of law,*
- 3) *Transparency,*
- 4) *Responsiveness,*
- 5) *Concensus orientation,*
- 6) *Equity,*
- 7) *Effectiveness and efficiency,*
- 8) *Accountability,*
- 9) *Strategic vision.*

2. *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip dalam *good governance* tidak berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam korporasi/perusahaan. Apabila dalam pemerintahan kita mengenal *good governance* maka dalam korporasi kita mengenal adanya *good corporate governance* (GCG). Setiap korporasi harus menerapkan prinsip *good corporate governance* agar penyelenggaraannya benar-benar memberikan manfaat bukan saja bagi gelola, namun juga pemilik usaha dan para pihak terkait konsumen, lembaga publik, dan lingkungan di mana ia beroperasi.

Pada hakikatnya otonomi daerah merupakan refleksi dari *power sharing*, yaitu pembagian atau distribusi kewenangan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah lokal melalui kebijakan desentralisasi.

a. Empat Model Penyerahan Kewenangan

Terdapat empat model penyerahan kewenangan:

- 1) Kewenangan diserahkan kepada daerah disebut devolusi.
- 2) Kewenangan dilimpahkan kepada pejabat pusat yang ditugaskan di daerah disebut dekonsentrasi.

- 3) Kebijakan pemerintah pusat mempercayakan pelaksanaan satuan tugas tertentu kepada satu unit lembaga atau unit pemerintahan khusus untuk keperluan tersebut disebut delegasi, demi pertimbangan efisiensi yakni mengurangi beban biaya layanan publik maka diserahkan aktivitas pelayanan kepada pihak swasta.
- 4) Kebijakan desentralisasi kewenangan dalam kerangka menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam urusan seperti itu disebut privatisasi.

b. Capacity Building

Capacity building atau pengembangan kapasitas pada dasarnya merupakan parameter strategi bagi terwujudnya good governance. Beberapa elemen capacity building yang diperlukan dalam pengembangan otonomi daerah di Indonesia dan mendesak untuk diperbaharui antara lain:

- 1) Pengembangan Visi dan Misi Daerah dan Institusi Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Penguatan Kelembagaan Pemerintahan (*institutional strengthening*).
- 3) Pengembangan SDM Aparat Pemerintahan.
- 4) Pengembangan Network Pemerintahan.
- 5) Pengembangan dan Pemanfaatan Lingkungan Pemerintahan.

C. Otonomi Daerah

1. Definisi dan Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah

a. Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui otonomi daerah berarti telah terjadi pemindahan sebagian besar kewenangan

yang tadinya berada di pemerintah pusat untuk diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

b. Lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah

Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang otonomi daerah, yaitu:

- 1) Berkaitan dengan motif ekonomi untuk mendapatkan keadilan dan pemerataan. Selama ini daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah tidak dapat memanfaatkannya karena pajaknya diberikan kepada pusat.
- 2) Adanya motif politik, yaitu tuntutan demokratis untuk mengakhiri sentralisasi. Umumnya masyarakat Indonesia, terutama yang berada di daerah, menginginkan keterlibatan yang lebih besar dalam manajemen urusan sehari-hari mereka. Mereka mendambakan pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan menentukan sendiri apa yang ingin mereka lakukan dan bagaimana melakukannya.

Kebijakan nasional mengenai otonomi daerah dan pemerintahan daerah ditetapkan dalam UU No. 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dilengkapi oleh UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah itu, dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 telah pula ditetapkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan keperkasaan dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa

harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintah pusat.

2. Latar Belakang Otonomi Daerah

a. Sentralisasi Ekonomi

Berdasarkan perekonomian daerah selama era Orde Baru menyimpulkan tentang amat dominannya peranan pemerintah pusat dalam anggaran provinsi dan pemerintah daerah di bawah provinsi. Arah penggunaan, bahkan juga alokasi penggunaan bantuan Pemerintah Pusat, sudah ditentukan dari atas, sehingga Pemerintah Daerah tinggal melaksanakan saja. Oleh karena itu, seringkali proyek-proyek yang dibiayai oleh bantuan pusat tidak cocok dengan kebutuhan daerah. Implikasi dari besarnya intervensi Pemerintah Pusat ini telah menimbulkan berbagai dampak yang tidak menguntungkan bagi daerah, seperti meningkatnya ketergantungan anggaran dari Pemerintah Pusat, terganggunya penyusunan anggaran daerah karena harus menyesuaikan dengan bantuan pusat, dan rendahnya pertanggungjawaban pada masyarakat lokal.

Laporan World Bank (1994) menunjukkan bahwa sistem keuangan negara di Indonesia paling terpusat dibandingkan dengan China, Korea, India, Brazil, Argentina, dan Kolombia. Rasio penerimaan Pemda dengan pengeluaran Pemda Hanya 30 persen. Angka ini mencerminkan tingkat kemandirian daerah dalam keuangannya hanya 30 persen. Sedangkan China mencapai 100 persen, dan negara-negara lain berkisar 48 persen-76 persen. Hal ini mencerminkan pula adanya ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*) yang tinggi, yakni adanya ketidaksepadanan antara penerimaan dengan pengeluaran yang dibutuhkan oleh daerah.

Hasil kajian Shah dan Qureshi (1994), menunjukkan koefisien ketimpangan fiskal vertikal di Indonesia sebesar 0,19, yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah-daerah di Indonesia yang rendah. Dibandingkan dengan sembilan negara lain yang diteliti, koefisien ketimpangan fiskal vertikal Indonesia (1990) merupakan yang paling rendah, yang mencerminkan tingkat kemandirian yang rendah pula. Untuk beberapa negara lainnya seperti Australia, koefisien ketimpangan fiskal vertikalnya adalah 0,43, India sebesar 0,45, Pakistan sebesar 0,53, Malaysia sebesar 0,56, Amerika Serikat sebesar 0,89, dan Brazil sebesar 0,89.

b. Ketimpangan Antardaerah

Pertumbuhan ekonomi nasional relatif tinggi, namun pola pertumbuhannya timpang. Ketimpangan tersebut berupa ketimpangan antara kota dan desa, Jawa dan luar Jawa, serta antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI). Ketimpangan serupa bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang.

Studi yang dilakukan Kuncoro (2001) menemukan sampai tahun 1999 sebanyak 81,1 persen tenaga kerja di industri besar dan sedang bekerja di Jawa, yang mencerminkan adanya konsentrasi industri di Pulau Jawa tersebut. Demikian pula dalam penyerapan tenaga kerjanya. Ketimpangan spasial dan keterbelakangan KTI terhadap Pulau Jawa dan KBI, terjadi sebagai konsekuensi logis dari keterisolasian dan pilihan strategi pembangunan yang lebih berpihak kepada “efisiensi” (pertumbuhan) ketimbang “*equity*” (keadilan).

Tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita regional (provinsi), studi yang dilakukan Majidi (1997) menemukan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa terkonsentrasi dalam satu kuadran yang tingkat pertumbuhan dan pendapatannya tinggi

(*high growth, high income*). Ditemukan pula konsentrasi industri di provinsi-provinsi tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan:

- 1) fasilitas prasarana yang lebih baik dan lengkap,
- 2) ketersediaan tenaga dan tingkat upah yang relatif rendah,
- 3) sentralisasi birokrasi dan sistem perizinan yang berlebihan di Jawa, khususnya Jakarta;
- 4) kebijakan perdagangan regional dan kebijakan sektoral yang bias di Jawa.

Kajian yang dilakukan Davey (1989) menunjukkan bantuan-bantuan Pusat tidak banyak membantu mengimbangi kelemahan sumber daya daerah. Bahkan diketahui ada hubungan yang positif antara bantuan dan tingkat penerimaan daerah, yang berarti daerah-daerah yang lebih kaya justru mendapat bantuan yang lebih besar dari Pusat. Adanya ketidak jelasan variabel yang digunakan sebagai kriteria bantuan Pusat ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesenjangan fiskal dan akhirnya kesenjangan pendapatan antardaerah.

3. Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia

a. Pengaturan Pembagian Sumber-Sumber Pendapatan

Undang-undang tentang otonomi daerah yang dikeluarkan ah ya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No 25 Tahun 1999 merupakan langkah awal yang baik dalam menyikapi berbagai tuntutan pada Sistem Desentralisasi yang tidak bisa dilaksanakan terburu-buru. Melalui suatu proses untuk implementasi kedua UU tersebut 23 Tahun 1999 yang terkait dengan cara mengatur pembagian sumber-sumber pendapatan dari pemerintah pusat dan daerah, yang antara lain mencakup pendapatan dari pajak pajak dan hasil sumber daya alam. Sumber-sumber pendapatan ini diperlukan untuk membiayai pelaksanaan segala urusan yang menjadi tanggung jawab masing

masing Financial sharing yang diatur UU ini merupakan konsekuensi logis dari power sharing seperti dalam UU No. 22 Tahun 1999,

b. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah adalah kinerja pemerintah daerah Eksekutif pada daerah otonom sebagai dimaksud oleh Pasal 14 UU No. 22 Tahun 1999 adalah suatu Badan Eksekutif Daerah yaitu Pemerintah Daerah Dengan demikian yang dimaksud dengan eksekutif di sini adalah pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya. Hubungan antara implementasi kebijakan otonomi daerah dengan kinerja pemerintah daerah bisa merupakan suatu hubungan sebab akibat dua arah.

c. Beberapa Permasalahan Implementasi

Di dalam perkembangannya, pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999, penerapannya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain yang menyangkut aspek instrumental, yaitu terdapat pasal-pasal yang memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut, aspek struktural, yaitu perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan, aspek kultural yang menyangkut sikap perilaku dan budaya birokrasi dalam menyikapi perubahan sistem, secara mendadak dan mendasar serta aspek subyek keterbatasan sumber daya.

4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

a. Derajat Sentralisasi Keuangan

Ada beberapa alasan bagi tingginya derajat sentralisasi keuangan di negara-negara yang sedang berkembang di antaranya adalah lemahnya kemampuan administrasi di tingkat pemerintahan daerah, besarnya

perbedaan situasi dan kondisi antar berbagai daerah, perlunya kekuasaan yang kuat untuk mengurangi adanya gerakan-gerakan separatis, perlunya perencanaan nasional yang menyeluruh baik di bidang pembangunan sosial maupun ekonomi termasuk penyediaan prasarana komunikasi, transportasi, irigasi, yang semuanya ini sangat vital bagi perkembangan ekonomi negara.

b. Desentralisasi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi diwujudkan melalui:

- 1) Pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak (*taxing power*), pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, dan
- 2) Pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

c. Beberapa Bentuk Transfer Dana ke Daerah

Transfer dana ke daerah selain dilakukan dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari:

- 1) Dana Bagi Hasil (DBH),
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU), dan
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 4) juga dilakukan melalui Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang.

d. Tujuan Transfer Dana ke Daerah

Kebijakan transfer dana ke daerah, sesuai dengan UU 22 Tahun 1999 dan UU 25 Tahun 1999, pada dasarnya bertujuan untuk:

- 1) menyelaraskan dengan kebijakan ketahanan fiskal yang berkesinambungan (*fiscal sustainability*) dalam konteks kebijakan ekonomi makro,
- 2) memperkecil ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical imbalance*),
- 3) mengoreksi ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangan (*horizontal imbalance*),
- 4) meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah,
- 4) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta
- 5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sektor publik (demokratisasi).

5. Tax Effect dan Fiscal Need

Tingkat absorpsi pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak. Tax effort berhubungan terbalik dengan potensi pajak (*tax capacity " tax potential*) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (*tax base*) yang biasanya berupa pendapatan per kapita. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak ini disebut dengan kinerja pajak (*tax performance*).

Terdapat kriteria yang positif antara tingkat absorpsi pajak dan tingkat pendapatan, artinya semakin tinggi tingkat pendapatan suatu negara, maka persentase penerimaan pajak terhadap GDP cenderung meningkat. Dengan kata lain semakin tinggi pendapatan nasional, tax effort juga semakin tinggi. Tingkat absorpsi pajak di negara berkembang tumbuh lebih lambat daripada di negara industri.

Hubungan yang negatif dan berarti antara bantuan pusat dan pengeluaran per kapita untuk jasa-jasa sosial pada tingkat provinsi atau dengan kebutuhan fiskal (*fiscal need index*), menyarankan bahwa bantuan pusat dimaksudkan

untuk pemerataan penyediaan jasa-jasa sosial antar propinsi. Ternyata pula ada suatu kesimpulan yang bertentangan dengan umum bahwa faktor penduduk sangat menentukan dalam alokasi bantuan pusat ke daerah. Dalam kenyataannya hubungan itu justru negatif dengan koefisien korelasi $-0,3366$. Ini berarti bahwa semakin banyak penduduk justru akan mengurangi besarnya bantuan pemerintah pusat.

6. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah

Kajian-kajian ilmiah menunjukkan pentingnya pemberian peran yang lebih besar bagi daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di daerahnya. Temuan Wuryanto (1996), yang menggunakan pendekatan Keseimbangan Umum Terapan antar-regional, menunjukkan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan tanpa mengganggu kepentingan ekonomi nasional. Dengan merekomendasikan reformasi kebijakan fiskal yang berlaku, yang diarahkan pada sistem desentralisasi fiskal, termasuk didalamnya merestrukturisasi pembagian kewenangan diantara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal penerimaan dan pengeluarannya.

Dalam konteks otonomi dan desentralisasi fiskal, Mardiasmo (2001) secara spesifik mengemukakan tiga misi utama dari kebijakan pemerintah, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,
- b. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,
- c. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

7. Politik-Ekonomi Otonomi Daerah

Dengan dikeluarkannya UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kota/kabupaten berlomba untuk mengejar ketertinggalan akibat sentralisme di masa lalu. Mulailah era peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sebagian besar bersumber dari optimalisasi pajak, retribusi, pungutan-pungutan, dan eksploitasi kekayaan alam di daerah, yang kadang mengabaikan perhatian terhadap ekonomi rakyat. Lebih disayangkan lagi, orientasi PAD dan lobi ke pusat masih berorientasi pada kemuliaan pemerintah daerah dan DPRD, mengabaikan pemecahan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan (Setiaji, 2004).

8. Kesenjangan Fiskal (Fiscal Gap)

Dari pelaksanaan desentralisasi selama ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah. Permasalahan yang paling banyak muncul adalah ketidakcukupan sumber daya keuangan untuk menutup fiscal gap. Mardiasmo (2001) mengatakan ada beberapa masalah yang mendasar yang dihadapi pemerintah daerah yang terkait dengan kurangnya sumber daya keuangan, yaitu:

- a. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) sementara penerimaan daerah (*fiscal capacity*) tidak cukup untuk membiayai kebutuhan daerah, sehingga keadaan tersebut menimbulkan fiscal gap.
- b. Kualitas pelayanan publik yang masih memprihatinkan sehingga menyebabkan beberapa produk pelayanan publik yang sebenarnya bisa dijual ke masyarakat melalui *charging for service direspons secara* negatif.
- c. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana, seperti jalan, pasar, dan terminal, sehingga menyebabkan kelesuan perekonomian daerah.
- d. DAU dari pemerintah pusat yang tidak mencukupi.

- e. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

9. Ekonomi Biaya Tinggi

Salah satu masalah politik-ekonomi dalam penerapan desentralisasi fiskal adalah kecenderungan makin lestarnya ekonomi biaya tinggi di daerah. Perhatian terhadap aspek negatif ekonomi biaya tinggi perlu diberikan karena berpotensi menekan dan menghambat peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat daerah. Salah satu penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi adalah maraknya praktik-praktik “politik uang” (*money politics*) di daerah, yang ditengarai dilakukan dalam pemilihan kepala daerah, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan tender proyek kepada pihak swasta. Dalam hal ini terjadi hubungan interkorelasi yang sangat kuat antara “uang” dan “kekuasaan”, yang dilakukan oleh elit politik dengan dukungan pemodal (pengusaha besar). Pada titik inilah politik uang, utamanya yang masif makin mempengaruhi struktur biaya produksi yang semakin membengkak.

10. Kerjasama Ekonomi Daerah

Proses pembangunan ekonomi regional pada hakikatnya merupakan pelaksanaan suatu strategi pembangunan yang bersifat terpadu dan menyeluruh (Pamudji, 1985). Penyelenggaraan pembangunan pada berbagai sektor, memiliki ruang lingkup kepentingan yang luas dan mencakup lintas batas daerah/wilayah administratif.

Kebutuhan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti pusat kesehatan dan jasa sosial bagi masyarakat, pusat perbelanjaan, dan sarana publik lainnya pada suatu kota/daerah tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan yang sama akan infrastruktur tersebut oleh masyarakat daerah tetangga sehingga dalam perencanaannya perlu kerjasama (Mier,1993). Hal ini juga akan mengatasi berbagai

permasalahan keterbatasan pendanaan serta efektivitas pemanfaatan sarana bersama.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, secara nyata akan berdampak pada mobilitas input antar wilayah dan tenaga kerja. Dari sisi penawaran tenaga kerja, hal ini juga akan berdampak pada penyesuaian kualitas tenaga kerja antar wilayah, dan akan terjadi transfer teknologi sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan ekonomi antar wilayah. Kebijakan desentralisasi pemerintahan (otonomi daerah) pada hakikatnya merupakan tuntutan kemandirian daerah untuk menjalankan pembangunan dalam berbagai aspek.

Suatu konsep otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (dalam konteks pembangunan ekonomi) beranggapan bahwa pemberian kewenangan luas kepada pemerintah daerah akan memudahkan pemda dalam mengelola kekayaan dan keunggulan daerahnya sendiri. Kemudahan tersebut kemudian dijadikan dasar dalam persaingan antar daerah dalam memperebutkan investasi yang masuk disetiap daerah akan memberikan kemudahan dan insentif bagi investor potensial. Pada akhirnya, perekonomian nasional akan merasakan manfaatnya karena daya tarik daerah-daerah tersebut bagi investasi baru.

Adanya kebijakan desentralisasi, pemerintahan daerah diharapkan mampu melaksanakan otonomi daerah tanpa perlu lagi berharap yang terlalu besar kepada pemerintah pusat. Prinsip menolong diri sendiri (*providing self-help*) atau berdiri diatas kemampuan daerah itu sendiri secara otonom, merupakan pilihan yang tepat dan realistis dalam mengatasi berbagai kendala pelaksanaan otonomi daerah yang dihadapi. Membangun kerjasama dan kebersamaan untuk memajukan daerah atau antar daerah perlu lebih dikembangkan, agar tercipta suasana yang kondusif dalam pelaksanaan otonomi daerah, disamping juga

menghindarkan terjadinya konflik-konflik yang dapat merugikan (Juoro,2001).

Melalui kerja sama antar daerah akan diperoleh beberapa manfaat (Triyono, 2004), antara lain:

- a. Mengurangi persaingan yang tidak sehat antar daerah. Pada dasarnya masing-masing daerah mempunyai kepentingan untuk memacu sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulannya.
- b. Memperkuat posisi tawar daerah. Dalam upaya menarik investor, jika suatu daerah memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas, kekurangannya dapat diisi oleh daerah lain.
- c. Meningkatkan efisiensi promosi. Pengenalan produk-produk kepada masyarakat luas termasuk meningkatkan akses pasar baik dalam skala regional, nasional maupun internasional dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan ditanggung bersama.
- d. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Investor akan mendapatkan kemudahan untuk masuk kesuatu wilayah apabila terdapat suatu kesamaan pengaturan diantara daerah-daerah pada wilayah tersebut.
- e. Efektivitas penyiapan infrastruktur. Investor akan tertarik masuk pada suatu wilayah apabila infrastruktur yang ada di daerah-daerah sebagai lintasan modal proses produksinya tersedia secara memadai.
- f. Memudahkan dibangunnya link bottom up. Dengan adanya kerjasama antar daerah akan mempermudah dibangunnya jaringan kerja secara vertikal.

D. Daftar Pustaka

- Hamid, E.S., (2006); *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Hartono, D Faunah & Winarti FX (1985); *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Penerbit Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.

Karseno AR, 2010; Statistika Ekonomi II; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Lipsey RG & PO Steiner (1984); Economics, Harper & Row Publisher Inc.

Diterjemahkan oleh Anas Sidik, dengan judul: Pengantar Ilmu Ekonomi, Bina Aksara, Jakarta.

Mansoer FW (2010); Pengantar Ekonomi Mikro, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Reksohadiprodo S, 2007; Peramalan Usaha; Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.

Samuelson PA, (?); Economics, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Media Sains Indonesia, Bandung.

SastroAtmodjo, Sunarno (2021); Pengantar Ekonomi Pembangunan. Insan Cendekia Mandiri, Solok.

SastroAtmodjo Sunarno (2021); Teori Mikroekonomi. Pustaka Learning Center, Malang.

E. Tentang Penulis



Erdinson Simbolon, S.E.

Penulis lahir di Desa Hutaginjang Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, pada tgl 25 Mei 1973. Menamatkan Pendidikan formal Sekolah Dasar (SD) Pada Tahun 1980-1986 dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 1986-1989, di Kecamatan Barus. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madya Medan, pada tahun 1989-1992. Dan melanjutkan Pendidikan ke Universitas Advent Indonesia Bandung (UNAI), pada tahun 1995-2001, dengan mengambil Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi.

Pada tahun 1993-1995 bekerja di Perusahaan Tekstil, di Bekasi dan Tangerang. Setelah itu Bekerja di Financial di Medan, pada tahun 2003-2007. Kemudian mengeluti pekerjaan di bidang Pendidikan, antara lain pernah menjadi Staff Pengajar dan wali kelas SMP Swasta Advent Sempurna Binjai Pada tahun 2008-2017. Kemudian di lanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Satria Nusantara Binjai sebagai sataff pengajar dan skaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah di Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun 2009-2017. Selanjutnya mendapatkan kepercayaan sebagai Kepala Sekolah SD dan SMP Advent 4 Padang Bulan Kota Madya Medan, pada tahun 2017-2019. Setelah itu mengajar di Perguruan SD, SMP, SMA Advent Pasir Putih Pekan Baru, pada tahun 2019-2020. Penulis mengajar di Perguruan SD, SMP, SMA Advent PAB XIV Bekasi. Jawa Barat. Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020 Sampai Sekarang Penulis Kepala Sekolah SMP Swasta Advent Sepakat Desa Sei Apung Kec. Kualih Hilir Kabupaten Labuhanbatu.Utara.

BAB 10 | INFLASI DAN DEFLASI

Dr. Hj. Arniati S.E. M.Pd.
Universitas Muhammadiyah Makassar
arniati@unismuh.ac.id

A. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu/ dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lainnya (Boediono, 1999: 155). Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang secara umum yang terjadi terus menerus. Tingkat inflasi yang digunakan adalah tingkat inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Pengukuran yang digunakan adalah dalam satuan persen. Samuelson (1995: 572) menyatakan bahwa tingkat inflasi adalah meningkatnya arah barang secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (prosentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dar suatu periode satu ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lainnya (Sadono, 2002: 15).

Eduardus Tandelilin (2001:214) melihat bahwa peningkatan inflasi secara relatif merupakan signal negatif bagi pemodal di pasar modal. Hal ini dikarenakan peningkatan inflasi akan meningkatkan biaya perusahaan Sirait dan D. Siagian (2002: 227), mengemukakan bahwa kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor.

Kenaikan barang ini dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:

1. Indeks biaya hidup, Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index).
2. Indeks Harga Perdagangan Besar (Wholesale Price Index), dan GNP Deflator.

1. Jenis Inflasi

Berdasarkan sifatnya

- a. Inflasi merayap/rendah (*creeping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10-30% pertahun.
- c. Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30-100% pertahun.
- d. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%).

Berdasarkan sebabnya inflasi

- a. *Demand Pull Inflation*. Inflasi ini timbul karena adanya permintaan keseluruhan yang tinggi di satu pihak, adalah sesuai dengan hukum permintaan, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik.
- b. *Cost Push Inflation*. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi

Berdasarkan asalnya

- a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) yang timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara.
- b. Inflasi yang berasal dari luar negeri, karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi.

2. Dampak Inflasi

Dampak Negatif

- a. Bila harga barang secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik, sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya.
- b. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di rush, akibatnya bank kekurangan dana dan berdampak pada tutup atau bangkrut, atau endahnya dana investasi yang tersedia.
- c. Produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan
- d. Distribusi barang relatif tidak adil
- e. Bila inflasi berkepanjangan, maka produsen banyak yang bangkrut karena produknya relatif akan semakin mahal sehingga tidak ada yang mampu membeli.

Dampak Positif

- a. bagi pengusaha barang-barang mewah (highend) yang mana barangnya lebih laku pada saat harganya semakin tinggi (masalah prestise).
- b. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi, produksi akan di usahakan seefisien mungkin dan konsumtifisme dapat ditekan.
- c. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
- d. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

3. Cara Mencegah dan Mengatasi Inflasi

Kebijaksanaan Moneter

- a. Mengatur jumlah uang yang beredar (M
- b. Memberlakukan politik pasar terbuka (jual/beli surat berharga), dengan menjual surat berharga, bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar.

Kebijakan Fiskal

Dengan cara pengurangan pengeluaran pemerintah serta menekan kenaikan pajak yang dapat mengurangi penerimaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Kebijakan yang Berkaitan dengan *Output*

Dengan menaikkan jumlah output misal dengan cara kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor barang meningkat atau kenaikan jumlah produksi, bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

Contoh Deflasi

Contoh deflasi adalah ketika ada saat dimana turunnya harga bahan makanan di Indonesia. Deflasi itu terjadi pada September tahun 2019 lalu, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami deflasi mencapai angka 0,27%. Kondisi itu terjadi akibat sebagian besar harga komoditas makanan dan bumbu-bumbu dapur menurun. Tercatat ada sejumlah 82 kota di Indonesia, yang terkena dampak penurunan harga tersebut, demikian dikutip dari laman OCBCNISP.

Salah satu cara menanggulangi atau cara mengatasi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mengambil kebijakan menurunkan tingkat suku bunga bank umum, dengan harapan masyarakat banyak melakukan pinjaman dari bank. Sehingga, memungkinkan pada akhirnya menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.

4. Hubungan Inflasi dan Nilai Tukar

Variabel kurs Dollar Amerika Serikat memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap inflasi di Indonesia. Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing yang disebabkan oleh hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta yang membengkak, berakibat pada menurunnya harga barang-barang ekspor kita diluar negeri, sehingga barang ekspor kita menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang-barang dari negara lain.

Penurunan harga tersebut menyebabkan peningkatan pada penjualan (hukum permintaan “apabila harga barang menurun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah”), sehingga penerimaan ekspor kita meningkat serta kemampuan untuk mengimpor barang juga meningkat maka *supply* barang di dalam negeri akan meningkat yang akan berdampak pada penurunan harga barang tersebut.

Kenaikan *output* dapat memperkecil laju inflasi, bertambahnya barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Berarti setiap terjadi depresiasi rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat maka akan meningkatkan permintaan uang di Indonesia, demikian juga sebaliknya. Hal ini disebabkan ketika nilai rupiah terdepresiasi maka harga barang-barang impor menjadi lebih mahal sehingga diperlukan rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli barang impor tersebut (Prasojo, 2003)

5. Pengendalian Inflasi di Indonesia

Inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat strukturekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat monetary policies. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari *cost push inflation* lebih besar dari pada *demand pull inflation*. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya *oil booming*, tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi

haltersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi, sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sector pertanian, yang dapat meningkatkan derajat inflasi.

B. Deflasi

Deflasi adalah keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang yang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia (*deflation*). Arti deflasi sendiri secara sederhana yakni ketika terjadi penurunan harga-harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kebalikan dari deflasi adalah inflasi. Sekilas deflasi tampak menguntungkan bagi orang karena harga-harga barang dan jasa jadi lebih terjangkau bagi konsumen. Adanya deflasi adalah jalan yang dianggap bisa menghemat pengeluaran lebih besar dibanding sebelumnya.

Namun deflasi bisa jadi pisau bermata dua, yang berarti bisa merugikan atau berdampak negatif, terutama dalam hal ini produsen barang atau penyedia jasa. Deflasi yang terjadi secara tajam atau terus menerus bisa merugikan aktivitas jual beli. Penurunan harga barang dan jasa seringkali membuat produsen atau penyedia jasa mengalami kerugian karena penjualan tak mampu menutup biaya produksi maupun biaya operasional. Jika deflasi semakin parah, tak jarang produsen atau penyedia jasa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi beban. Semakin tinggi deflasi, semakin tinggi pula potensi PHK tenaga kerja. Itu sebabnya, deflasi adalah seringkali dikaitkan dengan kondisi resesi. Deflasi seringkali terjadi saat kondisi perekonomian melesu. Roda perekonomian yang melambat terjadi karena permintaan atas konsumsi dan investasi yang anjlok.

Penyebab deflasi
Penyebab deflasi antara lain terlalu banyak barang yang sama yang diproduksi dalam satu waktu. Ini sesuai dengan prinsip ekonomi, semakin banyak pasokan

barang di pasar (penawaran), maka harga akan semakin murah. Penyebab deflasi yang dominan kedua yakni penurunan permintaan. Saat kondisi ekonomi memburuk, perilaku konsumen seringkali menghemat belanja dan menyimpan uangnya untuk kebutuhan yang lebih prioritas. Hal ini membuat permintaan akan barang atau jasa melemah, sehingga memicu harganya menurun. Penyebab lain dari arti deflasi juga bisa datang dari kebijakan pemerintah maupun bank sentral. Contohnya kebijakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter terkait suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, secara tak langsung mendorong masyarakat cenderung lebih suka menyimpan uangnya di bank karena faktor bunga, hal ini membuat uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit.

Masyarakat yang lebih memilih uangnya disimpan di perbankan membuat permintaan barang dan jasa lesu, sehingga memicu terjadinya deflasi. Dampak negatif deflasi Deflasi yang terus menurun atau angka deflasi yang tinggi bisa berdampak buruk pada perekonomian. Deflasi yang berlebihan bisa memicu meningkatnya angka PHK yang secara langsung membuat pengangguran meningkat. Deflasi ikut berpengaruh pada menurunnya upah minimum. Di Indonesia sendiri, salah satu komponen upah minimum adalah angka inflasi. Jika yang terjadi adalah deflasi yang merupakan kebalikan dari inflasi, maka upah minimum yang ditetapkan bisa lebih rendah. Deflasi adalah juga bisa mendorong lebih banyak kredit macet di perbankan dan lembaga keuangan. Hal ini diakibatkan karena banyak produsen atau penyedia jasa yang jadi debitur tengah dalam kondisi sulit karena angka penjualannya mengalami penurunan.

Deflasi juga berfek domino pada pendapatan negara yakni pajak. Dengan meruginya produsen barang dan penyedia jasa, otomatis membuat mereka tak bisa membayar pajak sebagaimana saat kondisi normal. Perhitungan deflasi Sebagaimana inflasi, arti deflasi juga dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Dikutip dari laman resmi BPS, deflasi adalah terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh

turunnya beberapa indeks kelompok pengeluaran. Beberapa IHK yang dipakai BPS dalam perhitungan apa itu deflasi antara lain kelompok makanan, minuman, tembakau, kelompok pakaian dan alas kaki, transportasi. Lalu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Contoh deflasi Deflasi yang cukup tinggi beberapa kali terjadi di Indonesia, baik lingkup nasional maupun daerah. Contohnya deflasi yang dicatat BPS pada September tahun 2019 secara nasional saat sebagian besar komoditas pangan dan bumbu dapur mengalami penurunan.

Saat itu secara nasional, angka deflasi Indonesia yakni sebesar 0,27 persen. Adapun berdasarkan hasil survei yang dilakukan BPS di 82 kota tersebut, terjadi 70 kota yang mengalami deflasi dan 12 kota mengalami inflasi. Deflasi adalah tertinggi terjadi di Sibolga, Sumatera Utara, yang sebesar 0,94 persen dan deflasi terendah terjadi di Surabaya sebesar 0,02 persen. Sementara inflasi tertinggi terjadi di Meulaboh, Aceh yang sebesar 0,91 persen.

Jenis Deflasi

Jenis deflasi antara lain:

- Deflasi sirkulasi adalah deflasi yang terjadi akibat adanya perubahan menurunnya perekonomian. Hal ini terjadi karena harga barang menurun, karena tingkat produksi dan konsumsi tidak seimbang.
- Deflasi strategis adalah deflasi yang terjadi karena strategi kebijakan pemerintah tidak berhasil. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu nyatanya tidak bisa menekan angka konsumsi berlebih, pada masyarakat. Sehingga, menyebabkan penurunan harga.

Dampak Deflasi

Dampak positif deflasi adalah masyarakat bisa membeli dengan harga barang yang murah. Dampak deflasi juga bisa menguatkan nilai mata uang. Namun, deflasi tidak bagus untuk

perekonomian. Dikutip dari buku 'Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis' oleh Henricus W. Ismanthono, adapun beberapa dampak dari deflasi adalah:

- Bertambahnya jumlah pengangguran, akibat banyaknya pengurangan karyawan perusahaan. Menurunya angka permintaan pasar, sehingga memaksa para produsen mengurangi jumlah produksinya.
- Penurunan keuntungan (laba) perusahaan. banyaknya penutupan pabrik, penurunan pendapatan serta meningkatnya gagal bayar (*default*) baik dari perusahaan maupun individu.

Apa Faktor Penyebab Deflasi?

Deflasi adalah keadaan menunjukkan harga barang dan jasa menjadi turun. Penyebab deflasi ada berbagai faktor berikut di antaranya:

- Produksi barang yang berjenis sama jumlahnya banyak
- Peraturan yang diterbitkan oleh Bank Sentral
- Berkurangnya jumlah uang yang beredar
- Penurunan permintaan barang atau jasa

APBN yang masuk ke kondisi surplus

1. Produksi Barang yang Berjenis Sama Jumlahnya Banyak

Di pasar Anda pasti sering melihat produk yang berjenis sama yang diproduksi beberapa perusahaan. Hal wajar untuk perusahaan memproduksi barang berjenis sama, tapi jika terlalu banyak bisa menurunkan harga produknya. Keadaan itu terjadi karena masing-masing perusahaan melakukan perang harga untuk menarik minat konsumen dengan penurunan harga barang. Dampaknya tentu saja pada hasil produksi yang jadi kurang maksimal dan risiko kerugian yang dialami perusahaan.

2. Peraturan yang Diterbitkan oleh Bank Sentral

Bank Sentral dikenal sebagai lembaga independen yang mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal seperti mengubah tingkat suku bunga dan mengatur jumlah uang

yang tersebar di masyarakat. Deflasi bisa terjadi ketika berbagai kebijakan itu diterapkan. Hal ini dilakukan misalnya ketika terjadinya inflasi secara terus-menerus yang menyebabkan ketidakseimbangan di pertumbuhan ekonomi.

3. Berkurangnya Jumlah Uang yang Beredar

Deflasi adalah keadaan yang dipengaruhi berkurangnya jumlah uang yang beredar. Hal ini dapat terjadi ketika suku bunga naik dan masyarakat berlomba-lomba menabung di bank. Tujuannya tentu saja agar memperoleh untung. Jumlah uang yang dipegang secara langsung oleh masyarakat pun mengalami penurunan secara perlahan. Deflasi pun tidak terhindarkan.

4. Penurunan Permintaan Barang atau Jasa

Deflasi adalah keadaan dapat memaksa produsen untuk menurunkan jumlah produksi. Alasannya karena daya beli masyarakat terhadap produk turun yang merujuk pada penurunan permintaan. Jika produsen tetap memaksa menjual di jumlah produk yang banyak, hal itu bisa membuatnya sulit menghindari kerugian. Mau tidak mau produsen mengimbangi jumlah produksinya dengan permintaan konsumen yang menurun.

5. APBN yang Masuk ke Kondisi Surplus

APBN adalah anggaran belanja yang wajib ditentukan setiap tahunnya oleh pemerintah. Jumlahnya harus bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Jumlah APBN kurang, biasanya pemerintah akan mencari cara untuk berutang. Jika jumlahnya lebih, hal itu juga tidak mudah karena tidak bisa dibelanjakan untuk waktu lama. Atau pemerintah bisa menggunakan sisa APBN untuk membayar utang yang menumpuk. Namun, ini pun dilakukan dengan angsuran, bukan langsung dibayar seluruhnya.

Apa Dampak Negatif Deflasi?

Deflasi adalah keadaan berdampak positif dan negatif. Ini adalah berbagai dampak negatif yang bisa dirasakan berbagai pihak:

- Penghasilan bisnis mengalami penurunan
- Upah minimum juga mengalami penurunan
- Nilai investasi mengalami penurunan

Terjadi PHK Masif

1. Penghasilan Bisnis Mengalami Penurunan

Bisnis bisa saja mengalami penurunan penghasilan diakibatkan permintaan yang menurun drastis. Daripada kena rugi, perusahaan memutuskan untuk mengurangi produksi. Hal itu pun membuat penghasilan mereka menurun dari yang biasanya.

2. Upah Minimum Juga Mengalami Penurunan

Upah minimum naik akibat dari adanya inflasi yang terjadi. Deflasi adalah hal yang bisa membuat upah minimum menjadi turun karena penurunan harga barang dan jasa. Penurunan upah minimum ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat. Mereka juga harus beradaptasi menggunakan pendapatan seadanya demi bisa bertahan hidup. Upah minimum yang paling ideal tentunya yang selalu naik. Semakin naik umur, kebutuhan masyarakat juga akan makin banyak.

3. Nilai Investasi Mengalami Penurunan

Dampak negatif lainnya dari deflasi adalah investasi dan harga saham menurun. Hal itu karena tidak ada pertumbuhan dari perusahaan yang melantai di bursa saham. Investasi yang nilainya menurun ini akan membuat investor lokal dan asing enggan menyimpan modal mereka pada saham-saham yang beredar di Indonesia.

4. Terjadi PHK Masif

PHK juga bisa jadi tidak terhindarkan. Perusahaan tidak mampu memproduksi banyak produk. Pemasukan mereka menurun dan akhirnya membuat perusahaan terpaksa melakukan PHK untuk efisiensi.

Cara Mengatasi Deflasi

Dengan melihat dampak negatif deflasi, hal ini harus segera ditanggulangi agar bisa normal kembali. Biasanya inilah cara Bank Sentral atau pemerintah untuk mengatasi deflasi.

- Meningkatkan upah untuk tenaga kerja
- Menurunkan biaya pajak
- Menurunkan suku bunga

1. Meningkatkan Upah untuk Tenaga Kerja

Pemerintah bisa mengambil kebijakan menaikkan upah tenaga kerja. Hal ini tentunya harus diikuti oleh perusahaan yang berada di Indonesia.

2. Menurunkan Biaya Pajak

Cara lainnya untuk mengatasi deflasi, yaitu pemerintah berwenang menurunkan biaya pajak untuk perusahaan. Mereka pun menggunakan uang dari pengurangan itu untuk meningkatkan produksi dan tidak perlu melakukan efisiensi.

3. Menurunkan Suku Bunga

Suku bunga yang turun dapat membuat jumlah uang yang tersebar menjadi naik. Hal ini pun memancing daya beli masyarakat untuk mengalami peningkatan.

Cara Mengatasi Deflasi

Deflasi dapat diibaratkan jatuh sakitnya seseorang karena jarang berolah raga. Apabila seseorang pada dasarnya memiliki kaki normal namun malas menggunakannya, maka ini akan mengakibatkan menyusutnya otot-otot kaki yang jarang digunakan tersebut. Dalam jangka waktu lebih lama orang tersebut akan tidak dapat berjalan sama sekali terhubung otot

sudah terlalu lemah untuk digunakan. Apabila keadaan ini justru didiamkan, bukan tidak mungkin akan mengalami kelumpuhan selamanya.

Cara yang paling lazim digunakan adalah memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi kembali berputar. Pemerintah juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggairahkan perekonomian. Dari sisi Bank Sentral, pemerintah juga dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat dengan membeli surat hutang sektor swasta dan menukarkannya dengan uang tunai. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memotong suku bunga. Namun seperti dijelaskan di atas, memotong suku bunga bukanlah jalan keluar yang sesungguhnya tetapi hanya sekedar pengobatan sementara untuk menggairahkan ekonomi dan mengharapakan harga bergerak naik dengan sendirinya.

Pengaruh Deflasi

1. Penurunan persediaan uang, deflasi dapat menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan menyebabkan depresi besar (seperti yang dialami Amerika dulu) dan juga akan membuat pasar Investasi akan mengalami kekacauan.
2. Memperlambat aktivitas ekonomi, dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral deflasi (*deflationary spiral*).
3. Dampak susulan dari melesunya kegiatan ekonomi adalah banyak pekerja yang akhirnya mengalami PHK karena pemilik bisnis tidak sanggup membayar gaji karyawannya. Dengan demikian pendapatan yang diterima masyarakat menjadi sedikit dan jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin berkurang.

4. Investasi, deflasi juga mengakibatkan melesunya investasi di sektor riil maupun di lantai bursa. Akibatnya ini akan menambah berat kelesuan ekonomi dikarenakan tidak ada lagi aktivitas bisnis yang berjalan.
5. Deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga disuatu negara menjadi nol persen. Lalu diikuti juga dengan turunnya suku bunga pinjaman di bank. Ini memang merupakan langkah paliatif untuk mencegah masyarakat menyimpan uangnya di bank yang dapat membuat peredaran uang semakin kecil.
6. Deflasi akan membuat orang menyimpan uang sehingga uang benar-benar dihargai dan jaminan keamanan sosial politik. Orang akan banyak berinvestasi langsung dan ketersediaan barang terjamin. Akibatnya nilai mata uang akan menguat.
7. Deflasi akan membuat jatuh nilai properti. Orang lebih suka mendepositokan uangnya di bank atau pasar modal daripada beli properti yang tidak naik. Karena harga terus turun maka produsen cenderung kurang berminat memproduksi barang. Kesempatan kerja berkurang karena banyak PHK. Pajak tidak dapat ditarik oleh pemerintah sehingga pendapatan negara berkurang. Kegiatan perekonomian secara keseluruhan mengalami kemunduran.

C. Daftar Pustaka

- Atmadja, Adwin.S Inflasi di Indonesia sumber-sumber dan penyebab dan pengendaliannya, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 1, No 1, MEI 1999: 54-67.
- Aprilia, Aryani. 2003. Deflasi Pasir Pada Berbagai Tipe Gumuk Pasir Di Parangtritis. *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada.
- Babatunde, Musibau Adetunji and Shuaibu, Muhammad Isa, "Money Supply, Inflation and Economic Growth in Nigeria. Asian-African Journal of Economics and Econometrics, Vol. 11, No 1, 2001:147-163
- Boediono. 1993. Ekonomi Makro. Pengantar Ilmu Ekonomi No 2. BPFE: Yogyakarta

- Dyahrini, Wien dan Rachman, Ibnu. "Pengaruh inflasi terhadap perekonomian di Kotamadya dan kabupaten Bandung, Fakultas Bisnis dan Manajem. Fakultas Ekonomi Widyatama.
- Kasmir, 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Kasmir, 2005. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Nawangwulan, Nidya Elga Ayu. "Pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga SBI Rate dan Nilai Tukar terhadap Indeks Harga Saham di Jakarta Islamic Index dan Index Liquid (LQ-45). Skripsi FEBAI Univ Muhammadiyah Surakarta.
- Nopirin. 1987. *Ekonomi Moneter*. Buku II, Yogyakarta: BPFE.
- Nopirin, 2013. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Primawan, Wisda Nugroho. Analisis faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia 2001-2014. Skripsi FEB Univ Diponegoro, 2012.
- Perlambang, Heru. Analisis Pengaruh Jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap tingkat inflasi". Univ Trisakti, Media Ekonomi Vol. 19 No 2, Agustus 2010.
- Rizkiyanti Oktavia, Sesy, "Analisis Pengaruh BI Rate, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar, terhadap Capital Adequency Ratio dan implikasinya terhadap penawaran kredit. 2004. 2009. Skripsi, FEB UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2010.
- Setyawati, Yunita, "Analisis Kausalitas Inflasi, dan pertumbuhan ekonomi 1994.1- 2003.4. Dengan Metode Error Correction Model. Skripsi, FE UII Yogyakarta.

D. Tentang Penulis



Dr. Hj. Arniati S.E. M.Pd.

Lahir di Bontobangun Bulukumba pada tanggal 07 Maret 1971 dari pasangan Puang Muddin dan Puang Hj. Cicang. Pendidikan formal dimulai dari SD Negeri 85 Bingkarongo lulus pada tahun 1985, kemudian SMP Negeri Palampang lulus pada tahun 1988, dan SMA Negeri Tanete lulus pada tahun 1991 di Kabupaten Bulukumba. Penulis kemudian melanjutkan studi jenjang S1 pada jurusan Manajemen STIE Bajiminasa Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1997. Selanjutnya penulis menamatkan S2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (Kekhususan Pendidikan Ekonomi) program pascasarjana UNM yang lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2012, penulis menempuh kembali Pendidikan lanjutan yaitu program S3 Program Pascasarjana UNM Program Studi Pendidikan Ekonomi dan menamatkannya pada tahun 2017.

Riwayat pekerjaan penulis dimulai dengan berprofesi sebagai Dosen Tetap Yayasan STISIPOL 17 Agustus 1945 Ujung Pandang mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 penulis merupakan dosen di STKIP Mega Rezky Makassar. Tahun 2017 sampai sekarang, penulis adalah Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain menjadi tenaga pengajar, penulis aktif meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

BAB 11

KRISIS ILMU EKONOMI DAN ILMU EKONOMI PANCASILA

Slamet Suprihanto

A. Krisis Ilmu Ekonomi

1. Pengertian Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari cara pemenuhan kebutuhan (permintaan) manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan sumber daya ekonomi (penawaran) yang terbatas. Inilah yang menyebabkan munculnya kelangkaan kebutuhan manusia (berupa barang dan jasa) yang akhirnya memunculkan hukum permintaan dan penawaran.

Berikut pengertian Ilmu Ekonomi lainnya menurut para ahli:

a. Alfred Marshall

Melalui Bukunya yang berjudul *The Principle of Economics*, Alfred Marshall berpendapat Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan pun kolektif dan kaitannya dalam penggunaan barang-barang material.

b. H. J. Davenport

Dalam Buku *"Economics of Enterprise"*, H.J. Davenport mengungkapkan ilmu ekonomi sebagai Ilmu pengetahuan yang mengendalikan berbagai masalah dari titik tolak harga. Ilmu ekonomi juga merupakan peralatan

yang mempelajari bagaimana tingkat produksi dapat ditingkatkan sehingga tingkat hidup masyarakat secara otomatis akan meningkat pula.

c. M. Manullang

Menurut M. Manullang ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

d. Oscar Langen

Ilmu ekonomi menurut Oscar Langen adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata administrasi dari berbagai sumber daya baik sumber daya kecil maupun besar yang kemudian dianalisis sehingga dapat dipergunakan kembali bagi kehidupan manusia secara maksimal dan sebaik-baiknya.

e. John Stuart Mill

Menurut John Stuart Mill ilmu ekonomi yang mempelajari beragam seluk beluk penagihan dan pengeluaran. Tak hanya itu menurut stuart ekonomi juga membahas berbagai kegiatan produksi dan distribusi kekayaan.

f. Prof. P. A. Samuelson

Dalam buku *Economics: An Introductory Analysis* Prof. P. A. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas yang kemudian diolah lagi untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk kemudian didistribusikan lagi ke berbagai lapisan masyarakat.

g. Louis Cantori

Menurut Louis Cantori Ilmu ekonomi dipandang dari sudut pandang Islam adalah ilmu ekonomi yang

didasarkan pada berbagai aturan islam. Misalnya saja mengenai masalah yang menjamin berputarnya harta yang dimiliki oleh seorang individu.

h. Suherman Rosyidi

Suherman Rosyidi sebagai Filsuf asal Indonesia berpendapat ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran.

i. Adam Smith

Sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Menurut Adam Smith Ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu.

j. Mankiw

Mankiw berpendapat seseorang yang menguasai Ilmu Ekonomi akan meningkatkan pemahamannya atas beragam potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana suatu individu kemudian saling berinteraksi satu sama lain.

2. Krisis Ilmu Ekonomi

Krisis ilmu ekonomi ini disebabkan karena adanya sumber daya ekonomi (penawaran) yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan (permintaan) manusia yang tidak terbatas. Di sisi lain, krisis tersebut merupakan refleksi kegagalan ilmu ekonomi konvensional yang menjadi pondasi berkembangnya sistem ekonomi global.

Ilmu ekonomi yang mengedepankan pandangan rasionalisme, kompetitivisme, self interest, orientasi pertumbuhan dan profit maximization ini telah mendorong perebutan penguasaan sumber daya yang berujung pada

eksploitasi satu negara terhadap negara lain beserta kekayaan alam (lingkungan)nya. Ilmu ini makin bias pada (kepentingan) negara maju (kaya) yang lebih memfokuskan perhatian pada ekonomi modern (usaha besar) sehingga mengabaikan perhatian pada pemecahan masalah-masalah riil yang dihadapi pelaku ekonomi rakyat. Bahkan teori-teori tentang ekonomi rakyat tidak dikembangkan karena asumsi pelaku produksi hanyalah perusahaan (besar). Ilmu ekonomi inipun dikembangkan secara positivistik, sehingga mengabaikan faktor-faktor kelembagaan sosial budaya dan nilai-nilai kerja sama, kebersamaan dan moralitas/etika lokal yang dimiliki ekonomi rakyat. Jelas ilmu ekonomi seperti ini makin tidak cocok untuk dikembangkan dan diterapkan di negara sedang berkembang seperti Indonesia.

B. Ilmu Ekonomi Pancasila

1. Pendahuluan

Secara tidak langsung Ekonomi Pancasila sudah digagas oleh pendiri bangsa sejak Indonesia merdeka, hal ini terlihat nampak dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara kita, selain itu juga sudah terimplikasi dalam Sila-Sila Pancasila, serta terdapat dalam perkataan Bapak Mohammad Hatta yang telah mencanakan bahwa soko guru perekonomian Negara Kita adalah Koperasi yang terimplikasi dalam UUD 1945 yaitu Pasal 33 Ayat 1 sampai dengan 3.

Sistem ekonomi adalah aturan atau tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih tujuan tertentu. Dalam suatu negara, sistem ekonomi didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Salah satu konsep sistem ekonomi yang pernah dikenalkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem ini mulai ramai diperbincangkan ketika Mubyarto, seorang pakar ekonomi kerakyatan, menggagas sistem ekonomi jalan tengah sebagai kritik terhadap corak ekonomi Indonesia yang dipandang kapitalis.

Jauh sebelum Mubyarto, sebenarnya Emil Salim telah lebih dulu melontarkan gagasan Sistem Ekonomi Pancasila dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa nasional. Gagasan yang belum cukup jelas tersebut terbit pada tahun 1966. Banyaknya sistem ekonomi yang tersebar di seluruh negara di dunia mampu melahirkan adanya masalah ekonomi modern yang kerap kali dialami para pebisnis yang kerepotan untuk menerapkannya pada bisnis yang sedang dilakukan. Tapi, di negara kita ada beberapa sistem ekonomi yang diambil oleh para pebisnis, salah satunya adalah sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, memahami pengertian sistem ekonomi pancasila sangat penting bagi kita, masyarakat Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila diharapkan mampu menjadi satu sistem bisnis yang baik untuk para pengusaha di Indonesia. Hal ini terbukti dari lahirnya para pendiri perusahaan start up yang saat ini muncul di pasar konsumen Indonesia. Tapi, sebagian orang masih sulit dan tidak tau apa itu sistem ekonomi Pancasila. Bahkan, sebagian pebisnis di Indonesia acap kali sulit memahami sistem ekonomi Pancasila itu sendiri secara mendalam. Kebanyakan dari mereka lebih memanfaatkan sistem ekonomi tradisional daripada sistem ekonomi Pancasila.

Untuk itu, para pebisnis sudah seharusnya mempelajari dan mencari berbagai info serta ulasan terkait sistem ekonomi Pancasila agar bisa dipahami secara utuh. Berikut ini kami akan membahas secara lengkap tentang sistem ekonomi Pancasila, tujuan, dan penerapan sistem ekonomi Pancasila.

2. Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

Sederhananya, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Bebeapa negara tertentu selalu menerapkan sistem

ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara itu, pun sama halnya dengan Indonesia.

Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan.

Seerti yang sudah kita ketahui, kebanyakan produksi masyarakat saat ini merupakan usaha swasta yang bersandingan dengan perusahaan yang mencakup di bidang pertanian, perikanan, pertambangan, transportasi, dll.

3. Ciri-Ciri Sebuah Sistem Ekonomi Pancasila

Berikut ini adalah ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila seperti yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 33 dan GBHN Bab 3B No. 14:

Pasal 33 Setelah Amandemen 2002

- 1) Sistem Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan dan disusun sebagai bentuk usaha bersama.
- 2) Sumber daya yang mencakup bumi dan air serta kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dengan tujuan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 3) Negara menguasai berbagai cabang produksi yang penting bagi kepentingan hidup orang banyak.
- 4) Perekonomian nasional dilakukan dengan adanya prinsip ekonomi kebersamaan atas dasar demokrasi ekonomi, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan peraturan lebih lanjut tentang pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

4. Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila dalam Bisnis

Dalam dunia bisnis sendiri, penerapan dari sistem ekonomi Pancasila sangat beragam dan sangatlah luas.

- **Penerapan Sila Ke-1**

Sistem pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah terjadinya kemungkinan kerugian dan mencegah peluang adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama atau Ketuhanan yang Maha Esa.

- **Penerapan Sila Ke-2**

Memberikan upah dan fasilitas pegawai sesuai dengan tingkat performa, tanggung jawab, serta risiko yang diberikan pada perusahaan pun merupakan bentuk penerapan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

- **Penerapan Sila Ke-3**

Memproduksi barang bisnis terbaik, yang tidak bertentangan dengan berbagai nilai serta norma masyarakat serta memiliki manfaat yang baik untuk seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu bentuk dari sila ke-3. Dengan memproduksi barang yang baik dan bermanfaat untuk banyak orang, maka kita memiliki harapan bahwa produk tersebut mampu digunakan dan tidak menyebabkan masalah ketika memanfaatkannya.

- **Penerapan Sila Ke-4**

Dengan adanya sistem kebersamaan dan juga musyawarah perusahaan dalam hal memutuskan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan usaha merupakan bentuk dari sila ke-4 yang lebih mengutamakan adanya permusyawaratan.

- **Penerapan Sila Ke-5**

Terjadinya proses yang baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha

merupakan penerapan dari sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila

Apapun tujuan sistem ekonomi yang diambil oleh suatu negara, tentunya memiliki tujuan yang diharapkan mampu dicapai oleh sistem ekonomi yang dianut. Untuk di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dalam berbisnis.
- c. Kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas.
- d. Adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat.
- e. Adanya koordinasi yang efektif dan efisien terhadap adanya proses produksi, konsumsi dan investasi contohnya adalah dalam menanggapi terjadinya perubahan cara produksi atau pola kebutuhan masyarakat.
- f. Adanya tindakan pertimbangan yang tergolong wajar antara kepentingan saat ini dan kepentingan masa depan.
- g. Adanya tindakan pertimbangan yang dinilai wajar antara barang untuk kepentingan perorangan dan kepentingan umum.
- h. Adanya tindakan pemerataan pendapatan dan persamaan antar berbagai golongan dan seluruh lapisan masyarakat.
- i. Adanya pertimbangan yang wajar antar kekuasaan dan pengaruh antara golongan atas dan bawah.
- j. Diindahkannya seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas dan sebagainya.

6. Fungsi Sistem Ekonomi Pancasila

Terlepas dari adanya kekurangan serta kelebihan sistem ekonomi Pancasila, pada dasarnya sistem perekonomian yang saat ini diambil oleh Indonesia masih termasuk sebagai salah satu yang berkembang, terutama untuk Anda yang ingin memulai bisnis atau memulai usaha startup company, yang beberapa di dalamnya masih menganut beberapa sistem ekonomi Pancasila demi mengambil pasar konsumen di Indonesia.

Pentingnya instrumen kebijakan finansial sebagai suatu tolak ukur guna mengindikasikan adanya berbagai fungsi sistem ekonomi Pancasila tersebut di klaim berhasil. Adapun beberapa fungsi sistem ekonomi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi
- b. Agar bisa menciptakan kordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekomian
- c. Guna mengatur pembagian hasil atas suatu produksi dalam anggota masyarakat secara keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan.
- d. Agar mampu menciptakan suatu metode tertentu, sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik

7. Contoh Penerapan Ekonomi Pancasila

a. Koperasi

Koperasi adalah salah satu bentuk penerapan Pancasila yang mampu meningkatkan perekonomian suatu institusi. Koperasi adalah bentuk usaha kolektif yang memiliki asas kekeluargaan.

Seluruh bentuk pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalamnya dikendalikan oleh seluruh anggota sehingga bisa menghindari kesenjangan ekonomi antar individu. Namun, saat ini popularitas ekonomi sudah

semakin surut, kondisi ini bisa dilihat dari banyaknya bentuk koperasi di Indonesia yang hanya tinggal papan namanya saja.

b. BUMN

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menunjukkan adanya peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian dalam berbagai bidang. Ketika BUMN mengalami kondisi privatisasi, maka hal ini bisa dipandang sebagai indikasi adanya kekurangan peran serta negara dalam hal mengelola perekonomian.

c. Serikat Buruh

Serikat buruh adalah suatu bentuk gerakan kolektif yang dilakukan oleh kelas pekerja. Adanya relasi antar para pekerja dan investor yang rentan di eksploitasi bisa ditekan atau diminimalisir lewat serikat buruh.

Adanya serikat buruh yang kuat memiliki posisi tawar yang kuat pula di mata para investor. Selain itu, kesenjangan pendapatan yang terjadi antar buruh dan pengusaha, termasuk tim manajerial perusahaan, bisa diminimalisir jika serikat buruh mempunyai posisi yang kuat. Jadi, ekonomi Pancasila lebih mengutamakan adanya kemakmuran bersama, bukan kemakmuran yang hanya bisa dinikmati oleh sekelompok elit.

8. Program Kuliah Ekonomi Pancasila

Dalam rangka untuk memperkenalkan Ilmu Ekonomi Pancasila ditengah masyarakat pemerintah pemerintah menggunakan beberapa cara salah satunya yaitu Program KEEP 2005 (Kuliah Ekstrakurikuler Ekonomi Pancasila) di FE-UGM dengan peminat yang jauh melebihi kapasitas, merupakan langkah besar melahirkan kader-kader pemikir ekonomi Indonesia yang Pancasila, yaitu beretika atau berakhlak mulia, bersemangat kemanusiaan, nasionalistik, rakyat, dan berkeadilan sosial. Tentu saja pertemuan 42 jam selama 5 bulan bukan jaminan peserta KEEP akan

otomatis menjadi ekonom-ekonom Pancasila andalan. Kuliah-kuliah ini hanyalah satu bagian dari proses “revolusi cara berpikir” yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi penting yang dihadapi bangsa Indonesia. Para peserta harus bekerja keras dan secara sungguh-sungguh membaca buku-buku dan bahan-bahan bacaan lain yang sudah tersedia, dan pada waktu-waktu yang telah direncanakan terjun ke lapangan untuk mempelajari praktek-praktek berekonomi dari ekonomi rakyat kita. Selanjutnya harus dikembangkan semangat berdiskusi di antara peserta untuk membahas aneka isu masalah ekonomi bangsa seperti kontroversi kenaikan harga BBM yang disebut di atas. Kita berharap peserta terangsang semangatnya untuk menulis apa saja yang dianggap perlu untuk ditulis tentang ekonomi Pancasila.

Dalam program kuliah ini, ilmu ekonomi Pancasila dikembangkan dengan mendalami perilaku pelaku-pelaku ekonomi rakyat mencakup ke-5 sila Pancasila yaitu ilmu ekonomi sebagai ilmu ekonomi etik, ilmu ekonomi humanistik, ekonomi nasionalistik, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam pendalaman ini selalu diingat bahwa sila ke-1 dan ke-2 adalah dasar sistem ekonomi, sila ke-3 dan ke-4 adalah cara atau metode berperilaku dari pelaku-pelaku ekonomi, dalam mewujudkan tujuan berekonomi yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sangat menarik bahwa dari 110 peserta sebanyak 27 orang (24%) adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM sendiri, yang menyatakan tidak puas dengan materi-materi kuliah yang mereka terima selama ini, dan ada diantaranya yang menyatakan “menjadi bingung”. Ada yang tegas-tegas menginginkan diadakannya buku-buku dan ditawarkannya mata kuliah khusus ekonomi Pancasila di FE-UGM.

- a. Saya merasa buta dengan kondisi bangsa saya sendiri karena setiap hari kami mendapat materi tentang ekonomi Barat. Dan saya bingung apakah hal itu tepat

untuk bangsa kita. Dalam program ini saya ingin lebih memahami apa yang sedang terjadi di negara ini melalui kacamata ekonomi Pancasila yang seharusnya memang untuk bangsa Indonesia (Meirma Driyasari).

- b. Melalui KEEP saya berharap untuk mengetahui apa dan bagaimana ekonomi Pancasila itu, karena meskipun kuliah di jurusan IESP, saya belum pernah mengetahui ekonomi Pancasila (Satria Ardhi).
- c. Setelah mengerti dan memahami ekonomi Pancasila, saya ingin menyebarluaskan sisi positif ekonomi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat yang dapat saya jangkau (anonim).
- d. Mengikuti KEEP adalah sebagai langkah awal untuk mencapai keinginan saya menjadi seorang pejuang dan penulis ekonomi Pancasila dari bangsa dan negeri Indonesia (Chairul Wismoyo).
- e. Sebagai mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik, sangat penting bagi saya untuk memahami sebab-sebab kemunduran bangsa Indonesia ditinjau dari berbagai dimensi. Kebangkrutan di berbagai bidang pertama kali dimulai dari masalah ekonomi yang kemudian merambat dan menyentuh berbagai bidang lainnya, termasuk dimensi kehidupan sosial dan politik (Ario Wicaksono).

C. Daftar Pustaka

- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ilmu-ekonomi/>
- <https://brainly.co.id/tugas/19214541>
- <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/pengertian-sistem-ekonomi-pancasila/>
- <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5773824/mengenal-sistem-ekonomi-pancasila-dan-ciri-cirinya>
- <https://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/highlight/lahirnya-ekonomi-pancasila/>

D. Tentang Penulis



Slamet Suprihanto, SE., M.Ak., MM., CAP., CAAT., CTT.

Penulis lahir di Ngawi tanggal 21 April 1967. Beliau seorang dosen di STIE Tribuana Kota Bekasi. Latar belakang pendidikan penulis antara lain: SDN Kawi I Lulus tahun 1980, SMPK St. Thomas Ngawi Lulus tahun 1983, SMEA Kosgoro ngawi Lulus tahun 1986, dan Universitas Gajayana Malang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Lulus tahun 1992. Sedangkan di Pascasarjanya, penulis mengambil Konsentrasi Magister Manajemen Pendidikan di STIE IGI Jakarta Lulus tahun 2008 dan Magister Akuntansi STIE Swadaya Lulus tahun 2017.

Pengalaman Bekerja penulis sangat beragam diantaranya Akuntansi Keuangan dan Pajak di CV. Jaya Raya Mojokerto (Tahun 1993 - 1994), Bhineka Consultan Group Surabaya (Tahun 1994), Akuntansi Keuangan dan Pajak di PT. Pembina Hyose Industry Jakarta (Tahun 1994 - 2006), Guru Akuntansi di SMK Al Hadiid 2 Cileungsi (Tahun 2002 - 2015), dan Dosen di STAI Nida El Adabi Parung Panjang (Tahun 2006 - 2010). Selain itu juga bekerja sebagai Guru Akuntansi di SMK Global Surya Mandiri Kota Bekasi (Tahun 2007 - sampai sekarang), Dosen di STIE Nasional Indonesia Jakarta (Tahun 2008 - 2018) dan Dosen Tetap di STIE Tribuana Kota Bekasi (Tahun 2017 - sampai dengan sekarang)